



# **RENCANA STRATEGIS**

**(R E N S T R A)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KABUPATEN TANAH BUMBU**

**TAHUN ANGGARAN 2016-2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang memuat tentang gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, isu-isu strategis berdasarkan tugas fungsi, visi misi tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 ini disampaikan, yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh dari semua program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dan sasaran yang diamanahkan dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten tanah Bumbu. Untuk itu dukungan dari semua pihak terkait sangat diharapkan dalam pelaksanaannya.

Batulicin,

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KAB. TANAH BUMBU**

**Roy Rizali Anwar, MT  
Pembina TK.I  
NIP. 19810430 200312 1 006**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI ....</b>	<b>ii</b>

### **Bab 1 PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG.....	3
1.2. LANDASAN HUKUM.....	8
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	11
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12

### **Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	14
2.2. SUMBER DAYA.....	31
2.3. KINERJA PELAYANAN.....	85
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	111

### **Bab 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	113
3.2. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI.....	119
3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	122

3.4. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	126
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	130

#### **Bab 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

4.1. VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	134
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	136
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	138

#### **Bab 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1. RENCANA PROGRAM.....	147
---------------------------	-----

#### **Bab 6 INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

6.1. INDIKATOR ..	152
-------------------	-----

#### **Bab 7 KAIDAH PELAKSANAAN**

7.1 KAIDAH PELAKSANAAN.....	155
-----------------------------	-----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Kabupaten Tanah Bumbu dalam konteks pembangunan nasional memiliki beberapa peran dan fungsi strategis yang cukup penting untuk dilaksanakan dan diimplementasikan dalam pembangunan daerahnya. Dalam RTRW Nasional yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 direncanakan adanya pembangunan jalan bebas hambatan Pagatan-Batulicin-Tanah Grogot (Kuario) dan pembangunan Pelabuhan Batulicin sebagai pelabuhan simpul transportasi laut

nasional. Kabupaten Tanah Bumbu juga ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional (KSN) yaitu *Kawasan Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin* yang merupakan satu-satunya KSN di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum untuk menunjang dan mewujudkan terlaksananya sasaran dan program pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Hal ini sejalan dengan 7 arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2015-2019 yang salah satunya menekankan pada usaha mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Penjabaran dari amanah RPJMN tersebut tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan program sebagai berikut :

1. Bidang Sumber Daya Air, melalui pembangunan 65 waduk, pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1,13 juta Ha, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2,34 Ha, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 7,63 Ha, pembangunan/peningkatan sarana prasarana air baku sebesar 67 m<sup>3</sup>/dt, rehabilitasi sarana prasarana air baku sebesar 22 m<sup>3</sup>/dt, rehabilitasi 45 bendungan, pembangunan 1.893 unit embung dan tampungan air, normalisasi sungai dan pembanguunan tanggul sepanjang 1.954 km, rehabilitasi tanggul sungai sepanjang 776 km, pembangunan sarana dan prasarana pengendali lahar sebanyak 306 sabo dam, dan pembangunan 530 km sarana prasarana pengaman pantai.
2. Bidang Bina Marga, terdiri dari pembangunan 2.650 km jalan nasional, dukungan jalan sub nasional sepanjang 500 km, pemeliharaan jalan nasional sepanjang 45.592 km, pembangunan jembatan sepanjang 22.599 m, penggantian jembatan sepanjang 19.938 m, pembangunan fly over dan underpass sepanjang 14.600 m, pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 1.000 km

3. Bidang Cipta Karya, meliputi pembangunan infrastruktur SPAM regional sebanyak 1,32 juta SR, pembangunan infrastruktur SPAM perkotaan sebanyak 14,26 juta SR, pembangunan infrastruktur SPAM perdesaan sebanyak 9,66 juta SR, pembangunan infrastruktur SPAM kawasan khusus sebanyak 2,43 juta SR, penanganan kawasan kumuh seluas 38.341 Ha, penanganan kawasan permukiman perdesaan seluas 78.384 Ha, pengembangan kawasan permukiman khusus seluas 3.099 Ha, penyelenggaraan penataan bangunan seluas 553.000 m<sup>2</sup>, pembangunan IPAL terusat skala kab/kota di 438 kab/kota, pembangunan IPLT di 409 kab/kota, pembangunan TPA skala kab/kota di 341 kab/kota, pembangunan TPST/3R skala komunal di 334 kab/kota, dan pengurangan genangan kawasan permukiman seluas 22.500 Ha
4. Bidang Jasa Konstruksi, berupa menyediakan 10.000 orang instruktur pelatihan kompetensi konstruksi, 750.000 orang tenaga kerja konstruksi terlatih, menjalin kerjasama penyelenggaraan pelatihan konstruksi dengan 200 lembaga, menjangkau 50 paket pekerjaan konstruksi internasional, peningkatan BUJK kualifikasi besar sebanyak 120 perusahaan,
5. Bidang Pembiayaan Perumahan, terdiri dari fasilitasi sebanyak 900.000 rumah tangga yang mendapatkan fasilitas KPR-FLPP rumah tapak dan sarusun, sebanyak 450.000 rumah tangga yang mendapatkan fasilitas KPR-FLPP rumah swadaya, dan sebanyak 476.000 rumah tangga MBR yang mendapatkan fasilitas bantuan uang muka.
6. Bidang Penyediaan Perumahan, terdiri dari fasilitasi terhadap 250.000 rumah tangga yang mendapatkan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya, pembangunan 550.000 unit sarana rumah susun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya, fasilitasi 450.000 rumah tangga yang memperoleh akses KPR swadaya dan fasilitasi 1,5 juta rumah tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas rumah di perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal.

Dalam Renstra PU ditetapkan sebanyak 32 wilayah pengembangan strategis (WPS) di seluruh Indonesia yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur pada beberapa kawasan strategis nasional (KSN) yang

terletak pada satu kawasan yang saling terkait. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu WPS yang ditetapkan secara nasional yaitu berada pada WPS 22 Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dengan program prioritas yang dialokasikan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :

1. Pembangunan infrastruktur air limbah
2. Pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
3. Pembangunan SPAM kawasan MBR
4. Pembangunan SPAM IKK
5. Pembangunan jalan lingkar dalam Batulicin
6. Pembangunan jalan akses kawasan industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin
7. Pembangunan perumahan
8. Pembangunan Infrastruktur permukiman
9. Pembangunan pengaman pantai Rindu Alam

Sebagai tindak lanjut terpilihnya Bupati Tanah Bumbu masa bakti 2016-2021, saat ini telah disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dimana saat ini RPJMD tersebut merupakan pembangunan jangka menengah ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2006-2025. Misi pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJMD tersebut meliputi :

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

Berdasarkan hal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mengimplementasikan amanah dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah tersebut melalui penyediaan, pembangunan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum, melakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini disusun bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Infrastruktur.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu mencakup:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  10. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 2 Tahun 2015, tanggal 08 April 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015- 2019;
  19. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 8 Januari 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tanggal 8 April 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021;
28. RPJMN 2015-2019
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Rencana strategis tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu disusun dan berpedoman pada Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan, Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu sebagai landasan untuk melaksanakan capaian tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, dan program yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu di bidang ke-PU-an pada lima (5) tahun ke depan (Tahun 2016 – 2021)

#### **B. Tujuan**

Secara Umum tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Sebagai instrumen dan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah.
4. Sebagai kontrak kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Bupati selaku Kepala Daerah apabila diperlukan

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

- BAB I    Pendahuluan  
          Mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- Bab II    Gambaran Pelayanan SKPD  
          mencakup Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- Bab III   Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
          Mencakup Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV    Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
          Mencakup Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
- Bab V     Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI    Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII   Kaidah Pelaksanaan

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PENATAAN RUANG**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**A. Tugas Pokok**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

**B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang gpekerjaan umum dan penataan ruangsesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menetapkan kebijakan teknis dibidangpekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang bina marga;
- d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang cipta karya;
- e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang SDA;
- f. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang tata ruang dan jasa kontruksi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- h. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
- i. mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

### **C. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bentuk Peraturan Bupati, unsur-unsur Organisasi Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang kepala dinas terdiri dari :

## **1. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;
- g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
- h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
- i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;

- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
- k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
- l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara;
- m. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- p. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
- q. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Sekretariat terdiri dari:

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik Negara

Untuk menjabarkan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha; menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);
- c. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
- d. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik negara;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kerasipan;
- h. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta pemusnahan arsip;
- i. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasandan keprotokolan serta kerjasama;
- j. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
- l. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
- m. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

### **b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk menjabarkan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas;
- b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis;
- c. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;
- d. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;
- e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;
- g. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
- j. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
- k. melaksanakan pengelolaan data keuangan;
- l. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

### **c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.**

Sub Bagian Informasidan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, analisa, penyajian data dan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Dinas. Untuk menjabarkan tugas pokok, Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
- b. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- e. melaksanakan penyelenggaraan publikasi;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyebaran informasi;
- g. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
- h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN);
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- j. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas;

- l. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

## **2. BIDANG BINA MARGA**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan bina marga.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;
- b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan jalan;
- c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan jembatan;
- d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi, Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina marga;
- c. menyelenggarakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. penyusunan rencana teknis dan program pengembangan prasarana jalan;
- e. penyusunan rencana teknis dan pengembangan prasarana jembatan;
- f. pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. peningkatan pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;

- i. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan penyediaan dan pengujian bahan serta peralatan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Margaterdiri dari:

**a. Seksi Jalan**

Seksi Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan jalan.

Untuk menjabarkan tugas pokok, Seksi Jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang jalan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidangjalan;
- c. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan;
- d. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- e. menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan kabupaten, perkotaan, pedesaan dan lingkungan;
- f. melaksanakan pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan jalan pedesaan dan lingkungan;
- g. menyelenggarakanpreservasi jalan;

- h. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan;
- i. melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan;
- j. menyiapkan bahan penetapan laik fungsi jalan;
- k. melaksanakan pengujian mutu konstruksi;
- l. melaksanakan penetapan leger jalan, audit keselamatan jalan serta leger jalan;
- m. menyiapkan bahan penetapan audit keselamatan jalan;
- n. melaksanakan pemanfaatan peralatan, bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- o. menyiapkan bahan koordinasi pengadministrasian perizinan pemanfaatan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi serta pendokumentasian kegiatan;
- i. melaksanakan penyiapan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**b. Seksi Jembatan**

Seksi Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang jembatan. Untuk menjabarkan tugas pokok, Seksi Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang jembatan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang jembatan;

- c. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jembatan;
- d. menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jembatan;
- e. melaksanakan pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan jembatan pedesaan dan lingkungan;
- f. menyelenggarakan preservasi jembatan;
- g. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jembatan;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jembatan;
- i. menyiapkan bahan penetapan laik fungsi jembatan;
- j. melaksanakan pengujian mutu konstruksi;
- k. melaksanakan audit keselamatan jembatan;
- l. menyiapkan bahan penetapan audit keselamatan jalan;
- m. melaksanakan pemanfaatan peralatan, bahan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jembatan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- n. menyiapkan bahan koordinasi pengadministrasian perizinan pemanfaatan;
- o. melaksanakan penyiapan koordinasi dengan instansi terkait;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

### **3. BIDANG CIPTA KARYA**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang cipta karya.

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang PLP dan air minum;
- c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan bangunan dan pengembangan pemukiman;
- d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis bidang cipta karya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM daerah;
- d. Memfasilitasi pengembangan sistem persampahan berbasis masyarakat;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan permukiman;
- g. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah;
- h. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian sertifikat laik fungsi bangunan;
- i. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

**a. Seksi PLP dan Air Minum; dan**

Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang PLP dan air minum. Untuk menjabarkan tugas pokok Seksi PLP dan Air Minum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakandi bidang PLP dan Air Minum;
- b. pengelolaan dan pengembangan Spam di Daerah;
- c. Memfasilitasi pengembangan sistem persampahan dalam daerah;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan permukiman;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan rencana teknis penataan dan pengawasan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan drainase lingkungan permukiman, perkotaan dan perkantoran;
- g. melaksanakan pengawasan teknis pengelolaan pemeliharaan dan pengembangan drainase jalan lingkungan permukiman, perkotaan dan perkantoran;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan air minum dan lingkungan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air minum;
- j. melaksanakan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penyehatan lingkungan pemukiman dan air minum;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air minum;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait lainnya;

- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

**b. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman;**

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan bangunan dan pengembangan pemukiman.

Untuk menjabarkan tugas pokok Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang penataan bangunan dan pengembangan pemukiman;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah beserta pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung setelah dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang terdiri dari Akademisi, tenaga profesional, instansi teknik terkait dan tokoh masyarakat;
- c. menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang penataan bangunan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi serta monitoring pelaksanaan kegiatan di bidang penataan bangunan;
- g. menyiapkan bahan dan rekomendasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan di bidang penataan bangunan;
- h. menyiapkan rencana teknis dan melaksanakan penataan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan jalan di lingkungan permukiman, perkotaan dan perkantoran;

- i. memberikan rekomendasi tentang layak tidaknya izin mendirikan bangunan diterbitkan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Menyiapkan tenaga pengelola teknis kegiatan, apabila diminta oleh instansi terkait;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

#### **4. BIDANG SDA**

Bidang SDA mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang SDA.

Bidang SDA dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang SDA;
- b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang sungai dan pantai;
- c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang irigasi dan rawa;
- d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Bidang SDA mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang SDA;
- b. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
- d. penyusunan perencanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;

- e. penyiapan, pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan prasarana;
- f. penyiapan bahan pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana;
- g. penyiapan bahan pembinaan, pengaturan teknis, pelaksanaan operasi dan pemulihan;
- h. penataan pengelolaan prasarana dan pemeliharaan operasi prasarana sumber daya air;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang SDA terdiri dari:

**a. Seksi Sungai dan Pantai; dan**

Seksi Sungai dan Pantai mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang sungai dan pantai.

Untuk menjabarkan tugas pokok Seksi Sungai dan Pantai mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dibidang sungai dan pantai;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang sungai dan pantai;
- c. menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi, perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan sungai dan pantai;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana sungai dan pantai;

- e. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- g. melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini di bidang sungai dan pantai;
- h. melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana dan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana sungai dan pantai;
- k. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

**b. Seksi Irigasi dan Rawa.**

Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang irigasi dan rawa.

Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi, perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana irigasi dan rawa;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana irigasi dan rawa;

- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis evaluasi, pemeliharaan dan pengelolaan operasi serta pemulihan prasarana irigasi dan rawa;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini di bidang irigasi dan rawa;
- f. melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana dan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan di bidang irigasi dan rawa;
- d. melaksanakan evaluasi, pemeliharaan dan pengelolaan operasi serta pemulihan prasarana irigasi dan rawa;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penelitian/survey, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

## **5. BIDANG TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI**

Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata ruang dan jasa konstruksi.

Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata ruang;

- c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang jasa konstruksi;
- d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan rumusan petunjuk teknis di bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi;
- b. menyiapkan bahan perencanaan tata ruang;
- c. menyiapkan bahan pemanfaatan ruang dan pembinaan penataan ruang;
- d. menyiapkan bahan pembinaan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi terdiri dari:

**a. Seksi Tata Ruang;**

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan ruang.

Seksi Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang penatan ruang;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang tata ruang;
- c. menghimpun dan mengolah data kebijakan tata ruang;
- d. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pengembangan kegiatan tata ruang;

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pengembangan kegiatan tata ruang;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan tata ruang Kabupaten Tanah Bumbu dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang Kabupaten;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemamfaatan, pemantauan dan pengendalian pemamfaatan tata ruang wilayah maupun sektoral;
- h. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan potensi tata ruang dan mengembangkan kemitraan dalam pemamfaatan tata ruang kabupaten;
- i. melaksanakan perencanaan, inventarisasi dan pembangunan ruang terbuka hijau;
- j. menyiapkan bahan kejasama dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

**b. Seksi Jasa Konstruksi.**

Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang jasa konstruksi.

Untuk menjabarkan tugas pokok, Seksi Jasa Konstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan jasa konstruksi;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan jasa konstruksi (Rekomendasi SIUJK)
- c. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten.
- b. menghimpun dan mengolah data kebijakan pembinaan pengembangan teknis konstruksi dan usaha konstruksi;

- c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pengembangan teknis konstruksi dan usaha jasa konstruksi;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi, kinerja badan usaha jasa konstruksi dan uji mutu;
- e. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi konstruksi;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

## **6. UNIT PELAKSANA TEKNIS**

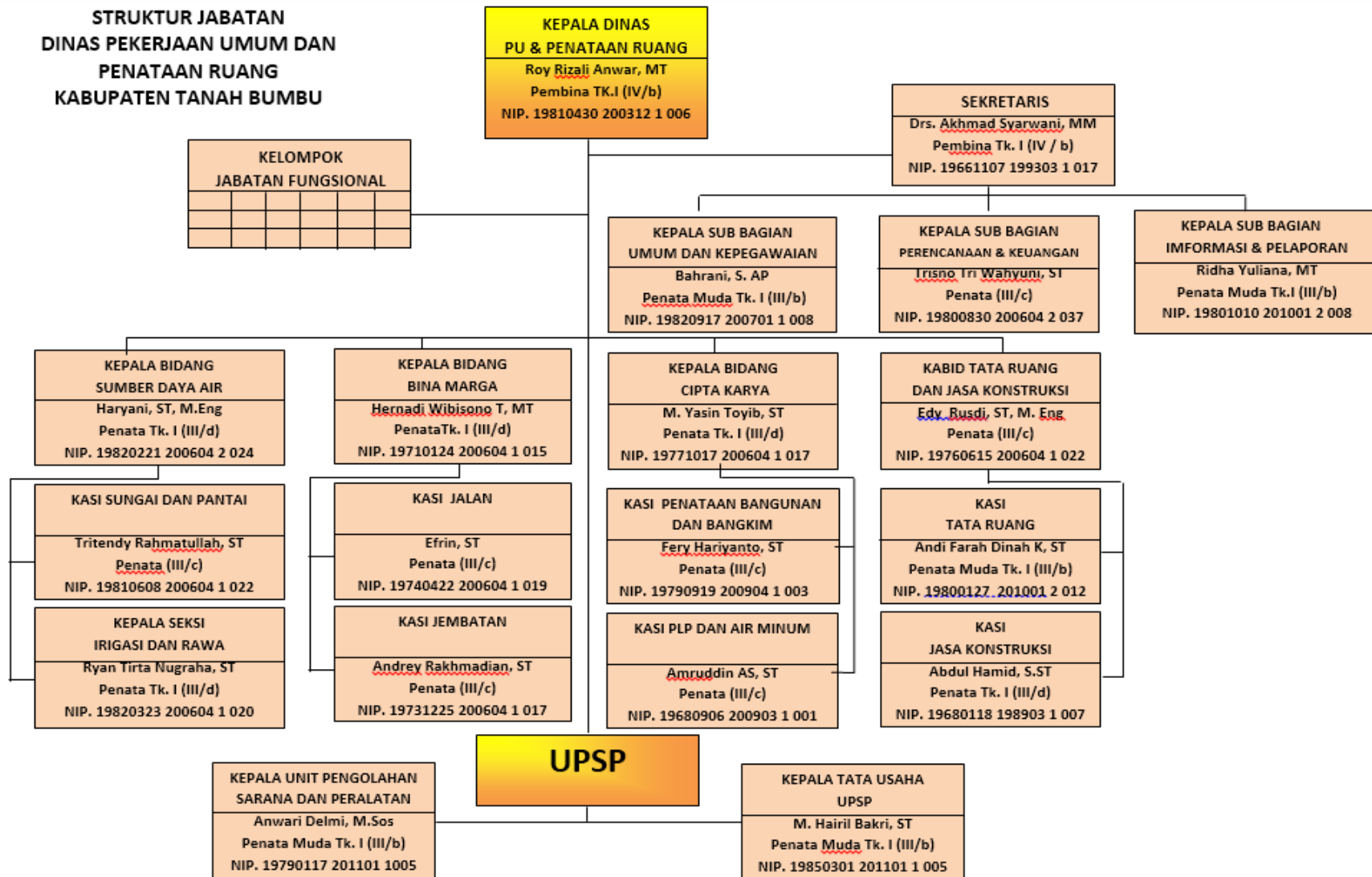
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu



## 2.2. Sumber Daya

### A. Sumber Daya Manusia

Terdapat 57(lima puluh tujuh) Pegawai DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari :

1. 43 orang PNS
2. 14 orang PTT

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43(empat puluh tiga) orang tersebut terbagi dalam golongan dan pendidikan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2a.  
Jumlah PNS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKabupaten  
Tanah Bumbu berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.1	D.III	D.IV	S1	S2	Jumlah
1	IV	-	-	-	-	-	-	-	2	2
2	III	-	-	-	-	-	1	18	6	25
3	II	-	-	16	-	-	-	-	-	16
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	PTT	-	-	4	1	-	-	9	-	14
Jumlah		0	0	20	1	0	1	27	8	57

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Tabel 2b.  
Jumlah PNS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKabupaten  
Tanah Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	3
4	Eselon IV.a	11
5	Eselon IV.b	1

6	Fungsional	0
7	Staf	40
	<b>Jumlah</b>	<b>57</b>

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Tabel 2c.

Data Jumlah Pegawai DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG Kabupaten Tanah Bumbu

No	Bidang/Bagian	Pegawai		Teknik		Non Teknik		Pendidikan		
		PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT	S1/S2	D1/D2/D3	SD/SM P
1	Bidang Bina Marga	10	4	5	3	5	1	10	1	3
2	Bidang Pengairan	5	4	5	3	0	1	7	1	1
3	Bidang Cipta Karya	12	2	7	0	5	2	6	1	7
4	Bidang tata ruang dan jasa konstruksi & Jaskon	3	1	3	0	0	1	4	0	0
5	Bidang Sekretariat	13	3	6	1	7	2	9	1	6
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>17</b>

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Dalam hal peningkatan kemampuan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya setiap tahun bagi pegawai selalu diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang bekerja sama dengan Balai Diklat Pekerjaan Umum Banjarmasin. Selain itu

juga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan saat ini memiliki 14 (empat belas) tenaga pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan tugas-tugas pengadaan baik di *internal* Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sendiri maupun untuk membantu tugas-tugas kepanitiaan pengadaan barang/jasa di Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun Instansi vertikal di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu.

Apabila dilihat dari komposisi pegawai dalam hal kualitas SDM sudah dapat dikatakan memenuhi persyaratan sebuah lembaga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten, namun apabila dilihat dari segi kuantitas bila dibandingkan banyaknya kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya masih terdapat kekurangan, baik tenaga administrasi dan Keuangan pada Sekretariat Dinas maupun tenaga administrasi serta tenaga teknis pada bidang-bidang yang ada (Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang & Jasa Konstruksi).

## B. Aset

Data Aset Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari mebelair, peralatan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan alat berat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2d.  
Data Aset DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
<b>I</b>	<b>MEUBELAIR KANTOR</b>					
1	Lemari Besi/Metal	24	buah	24		
2	Filling Besi/Metal	27	buah	27		
3	Meja Rapat	6	buah	6		
4	Kursi Tamu	2	buah	2		
5	Kursi Putar	25	buah	25		

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
6	Kursi Lipat	55	buah	55		
7	Meja Komputer	1	buah	1		
8	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	1		
9	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	buah	5		
10	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	buah	20		
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	buah	8		
12	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	buah	2		
<b>II</b>	<b>PERALATAN KANTOR</b>					
1	Mesin Ketik Elektronik	4	buah	4		
2	Alat Penghancur Kertas	7	buah	7		
3	Unit Power Supply	15	buah	8		7
4	Stabilisator	15	buah	15		
5	P.C. Unit	13	buah	13		
6	Lap Top	19	buah	19		
7	Note Book	1	buah			1
8	Printer	22	buah	14		8
<b>III</b>	<b>KENDARAAN DINAS OPERASIONAL</b>					
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1	buah	1		
2	Pick Up (Double Cabin)	1	buah	1		
3	Sepeda Motor	27	buah	27		
4	Pick Up	1	buah	1		
<b>IV</b>	<b>KONDISI PERLENGKAPAN KANTOR</b>					
1	Portable Generating Set	1	buah	1		
2	Mesin Photo Copi dengan kertas biasa Folio	1	buah	1		
3	Band Kas	1	buah	1		
4	Mesin Absensi	2	buah	2		
5	Teralis	148	buah	148		
6	AC Unit	12	buah	12		

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
7	Kipas Angin	10	buah	10		
8	Televisi	7	buah	7		
9	Sound System	2	set	2		
10	Camera Video	1	buah	1		
11	Dispencer	2	buah	2		
12	Gorden + Kelengkapannya	25	buah	25		
13	Penampung Air	2	buah	2		
14	Proyektor +Attachment	1	buah	0	1	
15	Facsimile	1	buah	1		
<b>V</b>	<b>KONDISI ALAT-ALAT BERAT</b>					
1	Grader+Attachment	1	unit	1		
2	Buldozer	2	buah	2		
3	Wheel Excavator	2	buah	2		
4	Vibration Roller	1	buah	1		
5	Loader Lainnya	1	buah	1		
6	Truck + Attachhment	1	buah	1		
7	Trailer	1	set	1		
<b>VI</b>	<b>ALAT-ALAT UKUR, BENGKEL DAN LABORATORIUM</b>					
1	Global Postioning System	7	buah	7		
2	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan Lainnya	1	buah	1		
3	Echo Sounder	1	buah	1		
4	Theodolit	1	buah	1		
5	Alat Labotariium Bahan Bangunan Konstruksi Lainnya	26	buah	26		
6	Asphal Equipment Lainnya	1	buah	1		

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
7	Aggragate & Concrete Equipment Lainnya	1	buah	1		
8	Tool Kit Set	1	buah	1		
9	Alat Pembersih Lainnya	1	set	1		
10	Drill Machine	1	buah	1		
11	Concrete Mixer/Pengaduk Beton	1	buah	1		
12	Abration Machine	1	buah	1		
13	Alat Pemeriksaan Beton	1	buah	1		
14	Slump Test Set	1	buah	1		
15	Concrete Hammer Test	1	buah	1		
16	CBR Lab. Set On. 702	1	buah	1		
17	Heavy Duty Solution Balance	1	buah	1		
18	Flow Meter	1	buah	1		
19	Theodolit	1	buah	1		
20	Alat Ukur Universal Lainnya	2	buah	2		
21	Stamper	1	buah	1		

*Sumber : Data Aset DPU Tahun 2015*

Tabel 2.e.

Dokumen Perencanaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Tahun Pembuatan
<b>I</b>	<b>JENIS DOKUMEN</b>			
1	Enseklopedi Islam	1	Dok	31 Desember 2007
2	Enseklopedi Islam	1	Dok	31 Desember 2007
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Sambungan Rumah (SR) untuk MBR	1	Dok	02 Oktober 2013
4	Perencanaan Studi 4 Simpang Bersinyal	1	Dok	28 Oktober 2010

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Tahun Pembuatan
5	Perencanaan Bundaran Simpang 3 Jl.Lingkar Batulicin	1	Dok	28 Oktober 2010
6	Perencanaan Jaringan Induk Pengembangan Air Bersih (Master Plan)	1	Dok	08 Oktober 2010
7	Perencanaan Jaringan Induk Pengembangan Air Bersih	1	Dok	13 Juni 2013
8	Perencanaan normalisasi Saluran Pembuangan (Fisik Batal)	1	Dok	31 Desember 2010
9	Perencanaan Pembangunan Drainase (Fisik Batal)	1	Dok	31 Desember 2010
10	Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi (Fisik Batal)	1	Dok	31 Desember 2010
11	Perencanaan Penanganan Banjir Kec. Kusan Hilir dan Kusan Hulu (Fisik Batal)	1	Dok	31 Desember 2011
12	Perencanaan Penanganan Banjir Kec. Batulicin dan Karang Bintang (Fisik Batal)	1	Dok	31 Desember 2011
13	Perencanaan Penanganan Banjir Kec. Satui (Fisik Batal)	1	Dok	31 Desember 2011
14	Perencanaan Pembangunan Jalan Batulicin - Kab. Banjar (Teluk Kepayang - Sei. Tamunih) (Fisik Batal)	1		31 Desember 2005
15	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Satui Kab. Tanah Bumbu (Fisik Batal, Lokasi berubah)	1		31 Desember 2006
16	Perencanaan Jalan Alternatif Samping Bandara Kota Batulicin (Fisik Batal)	1		31 Desember 2007
17	Perencanaan Normalisasi Sungai (Fisik Batal)	1		31 Desember 2008
18	Perencanaan Inventarisasi Jaringan Irigasi Kab. Tanah Bumbu	1		31 Desember 2005
19	Perencanaan Inventarisasi Jaringan Jalan di Kec. Satui, Sei. Loban dan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu	1		31 Desember 2005

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Tahun Pembuatan
20	Perencanaan Inventarisasi Jaringan Jalan Kec. Kusan Hilir dan Batulicin Kab. Tanah Bumbu	1		31 Desember 2005
21	Perencanaan DataBase Jalan se Kab. Tanah Bumbu	1		31 Desember 2008
22	RPIJM	1		31 Desember 2008
23	Perencanaan Water Threatment Plan (WTP) / PDAM Kab. Tanah Bumbu (Fisik APBN dan di kerjakan oleh PD	1		31 Desember 2008
24	Perencanaan Studi Penggunaan Aspal Buton untuk Material Perkerasan Jalan	1		31 Desember 2010
25	Pengujian Pendopo Mahligai Iman	1		31 Desember 2011
26	Master Plan Pengembangan Sungai,Danau,Waduk dan Air Baku	1		31 Desember 2011
27	Master Plan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa, Pantai.	1		31 Desember 2011
28	Perencanaan Updating Database Jalan Kab. Tanah Bumbu	1		31 Desember 2011
29	Penyusunan Identifikasi dan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Kec. Satui	1		31 Desember 2011
30	Penyusunan Identifikasi dan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kec.Kusan Hilir	1		31 Desember 2011
31	Penyusunan Identifikasi dan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Kec. Simpang Empat	1		31 Desember 2011
32	Perencanaan Master Plan Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Pantai Kab. Tanah Bumbu Tahap II	1		31 Desember 2012
33	Perencanaan Master Plan Penerangan Sungai, Danau, Waduk dan Air Baku Kab. Tanah Bumbu	1		31 Desember 2012

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Tahun Pembuatan
	Tahap II			
34	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Ruas Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat	1		31 Desember 2012
35	Rencana Tindak Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Batulicin	1		31 Desember 2012
36	Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Drainase Dalam Kota Kecamatan Satui	1		31 Desember 2012
37	Review RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Tanah Bumbu	1		31 Desember 2012
38	Perencanaan Detail Desain (DED) IKK Mantewe 10 lt/dt	1		31 Desember 2012
39	SID Perencanaan Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan dan Jembatan Serta Infrastruktur Bidang ke PU	1		31 Desember 2013
40	Study Kelayakan Kelanjutan Pembangunan Pasar Pagatan	1		31 Desember 2013
41	Penyusunan Master Plan dan DED Perumahan PNS Kabupaten Tanah Bumbu	1		31 Desember 2013
42	Perencanaan Masterplan Penanganan Sungai, waduk, Air Baku Kabupaten Tanah Bumbu Tahap III	1		31 Desember 2013
43	SID Penanganan Banjir Kabupaten Tanah Bumbu	1		31 Desember 2013
44	SID Penanganan Pantai Muara Sebamban Lama Kec. Sei. Loban	1		31 Desember 2013
45	SID Penanganan Pantai Sumber Sari Kec. Sei. Loban Tanggal 22 April 2013	1		31 Desember 2013
46	SID Penanganan Pantai Sei. Dua Laut Kec. Sei. Loban	1		31 Desember 2013

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Tahun Pembuatan
47	SID Penanganan Pantai Angsana Kec. Angsana,	1		31 Desember 2013
48	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Dan Peraturan Zonasi Kecamatan Sei Loban	1		31 Desember 2013
49	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis dan Peraturan Zonasi Kabupaten Tanah Bumbu	1		31 Desember 2013
50	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	1		31 Desember 2013
51	Perencanaan Masterplan Pengembangan Jaringan irigasi, rawa dan pantai Kabupaten Tanah Bumbu Tahap I	1		31 Desember 2013
52	Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tanah Bumbu	1		31 Desember 2013
53	Penyusunan RTBL Ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Kusan Hilir	1		31 Desember 2013
54	Masterplan Minapolitan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu	1		31 Desember 2013
55	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kecamatan Mantewe	1		31 Desember 2013
56	Penyusunan RTBL Ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Satui	1		31 Desember 2013
57	Penyusunan Zoning Regulation Kec. Karang Bintang	1		31 Desember 2013
58	Penyusunan Zoning Regulation Kecamatan Satui	1		31 Desember 2013
59	Penyusunan Zoning Regulation Kec. Angsana	1		31 Desember 2013
60	Penyusunan RTBL Ruas Jalan A. yani Batulicin Simpang Empat (Review)	1		31 Desember 2013
61	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan Peraturan Zonasi	1		31 Desember 2013

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Tahun Pembuatan
	Kecamatan Kuranji			
62	Penyusunan DED Kantor Koramil Kusan Hilir	1		31 Desember 2013
63	Penyusunan DED SPAM IKK Gunung Tinggi, sesuai Kontrak	1		31 Desember 2013
64	Review Masterplan Drainase Kabupaten Tanah Bumbu	1		31 Desember 2015
65	Review Masterplan Perumahan PNS	1		16 Nopember 2015
66	SID Green Belt Pesisir Pantai Rindu Alam Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu	1		27 Oktober 2015
67	Masterplan Pembangunan Infrastruktur Bidang ke PU an Kabupaten Tanah Bumbu	1		9 Desember 2015
68	Penataan Kawasan Kumuh Kabupaten Tanah Bumbu	1		14 Desember 2015
69	Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kab. Tanah Bumbu	1		14 Desember 2015
70	Penyusunan Dokumen Lingkungan SPAM IKK sungai Loban	1		09 Nopember 2015
71	DED Kolam Penampungan Air Baku IKK Kusan Hilir	1		10 Nopember 2015

*Sumber : Data Aset DPU Tahun 2015*

Tabel 2f.  
Data Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG Kabupaten Tanah Bumbu

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Pengamanan Irigasi Lainnya	12/31/2012	Beton				Simpang Empat	B
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	6/2/2014					Batulicin	B
3	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	1.900	5.5		Kusan Hilir	B
4	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/23/2006	Aspal	0.596	4		Kusan Hilir	B
5	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal/Perkerasan	1.002	4		Kusan Hilir	B
6	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/23/2006	Aspal	0.374	4		Kusan Hilir	B
7	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.265	3		Kusan Hilir	B
8	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.141	4		Kusan Hilir	B
9	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.104	4		Kusan Hilir	B
10	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.287	4		Kusan Hilir	B
11	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.388	3		Kusan Hilir	B
12	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.070	4		Kusan Hilir	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
13	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.380	4		Kusan Hilir	B
14	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.300	4		Kusan Hilir	B
15	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.337	4		Kusan Hilir	B
16	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.690	4		Kusan Hilir	B
17	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.121	4		Kusan Hilir	B
18	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.134	4		Kusan Hilir	B
19	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.210	4		Kusan Hilir	B
20	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.128	12		Kusan Hilir	B
21	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.893	3		Kusan Hilir	B
22	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.270	3		Kusan Hilir	B
23	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.332	3		Kusan Hilir	B
24	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.376	3		Kusan Hilir	B
25	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.494	3		Kusan Hilir	B
26	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.277	3		Kusan Hilir	B
27	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.147	3		Kusan Hilir	B
28	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.129	3		Kusan Hilir	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
29	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	1.650	4		Kusan Hilir	B
30	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.409	3		Kusan Hilir	B
31	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.850	3		Kusan Hilir	B
32	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.178	3		Kusan Hilir	B
33	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.289	3		Kusan Hilir	B
34	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.236	3		Kusan Hilir	B
35	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.262	3		Kusan Hilir	B
36	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.101	3		Kusan Hilir	B
37	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.857	3		Kusan Hilir	B
38	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	5/22/2006	Aspal	0.720	4		Kusan Hilir	B
39	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	1.050	4		Kusan Hilir	B
40	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.170	4		Kusan Hilir	B
41	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.100	4		Kusan Hilir	B
42	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/23/2006	Aspal	0.200	4		Kusan Hilir	B
43	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	0.850	1.95		Kusan Hilir	B
44	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	9/30/2009	Aspal	7.552	25		Batulicin	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
45	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.794	5		Kusan Hilir	B
46	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.226	3.5		Kusan Hilir	B
47	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.183	5		Kusan Hilir	B
48	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/23/2006	Aspal	2.660	5.5		Kusan Hilir	B
49	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/23/2006	Aspal	9.704	5.5		Kusan Hilir	B
50	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	4.202	4		Kusan Hilir	B
51	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	11/6/2013	Aspal	4.895	4		Kusan Hilir	B
52	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	2.434	4		Kusan Hilir	B
53	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	0.200	4		Kusan Hilir	B
54	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/27/2006	Aspal	0.798	4		Kusan Hilir	B
55	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/27/2006	Aspal	0.480	5		Kusan Hilir	B
56	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/27/2006	Aspal	0.514	3.5		Kusan Hilir	B
57	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.766	12		Kusan Hilir	B
58	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/13/2007	Aspal	1.250	3		Kusan Hilir	B
59	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.128	4		Kusan Hilir	B
60	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/27/2006	Aspal	0.289	4		Kusan Hilir	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
61	DPU Kusan Hilir	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	1.857	4		Kusan Hilir	B
62	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011		0.325	3	975	Kusan Hilir	B
63	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011		0.130	3	389.64	Kusan Hilir	B
64	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011		0.102	3	306.75	Kusan Hilir	B
65	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011		0.158	3	472.56	Kusan Hilir	B
66	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011		0.231	3	691.98	Kusan Hilir	B
67	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011		0.182	3	547.17	Kusan Hilir	B
68	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kusan Hilir	B
69	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kusan Hilir	B
70	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kusan Hilir	B
71	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kusan Hilir	B
72	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kusan Hilir	B
73	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.100	3		Kusan Hilir	B
74	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.100	3		Kusan Hilir	B
75	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kusan Hilir	B
76	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.100	3		Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
77	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Agregat	0.700	6		Kusan Hilir	B
78	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012		0.100	3	300	Kusan Hilir	B
79	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012		0.150	3	450	Kusan Hilir	B
80	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.185	3	555.45	Kusan Hilir	B
81	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.176	3	526.68	Kusan Hilir	B
82	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.451	3	1352.28	Kusan Hilir	B
83	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.322	3	966	Kusan Hilir	B
84	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.406	3	1217.58	Kusan Hilir	B
85	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.388	3	1162.74	Kusan Hilir	B
86	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012		0.200	2	400	Kusan Hilir	B
87	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.378	3	1134.84	Kusan Hilir	B
88	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.240	3	720.6	Kusan Hilir	B
89	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.199	3	595.59	Kusan Hilir	B
90	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.258	2.5	645.9	Kusan Hilir	B
91	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.676	3	2027.46	Kusan Hilir	B
92	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.656	3	1969.44	Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
93	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.689	3	2067	Kusan Hilir	B
94	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012		0.289	2	578	Kusan Hilir	B
95	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.434	3	1301.61	Kusan Hilir	B
96	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012		0.235	2	470	Kusan Hilir	B
97	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.635	3	1905	Kusan Hilir	B
98	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	beton	0.144	3	433.05	Kusan Hilir	B
99	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.240	3	720.06	Kusan Hilir	B
100	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.239	3	716.37	Kusan Hilir	B
101	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	beton	0.247	2.5	617.3	Kusan Hilir	B
102	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.229	3.5	802.9	Kusan Hilir	B
103	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.358	3	1073.52	Kusan Hilir	B
104	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.252	2.5	630.625	Kusan Hilir	B
105	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.517	3	1550.31	Kusan Hilir	B
106	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.257	3	770.31	Kusan Hilir	B
107	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.387	3	1161	Kusan Hilir	B
108	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.525	3	1576.05	Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
109	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.764	3	2290.77	Kusan Hilir	B
110	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012	beton	0.210	2.5	525.175	Kusan Hilir	B
111	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012		0.150	3	450	Kusan Hilir	B
112	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2012		0.150	3	450	Kusan Hilir	B
113	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013		0.875	3	2625	Kusan Hilir	B
114	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013		1.000	3	3000	Kusan Hilir	B
115	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.240	3	721.26	Kusan Hilir	B
116	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013		1.000	4	4000	Kusan Hilir	B
117	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013		0.600	4	2400	Kusan Hilir	B
118	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Pas. Batu	0.360	3	1080	Kusan Hilir	B
119	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course	0.600	3.5	2100	Kusan Hilir	B
120	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course	1.000	4	4000	Kusan Hilir	B
121	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.517	3	1550.31	Kusan Hilir	B
122	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course	0.725	3.5	2537.5	Kusan Hilir	B
123	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.537	3	1611	Kusan Hilir	B
124	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course	0.750	5	3750	Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
125	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.285	3	856.05	Kusan Hilir	B
126	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton, pasangan batu	0.260	1.88	488.8	Kusan Hilir	B
127	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course	0.750	5	3750	Kusan Hilir	B
128	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.493	3.5	1725.815	Kusan Hilir	B
129	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.549	3	1646.49	Kusan Hilir	B
130	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.570	3	1711.05	Kusan Hilir	B
131	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.574	3	1723.05	Kusan Hilir	B
132	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.219	4	877.4	Kusan Hilir	B
133	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.689	2.5	1722.95	Kusan Hilir	B
134	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.173	2.5	433.05	Kusan Hilir	B
135	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton, pasangan batu	0.051	2.6	132.6	Kusan Hilir	B
136	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.275	4.74	1303.5	Kusan Hilir	B
137	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.288	4	1152	Kusan Hilir	B
138	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.478	3.21	1534.38	Kusan Hilir	B
139	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton, pasangan batu	0.260	2.7	702	Kusan Hilir	B
140	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course	0.639	3.04	1942.56	Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
141	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.456	2.68	1223.152	Kusan Hilir	B
142	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course	1.132	3.55	4018.6	Kusan Hilir	B
143	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	Timbunan tanah	0.522	5.23	2731.106	Kusan Hilir	B
144	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.366	1.62	592.92	Kusan Hilir	B
145	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton, pasangan batu	0.188	2.44	458.72	Kusan Hilir	B
146	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.458	2.65	1213.7	Kusan Hilir	B
147	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.326	4.03	1313.78	Kusan Hilir	B
148	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.187	4	748	Kusan Hilir	B
149	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course	1.483	1.2	1779.6	Kusan Hilir	B
150	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course	1.303	2.5	3257.5	Kusan Hilir	B
151	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.208	2.38	495.04	Kusan Hilir	B
152	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course	0.920	2.67	2455.332	Kusan Hilir	B
153	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.403	2.21	889.525	Kusan Hilir	B
154	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.359	1.56	560.04	Kusan Hilir	B
155	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton, pasangan batu	0.600	1.31	786	Kusan Hilir	B
156	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.250	1.5	375	Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
157	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton, base Course	0.044	2.5	110.75	Kusan Hilir	B
158	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton, pasangan batu	0.141	2	281.2	Kusan Hilir	B
159	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.285	2.5	713.25	Kusan Hilir	B
160	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.552	2.29	1263.393	Kusan Hilir	B
161	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.532	2	1064	Kusan Hilir	B
162	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.729	1.66	1209.808	Kusan Hilir	B
163	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.543	3	1629	Kusan Hilir	B
164	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton, pasangan batu	0.223	3.16	704.68	Kusan Hilir	B
165	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.427	1.85	789.21	Kusan Hilir	B
166	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.196	0.8	156.64	Kusan Hilir	B
167	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.167	3.11	519.37	Kusan Hilir	B
168	DPU Kusan Hilir	Jalan Desa	12/31/2013	base course, pasanga	0.145	4	580	Kusan Hilir	B
169	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.888	3		Kusan Hilir	B
170	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.300	2.4		Kusan Hilir	B
171	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.121	4		Kusan Hilir	B
172	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.200	4		Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
173	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.150	3		Kusan Hilir	B
174	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.460	3		Kusan Hilir	B
175	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	7/21/2014		0.195	3		Kusan Hilir	B
176	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.195	4		Kusan Hilir	B
177	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.301	3		Kusan Hilir	B
178	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.923	4		Kusan Hilir	B
179	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.108	2.5		Kusan Hilir	B
180	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	41.700	15		Satui	B
181	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	8.400	12		Satui	B
182	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	70.200	10		Satui	B
183	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	2.000	4		Satui	B
184	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	2.109	4		Satui	B
185	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/21/2011	Aspal	1.051	3		Satui	B
186	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	2/23/2007	Aspal	0.495	4		Satui	B
187	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/21/2011	Aspal	1.254	5		Satui	B
188	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/27/2012	Aspal	0.919	4		Satui	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
189	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	2/23/2007	Aspal	0.382	4		Satui	B
190	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	3.092	4		Satui	B
191	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	2.214	4		Satui	B
192	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.300	3.5		Satui	B
193	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.300	3.5		Satui	B
194	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	1.500	4		Satui	B
195	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	3.841	6		Satui	B
196	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	2/23/2007	Aspal	0.788	4		Satui	B
197	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	0.424	4		Satui	B
198	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.600	4		Satui	B
199	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	2/23/2007	Aspal	0.209	4		Satui	B
200	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	2/23/2007	Aspal	0.215	4		Satui	B
201	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	2/23/2007	Aspal	0.809	4		Satui	B
202	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2011		0.255	3	766.44	Satui	B
203	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2011		0.432	3	1297.14	Satui	B
204	DPU Simpang	Jalan Kab. Lokal	7/18/2006	Aspal	0.770	4		Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
205	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	7/18/2006	Aspal	0.239	4		Simpang Empat	B
206	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	7/18/2006	Aspal	0.227	3.5		Simpang Empat	B
207	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.255	3.5		Simpang Empat	B
208	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.934	3.5		Simpang Empat	B
209	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	7/18/2006	Aspal	0.859	4		Simpang Empat	B
210	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	0.214	3.5		Simpang Empat	B
211	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/18/2012	Aspal	0.487	3.5		Simpang Empat	B
212	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/28/2011	Aspal	0.111	3		Simpang Empat	B
213	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	1.217	3		Simpang Empat	B
214	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.735	3.5		Simpang Empat	B
215	DPU	Jalan Kab.	12/31/2012	Aspal		4		Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat	Lokal	012		0.118			Empat	
216	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.208	3.5		Simpang Empat	B
217	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.321	3.5		Simpang Empat	B
218	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.271	3.5		Simpang Empat	B
219	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.291	3.5		Simpang Empat	B
220	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.103	3		Simpang Empat	B
221	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/2/2008	Aspal	1.300	4		Simpang Empat	B
222	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.110	2.8		Simpang Empat	B
223	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	18.600	30		Simpang Empat	B
224	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	29.226	10		Simpang Empat	B
225	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	0.316	3.5		Simpang Empat	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
226	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	6/13/2006	Aspal	0.664	4		Simpang Empat	B
227	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	7/18/2006	Aspal	0.260	3		Simpang Empat	B
228	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	6/13/2006	Aspal	0.313	3.5		Simpang Empat	B
229	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	11/2/2011	Aspal	0.533	3.5		Simpang Empat	B
230	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/10/2013	Aspal	0.326	3		Simpang Empat	B
231	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	11/2/2011	Aspal	0.735	3.5		Simpang Empat	B
232	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/10/2013	Aspal	0.258	3		Simpang Empat	B
233	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/10/2013	Aspal	0.410	3.5		Simpang Empat	B
234	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	11/6/2013	Aspal	0.282	4		Simpang Empat	B
235	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.468	5		Simpang Empat	B
236	DPU Simpang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.125	3.5		Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
237	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.119	3		Simpang Empat	B
238	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.126	5.6		Simpang Empat	B
239	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.150	3.5		Simpang Empat	B
240	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.451	4		Simpang Empat	B
241	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	9/4/2014	Beton	4.497	1.5		Simpang Empat	B
242	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	4/25/2014	Aspal	0.212	4		Simpang Empat	B
243	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	4/25/2014	Aspal	0.150	4		Simpang Empat	B
244	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.335	3		Simpang Empat	B
245	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.200	3		Simpang Empat	B
246	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.758	3	2274	Simpang Empat	B
247	DPU	Jalan Desa	12/31/2			3	2763	Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat		011		0.921			Empat	
248	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.081	3	241.68	Simpang Empat	B
249	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.151	3	452.34	Simpang Empat	B
250	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.188	3	563.76	Simpang Empat	B
251	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.297	3		Kusan Hilir	B
252	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.106	4		Kusan Hilir	B
253	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	10/14/2014		0.420	3.5		Kusan Hilir	B
254	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.210	3.4		Kusan Hilir	B
255	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.150	4		Kusan Hilir	B
256	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	9/17/2014		0.173	1.5		Kusan Hilir	B
257	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.235	3		Kusan Hilir	B
258	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.460	3		Kusan Hilir	B
259	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	10/1/2014		0.173	3.4		Kusan Hilir	B
260	DPU Kusan Hilir	Jalan Khusus Komplek	10/1/2014		0.390	2.5		Kusan Hilir	B
261	DPU Kusan	Jalan Khusus	8/15/20			6.5		Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hilir	Komplek	14		0.177				
262	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2012		0.300	1		Kusan Hilir	B
263	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2012		4.000	3		Kusan Hilir	B
264	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2012		0.140	2		Kusan Hilir	B
265	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2012		0.012	2.5		Kusan Hilir	B
266	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2012		0.012	4		Kusan Hilir	B
267	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2012		0.060	2		Kusan Hilir	B
268	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2012		0.080	3		Kusan Hilir	B
269	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
270	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
271	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
272	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
273	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
274	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
275	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
276	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
277	DPU Kusan	Jembatan	12/31/2					Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hilir	Beton	013						
278	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
279	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
280	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
281	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
282	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
283	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
284	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hilir	B
285	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	10/1/2014		0.005	6		Kusan Hilir	B
286	DPU Kusan Hilir	Jembatan Beton	10/1/2014		0.003	6.6		Kusan Hilir	B
287	DPU Kusan Hilir	Jembatan Kayu	12/31/2011					Kusan Hilir	B
288	DPU Kusan Hilir	Jembatan Kayu	12/31/2011					Kusan Hilir	B
289	DPU Kusan Hilir	Jembatan Kayu	12/31/2011					Kusan Hilir	B
290	DPU Kusan Hilir	Jembatan Kayu	8/28/2014		0.150	2		Kusan Hilir	B
291	DPU Kusan Hilir	Jembatan Kayu	9/16/2014		0.294	1.8		Kusan Hilir	B
292	DPU Kusan Hilir	Jembatan Kayu	9/16/2014		0.147	2		Kusan Hilir	B
293	DPU Kusan	Jembatan	6/2/201			2	353	Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hilir	Kayu	4		0.177				
294	DPU Kusan Hilir	Jembatan Kayu	8/7/2014		0.146	2	291.6	Kusan Hilir	B
295	DPU Kusan Hilir	Jembatan Kayu	8/7/2014		0.097	2	194.82	Kusan Hilir	B
296	DPU Kusan Hilir	Jembatan Kayu	12/31/2013					Kusan Hilir	B
297	DPU Kusan Hilir	Saluran Induk	12/31/2009	Galian Tanah (alat)	1.600	2	1.5	Kusan Hilir	B
298	DPU Kusan Hilir	Saluran Induk	12/31/2009	Galian Tanah (alat)	1.100	2	1.5	Kusan Hilir	B
299	DPU Kusan Hilir	Saluran Induk	12/31/2010	Galian Tanah	2.500	4	2	Kusan Hilir	B
300	DPU Kusan Hilir	Saluran Induk	12/31/2010	Ps. Batu	0.150	1.2	1	Kusan Hilir	B
301	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Kusan Hilir	B
302	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Kusan Hilir	B
303	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	6.000	1.5	0.5	Kusan Hilir	B
304	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	2.400	2	1	Kusan Hilir	B
305	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	1.024	2.3	1.5	Kusan Hilir	B
306	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	5.095	1.5	0.5	Kusan Hilir	B
307	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2008	Pintu Air,Galian Tan	2.100	2	1	Kusan Hilir	B
308	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2008	Galian Tanah (ALAT)	1.700	2	1	Kusan Hilir	B
309	DPU Kusan	Saluran	12/31/2	Galia		4	2	Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hilir	Sekunder	011	Tanah(alat)	2.276				
310	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2011	Galia Tanah(alat)	1.100	3	2	Kusan Hilir	B
311	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2011	Galia Tanah(alat)	1.300	3	2	Kusan Hilir	B
312	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2011	Galia Tanah(alat)	1.300	3	2	Kusan Hilir	B
313	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2011	Pasangan Bronjong	0.020	2	0.5	Kusan Hilir	B
314	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2011	Pasangan Bronjong	0.020	2	0.5	Kusan Hilir	B
315	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2011	Pasangan Bronjong	0.020	2	0.5	Kusan Hilir	B
316	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2012		2.290	1	0.9	Kusan Hilir	B
317	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2012		1.000	2.5	1.25	Kusan Hilir	B
318	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2012		1.500	4	2	Kusan Hilir	B
319	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2012		3.200	1.5	1	Kusan Hilir	B
320	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2013		0.440	0.27		Kusan Hilir	B
321	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2013		1.700	3.5		Kusan Hilir	B
322	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2013		1.807	2.5		Kusan Hilir	B
323	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	12/31/2013		3.000	3.2		Kusan Hilir	B
324	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	6/23/2014		0.541	0.25		Kusan Hilir	B
325	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	6/23/2014			0.25		Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hilir	Sekunder	14		0.360				
326	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	6/24/2014		0.486	0.25		Kusan Hilir	B
327	DPU Kusan Hilir	Saluran Sekunder	10/1/2014		2.532	6		Kusan Hilir	B
328	DPU Kusan Hilir	Saluran Tertier	12/31/2011	Galian Tanah(alat)	0.345	0.25	1.6	Kusan Hilir	B
329	DPU Kusan Hilir	Saluran Induk Pembuang	12/31/2012		0.600	0.25	0.4	Kusan Hilir	B
330	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	12/31/2010	Galian Tanah(alat)	2.500	2	2	Kusan Hilir	B
331	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	12/31/2012		0.014	4	3	Kusan Hilir	B
332	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	12/31/2012		0.266	0.24	0.7	Kusan Hilir	B
333	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	12/31/2012		0.930	5	2.5	Kusan Hilir	B
334	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	12/31/2013		0.124	5		Kusan Hilir	B
335	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	12/31/2013		0.082	4		Kusan Hilir	B
336	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	12/31/2013		3.000	2.7		Kusan Hilir	B
337	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	12/31/2013		2.000	4.1		Kusan Hilir	B
338	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	12/31/2013		0.118	3		Kusan Hilir	B
339	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	4/14/2014		5.300	4.5		Kusan Hilir	B
340	DPU Kusan Hilir	BangunanGot Miring	12/31/2011					Kusan Hilir	B
341	DPU Kusan	BangunanGot	12/31/2					Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hilir	Miring	011						
342	DPU Kusan Hilir	Bangunan Pengeluaran/ Pintu	12/31/2010	Pintu Air			4	Kusan Hilir	B
343	DPU Kusan Hilir	Bangunan Pengeluaran/ Pintu	12/31/2010	Pintu Air			6	Kusan Hilir	B
344	DPU Kusan Hilir	Pintu Air	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Kusan Hilir	B
345	DPU Kusan Hilir	Pintu Air	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Kusan Hilir	B
346	DPU Kusan Hilir	Pintu Air	12/31/2009	Pintu Air			3	Kusan Hilir	B
347	DPU Kusan Hilir	Pintu Air	12/31/2012		2.000	1		Kusan Hilir	B
348	DPU Kusan Hilir	Pintu Air	12/31/2012		2.000	1		Kusan Hilir	B
349	DPU Kusan Hilir	Pintu Air	12/31/2013					Kusan Hilir	B
350	DPU Kusan Hilir	Pintu Air	12/31/2013					Kusan Hilir	B
351	DPU Kusan Hilir	Pintu Air	12/31/2013					Kusan Hilir	B
352	DPU Kusan Hilir	Bangunan Pengaman Pasang Surut Lainnya	4/17/2014		0.156	4.5		Kusan Hilir	B
353	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2007	Pasangan batu	0.403	1	1	Kusan Hilir	B
354	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2007	Pasangan Batu	0.559	0.7	0.5	Kusan Hilir	B
355	DPU Kusan	Saluran	12/31/2	Pasangan		1.5	1	Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hilir	Drainase	010	Batu	0.290				
356	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2012		0.125		68.24	Kusan Hilir	B
357	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2012		0.227		84.34	Kusan Hilir	B
358	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2012		0.104		70785	Kusan Hilir	B
359	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2012		0.100			Kusan Hilir	B
360	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2012		0.318			Kusan Hilir	B
361	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2012		0.120			Kusan Hilir	B
362	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2012		0.163			Kusan Hilir	B
363	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2012		0.133			Kusan Hilir	B
364	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2012		0.190			Kusan Hilir	B
365	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2013					Kusan Hilir	B
366	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2013					Kusan Hilir	B
367	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2013					Kusan Hilir	B
368	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2013					Kusan Hilir	B
369	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2013					Kusan Hilir	B
370	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2013					Kusan Hilir	B
371	DPU Kusan	Saluran	12/31/2					Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hilir	Drainase	013						
372	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2013					Kusan Hilir	B
373	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2013					Kusan Hilir	B
374	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2013					Kusan Hilir	B
375	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	12/31/2013					Kusan Hilir	B
376	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	7/1/2014		0.512	1.1		Kusan Hilir	B
377	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	8/4/2014		0.193	1		Kusan Hilir	B
378	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	7/1/2014		0.253	2		Kusan Hilir	B
379	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	7/24/2014					Kusan Hilir	B
380	DPU Kusan Hilir	Saluran Drainase	5/19/2014					Kusan Hilir	B
381	DPU Kusan Hilir	Tanggul Banjir	4/17/2014		0.048	4		Kusan Hilir	B
382	DPU Kusan Hilir	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2012					Kusan Hilir	B
383	DPU Kusan Hilir	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2013					Kusan Hilir	B
384	DPU Kusan Hilir	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2013					Kusan Hilir	B
385	DPU Kusan Hilir	Jaringan Pembawa	12/31/2008	Pipa PVC,Reservoar	1,658.000			Kusan Hilir	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
		Kapasitas Kecil		,i					
386	DPU Kusan Hilir	#REF!	12/31/2007	Pipa PVC,Reservoar ,i	0.352			Kusan Hilir	RB
387	DPU Kusan Hilir	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	12/31/2013					Kusan Hilir	B
388	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Agregat	7.740	4		Sungai Loban	B
389	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/12/2012	Aspal	1.124	4		Sungai Loban	B
390	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	14.926	4		Sungai Loban	B
391	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	5.770	4		Sungai Loban	B
392	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	4.880	4		Sungai Loban	B
393	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	3.389	4.5		Sungai Loban	B
394	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/12/2012	Aspal	2.450	4		Sungai Loban	B
395	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	0.633	10		Sungai Loban	B
396	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	1.657	4		Sungai Loban	B
397	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	1.447	4		Sungai Loban	B
398	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	11/22/2013	Aspal	2.191	4		Sungai Loban	B
399	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	11/22/2013	Aspal		4		Sungai Loban	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Loban	Lokal	013		2.222				
400	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.500	4		Sungai Loban	B
401	DPU Sungai Loban	Jalan Kab. Lokal	12/12/2014	Aspal	0.289	4		Sungai Loban	B
402	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Sungai Loban	B
403	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.100	4		Sungai Loban	B
404	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2012		0.886	3	2658	Sungai Loban	B
405	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2012		0.910	3	2730	Sungai Loban	B
406	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2012		0.150	3	450	Sungai Loban	B
407	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2012		0.925	3	2775	Sungai Loban	B
408	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2012		0.925	3	2775	Sungai Loban	B
409	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2012		0.886	3	2658	Sungai Loban	B
410	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2012		0.560	4	2240	Sungai Loban	B
411	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2012		0.875	3	2625	Sungai Loban	B
412	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2013	Agregat	1.000	4		Sungai Loban	B
413	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2013	Pas. Batu base cours	0.360	4	1440	Sungai Loban	B
414	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course	0.600	3.5	2100	Sungai Loban	B
415	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course		4	4000	Sungai Loban	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Loban		013		1.000				
416	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.456	3	1368	Sungai Loban	B
417	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course	0.725	3.5	2537.5	Sungai Loban	B
418	DPU Sungai Loban	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.463	3	1389	Sungai Loban	B
419	DPU Sungai Loban	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		2.334	4		Sungai Loban	B
420	DPU Sungai Loban	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		2.335	4		Sungai Loban	B
421	DPU Sungai Loban	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		2.331	4		Sungai Loban	B
422	DPU Sungai Loban	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		2.334	4		Sungai Loban	B
423	DPU Sungai Loban	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		2.335	4		Sungai Loban	B
424	DPU Sungai Loban	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		2.335	4		Sungai Loban	B
425	DPU Sungai Loban	Jembatan Beton	12/31/2013					Sungai Loban	B
426	DPU Sungai Loban	Jembatan Beton	12/31/2013					Sungai Loban	B
427	DPU Sungai Loban	Jembatan Beton	12/31/2013					Sungai Loban	B
428	DPU Sungai Loban	Jembatan Beton	12/31/2013					Sungai Loban	B
429	DPU Sungai Loban	Jembatan Beton	12/31/2013					Sungai Loban	B
430	DPU Sungai Loban	Jembatan Beton	12/31/2013					Sungai Loban	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
431	DPU Sungai Loban	Jembatan Beton	12/31/2013					Sungai Loban	B
432	DPU Sungai Loban	Saluran Induk	12/31/2009	Galian Tanah (alat)	1.700	2.5	1.5	Sungai Loban	B
433	DPU Sungai Loban	Saluran Sekunder	12/31/2008	Galian Tanah (ALAT)	5.500	2	1	Sungai Loban	B
434	DPU Sungai Loban	Saluran Sekunder	12/31/2011	Pasangan Batu	0.060	0.5		Sungai Loban	B
435	DPU Sungai Loban	Saluran Sekunder	12/31/2013		0.390	0.3		Sungai Loban	B
436	DPU Sungai Loban	Saluran Induk Pembuang	12/31/2013		0.600	7		Sungai Loban	B
437	DPU Sungai Loban	Tanggul Banjir	12/31/2012		1.235	8	2.5	Sungai Loban	B
438	DPU Sungai Loban	Bangunan Waduk Pasang Surut	6/3/2014		0.153	92	8094	Sungai Loban	B
439	DPU Sungai Loban	Bangunan Waduk Pasang Surut	6/3/2014		0.124	89	7470	Sungai Loban	B
440	DPU Sungai Loban	Bangunan Waduk Pasang Surut	6/3/2014		0.134	100	7570	Sungai Loban	B
441	DPU Sungai Loban	Bangunan Waduk Pasang Surut	7/21/2014		0.174	97	6044	Sungai Loban	B
442	DPU Sungai Loban	Bangunan Waduk Pasang Surut	7/21/2014		0.196	125	8126	Sungai Loban	B
443	DPU Sungai Loban	Bangunan Waduk Pasang Surut	8/11/2014		0.170	107		Sungai Loban	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
444	DPU Sungai Loban	Bangunan Waduk Pasang Surut	8/15/2014		0.169	130		Sungai Loban	B
445	DPU Sungai Loban	Bangunan Waduk Pasang Surut	10/1/2014		0.154	90		Sungai Loban	B
446	DPU Sungai Loban	Saluran Induk (Primer) Pembuang	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	0.780	2.5	1.5	Sungai Loban	B
447	DPU Sungai Loban	Pintu Air	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Sungai Loban	B
448	DPU Sungai Loban	Pintu Air	12/31/2012		2.000	1		Sungai Loban	B
449	DPU Sungai Loban	Saluran Drainase	12/31/2012		0.809			Sungai Loban	B
450	DPU Sungai Loban	Saluran Drainase	12/31/2013					Sungai Loban	B
451	DPU Sungai Loban	Saluran Drainase	12/31/2013					Sungai Loban	B
452	DPU Sungai Loban	Saluran Drainase	12/31/2013					Sungai Loban	B
453	DPU Sungai Loban	Saluran Drainase	12/31/2013					Sungai Loban	B
454	DPU Sungai Loban	Saluran Drainase	12/31/2013					Sungai Loban	B
455	DPU Sungai Loban	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2013					Sungai Loban	B
456	DPU Sungai Loban	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2013					Sungai Loban	B
457	DPU Sungai	Jaringan	12/31/2	Pipa				Sungai Loban	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Loban	Pembawa Kapasitas Kecil	008	PVC,Reservoar ,i	1,658.000				
458	DPU Sungai Loban	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2009	Beton	0.006	3	18	Sungai Loban	B
459	DPU Sungai Loban	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2009					Sungai Loban	B
460	DPU Sungai Loban	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	12/31/2005					Sungai Loban	B
461	DPU Sungai Loban	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	12/31/2005					Sungai Loban	B
462	DPU Sungai Loban	#REF!	12/31/2007	Pipa PVC,Reservoar ,i	2,000.000			Sungai Loban	RB
463	DPU Sungai Loban	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	12/31/2012					Sungai Loban	B
464	DPU Sungai Loban	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	12/31/2009	IPAS	3,850.000			Sungai Loban	B
465	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2007	Agregat	3.176	4		Satui	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
466	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2007	Agregat	0.500	4		Satui	B
467	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2007	Agregat	0.100	4		Satui	B
468	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2007	Agregat	0.600	4		Satui	B
469	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2007	Aspal	0.815	4		Satui	B
470	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2007	Agregat	0.606	3		Satui	B
471	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2007	Agregat	0.315	3		Satui	B
472	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2007	Agregat	0.226	4		Satui	B
473	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2007	Agregat	0.647	4		Satui	B
474	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/21/2011	Agregat	0.714	4		Satui	B
475	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	2.100	4		Satui	B
476	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	11/14/2011	Aspal	1.500	5		Satui	B
477	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/21/2011	Aspal	1.272	5		Satui	B
478	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	11/25/2011	Aspal	2.800	6		Satui	B
479	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.812	4		Satui	B
480	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/27/2012	Agregat	1.160	4		Satui	B
481	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	2/23/2007	Aspal	0.384	4		Satui	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
482	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	2/23/2007	Aspal	0.144	4		Satui	B
483	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.118	4		Satui	B
484	DPU Satui	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	36.500	10		Satui	B
485	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2011		0.405	3	1215.69	Satui	B
486	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2011		0.461	3	1381.5	Satui	B
487	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2011		0.516	3	1548	Satui	B
488	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2011	Aspal	0.100	3		Satui	B
489	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2011	Aspal	0.100	3		Satui	B
490	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2011	Aspal	0.060	3		Satui	B
491	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012		0.148	3	444	Satui	B
492	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012		0.142	3	426	Satui	B
493	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012		0.152	2.5	380	Satui	B
494	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.240	3	721.26	Satui	B
495	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012	Pasangan Batu, Base	0.242	3	726	Satui	B
496	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012		0.300	3	900	Satui	B
497	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012		0.360	3	1080	Satui	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
498	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012	Beton	0.604	3.5	2114	Satui	B
499	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.648	3	1944	Satui	B
500	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012	Lapis Pondasi Bawah	0.387	3	1161	Satui	B
501	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012	Lapis Pondasi Bawah	0.502	3	1506	Satui	B
502	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012		0.496	3.8	1884.8	Satui	B
503	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2012		0.100	3	300	Satui	B
504	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013		1.956	5		Satui	B
505	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	Base course	0.545	4.15	2261.75	Satui	B
506	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	Base course	0.738	3.5	2583	Satui	B
507	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	Beton	0.303	3	909	Satui	B
508	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	Beton	0.129	3	385.5	Satui	B
509	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	Base course	0.500	3.93	1965	Satui	B
510	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	Base course	0.500	3.93	1965	Satui	B
511	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.478	3	1434	Satui	B
512	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	base course	0.658	3	1974	Satui	B
513	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	Base course	1.000	3.5	3500	Satui	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
514	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	Beton	0.183	2.5	457.5	Satui	B
515	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.193	2.5	482.5	Satui	B
516	DPU Satui	Jalan Desa	12/31/2013	base course	0.655	3	1965	Satui	B
517	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.975	4		Satui	B
518	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.341	4		Satui	B
519	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.634	4		Satui	B
520	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	6/27/2014		0.975	4		Satui	B
521	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.975	4		Satui	B
522	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.439	4		Satui	B
523	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.341	4		Satui	B
524	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.195	4		Satui	B
525	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	7/21/2014		0.975	4		Satui	B
526	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	8/4/2014		0.975	4		Satui	B
527	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	8/4/2014		0.975	4		Satui	B
528	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	8/4/2014		0.975	4		Satui	B
529	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	8/4/2014		0.975	4		Satui	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
530	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.975	4		Satui	B
531	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.975	4		Satui	B
532	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.975	4		Satui	B
533	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.975	4		Satui	B
534	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.975	4		Satui	B
535	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.975	4		Satui	B
536	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.975	4		Satui	B
537	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.975	4		Satui	B
538	DPU Satui	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.975	4		Satui	B
539	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2012		4.000	4		Satui	B
540	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2012		0.004	5.5		Satui	B
541	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2012		0.063	3		Satui	B
542	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
543	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
544	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
545	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
546	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
547	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
548	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
549	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
550	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
551	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
552	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
553	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
554	DPU Satui	Jembatan Beton	12/31/2013					Satui	B
555	DPU Satui	Jembatan Beton	11/3/2014		0.070	2		Satui	B
556	DPU Satui	Jembatan Beton	6/2/2014		0.004	5	20	Satui	B
557	DPU Satui	Jembatan Beton	6/2/2014		0.005	5.8	29	Satui	B
558	DPU Satui	Saluran Induk	12/31/2009	Galian Tanah (alat)	1.400	3	1.5	Satui	B
559	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Satui	B
560	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	3.600	2.5	1.7	Satui	B
561	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	2.000	2	1.5	Satui	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
562	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2008	galian tanah (alat)	6.000	2	0.8	Satui	B
563	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2008	Galian Tanah (ALAT)	4.100	2	1.5	Satui	B
564	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2011	Galian Tanah(alat)	1,163.000	3	2	Satui	B
565	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2011	Galia Tanah(alat)	1.800	3	2	Satui	B
566	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2012		0.190	0.25	1.5	Satui	B
567	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2012		0.700	3	1.5	Satui	B
568	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2013		2.370	2.5		Satui	B
569	DPU Satui	Saluran Sekunder	12/31/2013		2.300	2.8		Satui	B
570	DPU Satui	Saluran Induk Pembuang	12/31/2012		0.600	3	1.5	Satui	B
571	DPU Satui	Saluran Induk Pembuang	12/31/2013		4.385	8		Satui	B
572	DPU Satui	BangunanGot Miring	12/31/2011					Satui	B
573	DPU Satui	Pintu Air	12/31/2012		2.000	1		Satui	B
574	DPU Satui	Saluran Drainase	12/31/2012	Pas. Batu Belah	1.215		105.12	Satui	B
575	DPU Satui	Saluran Drainase	12/31/2013					Satui	B
576	DPU Satui	Saluran Drainase	12/31/2013					Satui	B
577	DPU Satui	Saluran Drainase	12/31/2013					Satui	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
578	DPU Satui	Saluran Drainase	7/11/2014		0.233	1		Satui	B
579	DPU Satui	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2012					Satui	B
580	DPU Satui	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2011					Satui	B
581	DPU Satui	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	12/31/2007	Pipa PVC, Reservoir	0.743			Satui	B
582	DPU Satui	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	12/31/2013					Satui	B
583	DPU Satui	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	12/31/2013					Satui	B
584	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.976	3		Kusan Hulu	B
585	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.976	3		Kusan Hulu	B
586	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2009	Agregat	3.824	4		Kusan Hulu	B
587	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	5.876	4		Kusan Hulu	B
588	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/20/2013	Aspal	6.323	5.5		Kusan Hulu	B
589	DPU Kusan	Jalan Kab.	12/31/2	Agregat		4.5		Kusan Hulu	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hulu	Lokal	013		9.000				
590	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/19/2013	Aspal	6.082	6		Kusan Hulu	B
591	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/30/2010	Aspal	6.846	5.5		Kusan Hulu	B
592	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	1.000	4		Kusan Hulu	B
593	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	1.000	4		Kusan Hulu	B
594	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	1.000	4		Kusan Hulu	B
595	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	2.032	4		Kusan Hulu	B
596	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	1.000	4		Kusan Hulu	B
597	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	1.000	4		Kusan Hulu	B
598	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	1.473	3		Kusan Hulu	B
599	DPU Kusan Hulu	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	1.624	3		Kusan Hulu	B
600	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kusan Hulu	B
601	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kusan Hulu	B
602	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kusan Hulu	B
603	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.471	4	1884	Kusan Hulu	B
604	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.475	2	950	Kusan Hulu	B
605	DPU Kusan	Jalan Desa	12/31/2			3	2511.9	Kusan Hulu	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hulu		012		0.837				
606	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012	base course	0.564	3	1692	Kusan Hulu	B
607	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.186	2	372	Kusan Hulu	B
608	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.850	3	2550	Kusan Hulu	B
609	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.562	3	1686	Kusan Hulu	B
610	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.750	3	2250	Kusan Hulu	B
611	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.060	2	120	Kusan Hulu	B
612	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.186	3	558	Kusan Hulu	B
613	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.628	4	2512	Kusan Hulu	B
614	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.872	4	3488	Kusan Hulu	B
615	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.750	4	3000	Kusan Hulu	B
616	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2012		0.500	3	1500	Kusan Hulu	B
617	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2013	base course	1.100	3	3300	Kusan Hulu	B
618	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2013	base course	0.879	3	2637	Kusan Hulu	B
619	DPU Kusan Hulu	Jalan Desa	12/31/2013	base course	1.005	3	3015	Kusan Hulu	B
620	DPU Kusan Hulu	Jalan Khusus Komplek	7/21/2014		2.278	4		Kusan Hulu	B
621	DPU Kusan	Jalan Khusus	8/15/20			4		Kusan Hulu	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hulu	Komplek	14		0.138				
622	DPU Kusan Hulu	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.209	4		Kusan Hulu	B
623	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	12/31/2012		7.000	5		Kusan Hulu	B
624	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	12/31/2012		0.170	2		Kusan Hulu	B
625	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	12/31/2012		0.010	4		Kusan Hulu	B
626	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hulu	B
627	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hulu	B
628	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hulu	B
629	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hulu	B
630	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	12/31/2013					Kusan Hulu	B
631	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	10/1/2014		0.004	6.6		Kusan Hulu	B
632	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	10/1/2014		0.001	6.6		Kusan Hulu	B
633	DPU Kusan Hulu	Jembatan Beton	10/1/2014		0.003	5		Kusan Hulu	B
634	DPU Kusan Hulu	Jembatan Baja	11/22/2014		0.050	9.2		Kusan Hulu	B
635	DPU Kusan Hulu	Jembatan Kayu	11/1/2014		0.065	1.5		Kusan Hulu	B
636	DPU Kusan Hulu	Jembatan Kayu	11/1/2014		0.067	1.5		Kusan Hulu	B
637	DPU Kusan	Saluran Induk	12/31/2	Galian		2.5	1.5	Kusan Hulu	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hulu		007	Tanah(alat)	1.069				
638	DPU Kusan Hulu	Saluran Induk	12/31/2010	Galian Tanah	4.035	3	1.5	Kusan Hulu	B
639	DPU Kusan Hulu	Saluran Induk	12/31/2010	Galian Tanah	2.200	3	1.5	Kusan Hulu	B
640	DPU Kusan Hulu	#REF!	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Kusan Hulu	RB
641	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2006	Galian Tanah (alat)	2.000	3	2	Kusan Hulu	B
642	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Kusan Hulu	B
643	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Kusan Hulu	B
644	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	0.750	2	1.5	Kusan Hulu	B
645	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	0.926	2	1.5	Kusan Hulu	B
646	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	2.063	1.5	1	Kusan Hulu	B
647	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	0.780	1.5	0.5	Kusan Hulu	B
648	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2011	Galian Tanah(alat)	2.061	3	2	Kusan Hulu	B
649	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2011	Galian Tanah(alat)	2.593	3	2	Kusan Hulu	B
650	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2012		4.200	3	1.75	Kusan Hulu	B
651	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2012		1.100	3	1.5	Kusan Hulu	B
652	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2013		2.550	3.4		Kusan Hulu	B
653	DPU Kusan	Saluran	12/31/2			2.3		Kusan Hulu	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hulu	Sekunder	013		1.813				
654	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2013		1.500	3.2		Kusan Hulu	B
655	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2013		2.190	3		Kusan Hulu	B
656	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	12/31/2013		1.635	2.5		Kusan Hulu	B
657	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	9/30/2014		2.350	5		Kusan Hulu	B
658	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	8/15/2014		3.904	6		Kusan Hulu	B
659	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	10/1/2014		2.755	2.2		Kusan Hulu	B
660	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	8/11/2014		0.050	0.25		Kusan Hulu	B
661	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	7/21/2014		2.183	250		Kusan Hulu	B
662	DPU Kusan Hulu	Saluran Sekunder	10/1/2014		1.050	4.2		Kusan Hilir	B
663	DPU Kusan Hulu	Saluran Induk Pembuang	12/31/2013					Kusan Hulu	B
664	DPU Kusan Hulu	Tanggul Banjir	12/31/2013		0.014			Kusan Hulu	B
665	DPU Kusan Hulu	Tanggul Banjir	6/10/2014		2.183	213		Kusan Hulu	B
666	DPU Kusan Hulu	Bangunan Waduk Pasang Surut	8/11/2014		0.065	27		Kusan Hulu	B
667	DPU Kusan Hulu	Bangunan Waduk Pasang Surut	8/18/2014		0.030	10		Kusan Hulu	B
668	DPU Kusan	Pintu Air	12/31/2	Galian Tanah		1	0.5	Kusan Hulu	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Hulu		006		1.500				
669	DPU Kusan Hulu	Pintu Air	12/31/2013					Kusan Hulu	B
670	DPU Kusan Hulu	Pintu Air	12/31/2013		0.040	44		Kusan Hulu	B
671	DPU Kusan Hulu	Saluran Drainase	8/15/2014		0.276	1.1		Kusan Hulu	B
672	DPU Kusan Hulu	Saluran Drainase	8/15/2014		0.435	1.5		Kusan Hulu	B
673	DPU Kusan Hulu	Saluran Drainase	8/15/2014		0.102	1.5		Kusan Hulu	B
674	DPU Kusan Hulu	Tanggul Banjir	10/1/2014		1.735	3.2		Kusan Hulu	B
675	DPU Kusan Hulu	Pintu Pengtur Banjir	12/31/2007	Pintu			10	Kusan Hulu	B
676	DPU Kusan Hulu	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2013					Kusan Hulu	B
677	DPU Kusan Hulu	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2013					Kusan Hulu	B
678	DPU Kusan Hulu	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2009	IPAS, Menara beton	2,190.000			Kusan Hulu	B
679	DPU Kusan Hulu	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2009	Beton	0.006	3	18	Kusan Hulu	B
680	DPU Kusan Hulu	Jaringan Pembawa Kapasitas	12/31/2006	Pipa PVC, Reservoir	4,536.000			Kusan Hulu	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
		Sedang							
681	DPU Kusan Hulu	#REF!	12/31/2007	Pipa PVC,Reservoir, i	0.903			Kusan Hulu	RB
682	DPU Kusan Hulu	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	7/11/2014		0.890	300		Kusan Hulu	B
683	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.455	3.5		Simpang Empat	B
684	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	8/22/2005	Aspal	0.517	4		Simpang Empat	B
685	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	7/18/2006	Aspal	0.639	4		Simpang Empat	B
686	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	7/18/2006	Aspal	0.764	3.5		Simpang Empat	B
687	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2006	Aspal	0.132	4		Simpang Empat	B
688	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2007	Aspal	1.200	4		Simpang Empat	B
689	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	2.581	3	7743	Simpang Empat	B
690	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.435	4		Simpang Empat	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
691	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/2/2008	Aspal	0.491	3.5		Simpang Empat	B
692	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.362	3		Simpang Empat	B
693	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/2/2008	Aspal	0.258	3		Simpang Empat	B
694	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/21/2011	Aspal	0.273	3.5		Simpang Empat	B
695	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/2/2008	Aspal	0.444	3		Simpang Empat	B
696	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.268	3.5		Simpang Empat	B
697	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	1.385	4		Simpang Empat	B
698	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.584	4		Simpang Empat	B
699	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/2/2008	Aspal	0.221	4		Simpang Empat	B
700	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/2/2008	Aspal	0.300	4		Simpang Empat	B
701	DPU Simpang	Jalan Kab. Lokal	12/2/2008	Aspal	0.273	4		Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
702	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/2/2008	Aspal	0.135	4		Simpang Empat	B
703	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.367	4		Simpang Empat	B
704	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.331	4		Simpang Empat	B
705	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.320	4		Simpang Empat	B
706	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	1.200	3.5		Simpang Empat	B
707	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.491	4		Simpang Empat	B
708	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	6/13/2006	Aspal	0.295	3		Simpang Empat	B
709	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	6/13/2006	Aspal	0.500	10		Simpang Empat	B
710	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.275	3		Simpang Empat	B
711	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.700	8		Simpang Empat	B
712	DPU	Jalan Kab.	12/31/2	Soil Stabilizer		5		Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat	Lokal	008		0.850			Empat	
713	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Urugan	0.050	50		Simpang Empat	B
714	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.769	3.5		Simpang Empat	B
715	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Agregat	0.286	3.5		Simpang Empat	B
716	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.262	3		Simpang Empat	B
717	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.148	3.5		Simpang Empat	B
718	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.114	3.5		Simpang Empat	B
719	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.490	3		Simpang Empat	B
720	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.193	3		Simpang Empat	B
721	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.480	3		Simpang Empat	B
722	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.222	3		Simpang Empat	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
723	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.263	3		Simpang Empat	B
724	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.311	3		Simpang Empat	B
725	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.325	3		Simpang Empat	B
726	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.358	3		Simpang Empat	B
727	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.158	3		Simpang Empat	B
728	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.357	3		Simpang Empat	B
729	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.300	3		Simpang Empat	B
730	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.820	4		Simpang Empat	B
731	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.385	3.5		Simpang Empat	B
732	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	7/18/2006	Aspal	0.854	4		Simpang Empat	B
733	DPU Simpang	Jalan Desa	12/31/2011		0.160	3	480.84	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
734	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.201	3	601.65	Simpang Empat	B
735	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.151	3	452.28	Simpang Empat	B
736	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.141	3	422.34	Simpang Empat	B
737	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.335	3	1005	Simpang Empat	B
738	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.353	3	1059	Simpang Empat	B
739	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.155	3	464.28	Simpang Empat	B
740	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.182	3	547.17	Simpang Empat	B
741	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.193	3	580.32	Simpang Empat	B
742	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.221	3	661.83	Simpang Empat	B
743	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011		0.190	3	571.05	Simpang Empat	B
744	DPU	Jalan Desa	12/31/2011			3	654.96	Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat		011		0.218			Empat	
745	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.500	4		Simpang Empat	B
746	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.500	4		Simpang Empat	B
747	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.500	4		Simpang Empat	B
748	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.500	4		Simpang Empat	B
749	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	3		Simpang Empat	B
750	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	3		Simpang Empat	B
751	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Agregat	1.000	4		Simpang Empat	B
752	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Beton	0.200	2.25	450	Simpang Empat	B
753	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Agregat	0.210	2.25	472.5	Simpang Empat	B
754	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.150	3	450	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
755	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Urugan Base Course d	0.150	2.5	375	Simpang Empat	B
756	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Siring Pas. Batu	0.150	2.5	375	Simpang Empat	B
757	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Jalan Beton	0.150	2	300	Simpang Empat	B
758	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.110	3	330	Simpang Empat	B
759	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.060	2	120	Simpang Empat	B
760	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.350	3	1050	Simpang Empat	B
761	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.150	3	450	Simpang Empat	B
762	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.550	3	1650	Simpang Empat	B
763	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Jalan Beton	0.150	4	600	Simpang Empat	B
764	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.165	2	330	Simpang Empat	B
765	DPU Simpang	Jalan Desa	12/31/2012		0.240	2	480	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
766	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Agregat	0.735	3	2205	Simpang Empat	B
767	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Beton	0.160	3	480	Simpang Empat	B
768	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Agregat	0.342	2.5	855	Simpang Empat	B
769	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Beton	0.115	3	345	Simpang Empat	B
770	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.150	3	450	Simpang Empat	B
771	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.330	3	990	Simpang Empat	B
772	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.100	3	300	Simpang Empat	B
773	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.072	2.5	180	Simpang Empat	B
774	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.132	3	396	Simpang Empat	B
775	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Beton	0.054	3	162	Simpang Empat	B
776	DPU	Jalan Desa	12/31/2012			3	780	Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat		012		0.260			Empat	
777	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.199	3	597	Simpang Empat	B
778	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.228	3	684	Simpang Empat	B
779	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.172	3	516	Simpang Empat	B
780	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.221	2.5	552.5	Simpang Empat	B
781	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Agregat	0.166	2.5	415	Simpang Empat	B
782	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Agregat	0.180	2.5	450	Simpang Empat	B
783	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Beton	0.140	2.5	350	Simpang Empat	B
784	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.080	3	240	Simpang Empat	B
785	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.082	3	246	Simpang Empat	B
786	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.148	3	444	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
787	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.133	3.5	465.5	Simpang Empat	B
788	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.142	3	426	Simpang Empat	B
789	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012		0.200	4	800	Simpang Empat	B
790	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2012	Siring Pasangan Batu	0.049	2.5	122.5	Simpang Empat	B
791	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.280	4.5	1257.75	Simpang Empat	B
792	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.146	3	438	Simpang Empat	B
793	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.236	2.75	648.3675	Simpang Empat	B
794	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.160	4	641.2	Simpang Empat	B
795	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.151	4	604	Simpang Empat	B
796	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.285	4	1140	Simpang Empat	B
797	DPU Simpang	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.396	2.1458 6	850.10663 48	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
798	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.138	3.5	483	Simpang Empat	B
799	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton		3		Simpang Empat	B
800	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.407	4.5	1831.5	Simpang Empat	B
801	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.492	5	2460	Simpang Empat	B
802	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.148	3.5	518.1585904	Simpang Empat	B
803	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.152	3.5	532.2096461	Simpang Empat	B
804	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.290	4	1160	Simpang Empat	B
805	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.224	4	896.8	Simpang Empat	B
806	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	base course	0.045	4	179.2	Simpang Empat	B
807	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.249	3.5	872.1969463	Simpang Empat	B
808	DPU	Jalan Desa	12/31/2013	beton		3	705	Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat		013		0.235			Empat	
809	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.164	2.5	411	Simpang Empat	B
810	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.370	4	1480	Simpang Empat	B
811	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.107	2.75	294.25	Simpang Empat	B
812	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.250	4	1000	Simpang Empat	B
813	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.206	4	825.6	Simpang Empat	B
814	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.314	4	1256.4	Simpang Empat	B
815	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.182	3	544.65	Simpang Empat	B
816	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.113	2.5	282.5	Simpang Empat	B
817	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.165	3	494.1	Simpang Empat	B
818	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton		3		Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
819	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.097	4	386.4	Simpang Empat	B
820	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.130	3.15684	410.3894737	Simpang Empat	B
821	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.274	2	547.82	Simpang Empat	B
822	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.119	4	474.24	Simpang Empat	B
823	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.095	2.5	237.5	Simpang Empat	B
824	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.379	3	1135.8	Simpang Empat	B
825	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.500	3	1500.57	Simpang Empat	B
826	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.477	3.5	1670.41	Simpang Empat	B
827	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.105	2	209.4	Simpang Empat	B
828	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.456	4	1825.2	Simpang Empat	B
829	DPU Simpang	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.195	2	390	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
830	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.280	4	1118.16	Simpang Empat	B
831	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.293	4	1171.8	Simpang Empat	B
832	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.322	2	643.6	Simpang Empat	B
833	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.280	3	839.7	Simpang Empat	B
834	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.113	4	450.8	Simpang Empat	B
835	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.135	4.3	580.5	Simpang Empat	B
836	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.240	2.61	625.878	Simpang Empat	B
837	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.454	4	1815.32	Simpang Empat	B
838	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.475	3.5	1661.205	Simpang Empat	B
839	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.290	3	870.9	Simpang Empat	B
840	DPU	Jalan Desa	12/31/2013	beton		3	1665.99	Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat		013		0.555			Empat	
841	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.420	3	1260	Simpang Empat	B
842	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.109	4	436.4	Simpang Empat	B
843	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.361	3.5	1262.275	Simpang Empat	B
844	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	base course	0.208	4	833.6	Simpang Empat	B
845	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.456	3.4	1551.42	Simpang Empat	B
846	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.220	4.5652 2	1004.3478 26	Simpang Empat	B
847	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.488	3.3551	1636.6187 76	Simpang Empat	B
848	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.246	3.755	922.04025	Simpang Empat	B
849	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.302	3.7309 5	1128.0534 52	Simpang Empat	B
850	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.062	3.5	217	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
851	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.268	4.4	1179.2	Simpang Empat	B
852	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.083	5.5	456.5	Simpang Empat	B
853	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.414	3.5	1449	Simpang Empat	B
854	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.114	3	340.89	Simpang Empat	B
855	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.114	3	342	Simpang Empat	B
856	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.326	4	1304	Simpang Empat	B
857	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	1.575	3.5	5512.5	Simpang Empat	B
858	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.238	4.05769	965.7307692	Simpang Empat	B
859	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.257	2.6725	687.9015	Simpang Empat	B
860	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.380	5.77778	2192.666667	Simpang Empat	B
861	DPU Simpang	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.219	3.67692	804.5107692	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
862	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.220	3.5	771.4	Simpang Empat	B
863	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	base course	0.337	3.9	1314.3	Simpang Empat	B
864	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.148	6	887.82	Simpang Empat	B
865	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.192	3.8714	743.3142857	Simpang Empat	B
866	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.262	4.5	1179	Simpang Empat	B
867	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013		1.650	11.5714	19092.85714	Simpang Empat	B
868	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.245	4.372	1068.954	Simpang Empat	B
869	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.290	2.30813	668.2021875	Simpang Empat	B
870	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.200	1.50643	301.4363571	Simpang Empat	B
871	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.045	3	135	Simpang Empat	B
872	DPU	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu,		5.095	2040.038	Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat		013	base c	0.400			Empat	
873	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.133	3.4	452.2	Simpang Empat	B
874	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.085	3.058	259.93	Simpang Empat	B
875	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.579	2.05662	1190.781618	Simpang Empat	B
876	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.296	3.0575	904.4085	Simpang Empat	B
877	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.260	2.74	711.03	Simpang Empat	B
878	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.274	4.10645	1124.346452	Simpang Empat	B
879	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.101	4.4	444.4	Simpang Empat	B
880	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.171	6.16667	1054.5	Simpang Empat	B
881	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.283	4.82333	1365.003333	Simpang Empat	B
882	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.243	4.4	1068.1	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
883	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.243	5.45	1323.805	Simpang Empat	B
884	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.133	3.4	452.2	Simpang Empat	B
885	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.149	3.30882	494.0073529	Simpang Empat	B
886	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.212	3.75	795	Simpang Empat	B
887	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.369	4.80513	1773.092308	Simpang Empat	B
888	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.174	5.97222	1039.166667	Simpang Empat	B
889	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	225.000	4.67045	1050852.273	Simpang Empat	B
890	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.242	4.65476	1126.452381	Simpang Empat	B
891	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.060	5	300	Simpang Empat	B
892	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.265	5.575	1477.375	Simpang Empat	B
893	DPU Simpang	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.420	3	1261.05	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
894	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.197	3.78	744.66	Simpang Empat	B
895	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.355	3.11447	1106.570511	Simpang Empat	B
896	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.240	3.70357	888.4867857	Simpang Empat	B
897	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.120	5.3	636	Simpang Empat	B
898	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.304	3.4927	1062.689724	Simpang Empat	B
899	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.181	4	724	Simpang Empat	B
900	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.125	4.2	525	Simpang Empat	B
901	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.262	3.53	924.507	Simpang Empat	B
902	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	paving			866.6666667	Simpang Empat	B
903	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.072	3.47889	250.48	Simpang Empat	B
904	DPU	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu,		4.75	712.5	Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat		013	base c	0.150			Empat	
905	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.355	4	1418	Simpang Empat	B
906	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.226	3.1537	712.737037	Simpang Empat	B
907	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.306	2.91606	890.8565152	Simpang Empat	B
908	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.334	2.625	877.8	Simpang Empat	B
909	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.454	4	1816	Simpang Empat	B
910	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.227	3.25692	739.3215385	Simpang Empat	B
911	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.213	2.5	532.5	Simpang Empat	B
912	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.384	3.44048	1321.142857	Simpang Empat	B
913	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	1.150	3.5234	4051.914894	Simpang Empat	B
914	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.300	4	1200	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
915	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	beton	0.045	2.39	106.355	Simpang Empat	B
916	DPU Simpang Empat	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.492	4.5	2214	Simpang Empat	B
917	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		0.200	4		Simpang Empat	B
918	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		0.220	4		Simpang Empat	B
919	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.460	3		Simpang Empat	B
920	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.365	3		Simpang Empat	B
921	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.212	3.5		Simpang Empat	B
922	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.413	5		Simpang Empat	B
923	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.209	3		Simpang Empat	B
924	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.139	2.5		Simpang Empat	B
925	DPU Simpang	Jalan Khusus Komplek	6/27/2014		0.135	3.5		Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
926	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/25/2014		0.054	3		Simpang Empat	B
927	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/25/2014		0.049	3		Simpang Empat	B
928	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/21/2014		0.458	3		Simpang Empat	B
929	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		0.207	6		Simpang Empat	B
930	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.227	3		Simpang Empat	B
931	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.500	4		Simpang Empat	B
932	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.176	2		Simpang Empat	B
933	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		2.084	3.5		Simpang Empat	B
934	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.209	4		Simpang Empat	B
935	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	10/1/2014		0.242	4		Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
936	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	9/17/2014		1.890	4		Simpang Empat	B
937	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.172	4		Simpang Empat	B
938	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.320	3		Simpang Empat	B
939	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.024	1.5		Simpang Empat	B
940	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.026	1.5		Simpang Empat	B
941	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.036	1.5		Simpang Empat	B
942	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.055	1.5		Simpang Empat	B
943	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.014	1.5		Simpang Empat	B
944	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.083	1.5		Simpang Empat	B
945	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.008	1.5		Simpang Empat	B
946	DPU Simpang	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.074	1.5		Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
947	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	10/1/2014		0.247	4.5		Simpang Empat	B
948	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.264	4		Simpang Empat	B
949	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.305	3		Simpang Empat	B
950	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	10/31/2014		0.202	4.5		Simpang Empat	B
951	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.245	3		Simpang Empat	B
952	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		0.162	3		Simpang Empat	B
953	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		0.216	3.75		Simpang Empat	B
954	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/11/2014		0.310	3		Simpang Empat	B
955	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	7/21/2014		0.210	4		Simpang Empat	B
956	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	8/4/2014		0.154	2.5		Simpang Empat	B
957	DPU	Jalan Khusus	8/4/2014			4		Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat	Komplek	4		0.137			Empat	
958	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.137	3.7		Simpang Empat	B
959	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.090	4		Simpang Empat	B
960	DPU Simpang Empat	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.275	3.5		Simpang Empat	B
961	DPU Simpang Empat	Jembatan Beton	12/31/2012		0.035	5		Simpang Empat	B
962	DPU Simpang Empat	Jembatan Beton	12/31/2012		5.000	5		Simpang Empat	B
963	DPU Simpang Empat	Jembatan Beton	12/31/2012		0.060	2.5		Simpang Empat	B
964	DPU Simpang Empat	Jembatan Beton	12/31/2013					Simpang Empat	B
965	DPU Simpang Empat	Jembatan Beton	12/31/2013					Simpang Empat	B
966	DPU Simpang Empat	Jembatan Beton	12/31/2013					Simpang Empat	B
967	DPU Simpang Empat	Jembatan Beton	12/31/2013					Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
968	DPU Simpang Empat	Jembatan Beton	8/7/2014		0.005	6.95		Simpang Empat	B
969	DPU Simpang Empat	Jembatan Beton	9/16/2014		0.004	5		Simpang Empat	B
970	DPU Simpang Empat	Jembatan Kayu	7/1/2014		0.101	2		Simpang Empat	B
971	DPU Simpang Empat	Saluran Sekunder	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Simpang Empat	B
972	DPU Simpang Empat	Saluran Sekunder	12/31/2008	Galian Tanah (ALAT)	1.800	2.5	1.5	Simpang Empat	B
973	DPU Simpang Empat	Saluran Sekunder	12/31/2008	Pasangan Batu	1.500	1	0.5	Simpang Empat	B
974	DPU Simpang Empat	Saluran Sekunder	12/31/2012		2.600	1.3	1.3	Simpang Empat	B
975	DPU Simpang Empat	Saluran Sekunder	12/31/2013		2.000	2.5		Simpang Empat	B
976	DPU Simpang Empat	Saluran Induk Pembuang	12/31/2013		0.808			Simpang Empat	B
977	DPU Simpang Empat	Saluran Induk Pembuang	12/31/2013		0.458			Simpang Empat	B
978	DPU Simpang	Saluran Induk Pembuang	12/31/2013		1.150	2.5		Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
979	DPU Simpang Empat	Saluran Induk Pembuang	12/31/2013		0.752			Simpang Empat	B
980	DPU Simpang Empat	Saluran Induk Pembuang	12/31/2013		0.641			Simpang Empat	B
981	DPU Simpang Empat	Saluran Induk Pembuang	12/31/2013		1.448	3		Simpang Empat	B
982	DPU Simpang Empat	Saluran Induk Pembuang	12/31/2013		1.712			Simpang Empat	B
983	DPU Simpang Empat	Saluran Sekunder Pembuang	8/7/2014		0.810	0.28		Simpang Empat	B
984	DPU Simpang Empat	Saluran Sekunder Pembuang	9/25/2014		0.970	0.3		Simpang Empat	B
985	DPU Simpang Empat	Saluran Sekunder Pembuang	10/1/2014		0.170	0.4		Simpang Empat	B
986	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
987	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
988	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
989	DPU	BangunanGot	12/31/2					Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Simpang Empat	Miring	011					Empat	
990	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
991	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
992	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
993	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
994	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
995	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
996	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
997	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
998	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
999	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1000	DPU Simpang Empat	BangunanGot Miring	12/31/2011					Simpang Empat	B
1001	DPU Simpang Empat	Bangunan Pengeluaran/ Pintu	12/31/2010	Pintu Air			3	Simpang Empat	B
1002	DPU Simpang Empat	#REF!	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Simpang Empat	RB
1003	DPU Simpang Empat	Pintu Air	12/31/2013					Simpang Empat	B
1004	DPU Simpang Empat	Bangunan Pembawa pengaman Sungai	12/31/2011	Pasangan Batu	0.533	0.35	1.4	Simpang Empat	B
1005	DPU Simpang Empat	Bangunan Pembawa pengaman Sungai	12/31/2011	Pasangan Batu	0.268	0.35	1.5	Simpang Empat	B
1006	DPU Simpang Empat	Bangunan Pembawa pengaman Sungai	12/31/2011	Galian Tanah(alat),	0.375	2	0.8	Simpang Empat	B
1007	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2006	Pasangan Batu	0.750	2	1	Simpang Empat	B
1008	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2007	Pasangan Batu	0.871	1	0.5	Simpang Empat	B
1009	DPU Simpang	Saluran Drainase	12/31/2008	Pasangan Batu	0.681	0.8	1	Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
1010	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2009	Pasangan Batu	2.400	0.5	0.5	Simpang Empat	B
1011	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2009	Pasangan Batu	1.800	2	1.5	Simpang Empat	B
1012	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.286		94.82	Simpang Empat	B
1013	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.208			Simpang Empat	B
1014	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.132		57.41	Simpang Empat	B
1015	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.219		68.46	Simpang Empat	B
1016	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.086		68.46	Simpang Empat	B
1017	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.320			Simpang Empat	B
1018	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.252			Simpang Empat	B
1019	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.208			Simpang Empat	B
102	DPU	Saluran	12/31/2					Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
0	Simpang Empat	Drainase	012		0.294			Empat	
1021	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.236			Simpang Empat	B
1022	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.279			Simpang Empat	B
1023	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.186		86.58	Simpang Empat	B
1024	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.272			Simpang Empat	B
1025	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.236			Simpang Empat	B
1026	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.347		267.38	Simpang Empat	B
1027	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.219			Simpang Empat	B
1028	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.065			Simpang Empat	B
1029	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.131			Simpang Empat	B
1030	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.192			Simpang Empat	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
1031	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.147			Simpang Empat	B
1032	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.287			Simpang Empat	B
1033	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.114			Simpang Empat	B
1034	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		1.012	1.25		Simpang Empat	B
1035	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.448	1.2		Simpang Empat	B
1036	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.288	1.6		Simpang Empat	B
1037	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2012		0.012			Simpang Empat	B
1038	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1039	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1040	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1041	DPU Simpang	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
1042	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1043	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1044	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1045	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1046	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1047	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1048	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1049	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1050	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1051	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
105	DPU	Saluran	12/31/2013					Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
2	Simpang Empat	Drainase	013					Empat	
1053	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1054	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1055	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1056	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1057	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1058	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1059	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1060	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1061	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1062	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
1063	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1064	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1065	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1066	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1067	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1068	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1069	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1070	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1071	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1072	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1073	DPU Simpang	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
1074	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1075	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1076	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1077	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1078	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1079	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1080	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1081	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1082	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B
1083	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	12/31/2013					Simpang Empat	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
1084	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	6/19/2014		0.128	1		Simpang Empat	B
1085	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	8/15/2014		0.150	1.1		Simpang Empat	B
1086	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	7/1/2014		0.102	1.2		Simpang Empat	B
1087	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	7/1/2014		0.414	1.2		Simpang Empat	B
1088	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	6/19/2014		0.384	1		Simpang Empat	B
1089	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	6/19/2014		0.255	2.75		Simpang Empat	B
1090	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	6/19/2014		0.424	1		Simpang Empat	B
1091	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	7/11/2014					Simpang Empat	B
1092	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	7/11/2014		0.589	1		Simpang Empat	B
1093	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	7/21/2014		0.151	1		Simpang Empat	B
1094	DPU Simpang	Saluran Drainase	7/21/2014		0.201	1.1		Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	Empat								
1095	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	7/21/2014		366.000	1.1		Simpang Empat	B
1096	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	7/21/2014		0.758	1.1		Simpang Empat	B
1097	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	8/4/2014		0.270	1		Simpang Empat	B
1098	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	8/4/2014		0.152	2.5		Simpang Empat	B
1099	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	8/4/2014		0.475	1.2		Simpang Empat	B
1100	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	8/4/2014		0.246	1.8		Simpang Empat	B
1101	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	8/4/2014		0.200	1.1		Simpang Empat	B
1102	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	7/11/2014		0.320	1		Simpang Empat	B
1103	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	7/11/2014		0.334	1.1		Simpang Empat	B
1104	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	9/1/2014		0.176	1		Simpang Empat	B
110	DPU	Saluran	11/3/20			1.1		Simpang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
5	Simpang Empat	Drainase	14		0.513			Empat	
1106	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	11/3/2014		0.286	1.1		Simpang Empat	B
1107	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	11/3/2014		0.198	1		Simpang Empat	B
1108	DPU Simpang Empat	Saluran Drainase	2/14/2014					Simpang Empat	B
1109	DPU Simpang Empat	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2012					Simpang Empat	B
1110	DPU Simpang Empat	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2012					Simpang Empat	B
1111	DPU Simpang Empat	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2010	beton	0.010	10	100	Simpang Empat	B
1112	DPU Simpang Empat	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2011					Simpang Empat	B
1113	DPU Simpang Empat	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	12/31/2013					Simpang Empat	B
1114	DPU Simpang Empat	Jaringan Pembawa Kapasitas	11/7/2014					Simpang Empat	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
		Sedang							
1115	DPU Simpang Empat	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1/28/2014		0.018	16		Simpang Empat	B
1116	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	1.569	3.5		Karang Bintang	B
1117	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	1.569	3.5		Karang Bintang	B
1118	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Agregat	5.433	4		Karang Bintang	B
1119	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Karang Bintang	B
1120	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.337	3		Karang Bintang	B
1121	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.392	3		Karang Bintang	B
1122	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/30/2011	Aspal	14.864	5.5		Karang Bintang	B
1123	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	5.500	5		Karang Bintang	B
1124	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.803	4.5		Karang Bintang	B
1125	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/18/2013	Aspal	0.907	4		Karang Bintang	B
1126	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/18/2013	Aspal	0.383	4		Karang Bintang	B
1127	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/14/2012	Aspal	1.580	4		Karang Bintang	B
1128	DPU Karang	Jalan Kab.	12/31/2	Agregat		5		Karang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
8	Bintang	Lokal	012		4.287			Bintang	
1129	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	1.191	4		Karang Bintang	B
1130	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.700	4		Karang Bintang	B
1131	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/27/2012	Aspal	0.715	5		Karang Bintang	B
1132	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.540	3.5		Karang Bintang	B
1133	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/30/2011	Aspal/Beton	5.407	5.5		Karang Bintang	B
1134	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	5.850	5.5		Karang Bintang	B
1135	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	3.108	4		Karang Bintang	B
1136	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	2.100	3		Karang Bintang	B
1137	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	2.776	4		Karang Bintang	B
1138	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.600	5		Karang Bintang	B
1139	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.800	4		Karang Bintang	B
1140	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/18/2012	Aspal	0.280	5.5		Karang Bintang	B
1141	DPU Karang Bintang	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.200	5		Karang Bintang	B
1142	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.171	3	514.02	Karang Bintang	B
1143	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.622	5		Karang Bintang	B
1144	DPU Karang	Jalan Desa	12/31/2	Agregat		4		Karang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
4	Bintang		011		0.100			Bintang	
1145	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.700	4		Karang Bintang	B
1146	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.700	4		Karang Bintang	B
1147	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2012		0.924	3	2772	Karang Bintang	B
1148	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2012		0.920	3	2760	Karang Bintang	B
1149	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2012		1.237	3	3711	Karang Bintang	B
1150	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2012		0.921	3	2763	Karang Bintang	B
1151	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2012		0.750	3	2250	Karang Bintang	B
1152	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2012		0.900	3	2700	Karang Bintang	B
1153	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2012		0.164	3.5	574	Karang Bintang	B
1154	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2012		0.921	3	2763	Karang Bintang	B
1155	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2013	Agregat	1.400	4.5		Karang Bintang	B
1156	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2013	pas batu, base c	0.281	3.74286	1051.742857	Karang Bintang	B
1157	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2013		0.875	3	2625	Karang Bintang	B
1158	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2013		1.000	3	3000	Karang Bintang	B
1159	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.219	4	877.4	Karang Bintang	B
116	DPU Karang	Jalan Desa	12/31/2			4	4000	Karang	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
0	Bintang		013		1.000			Bintang	
1161	DPU Karang Bintang	Jalan Desa	12/31/2013		0.600	4	2400	Karang Bintang	B
1162	DPU Karang Bintang	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		2,278.000	4		Karang Bintang	B
1163	DPU Karang Bintang	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		2,278.000	4		Karang Bintang	B
1164	DPU Karang Bintang	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		2,278.000	4		Karang Bintang	B
1165	DPU Karang Bintang	Jalan Khusus Komplek	9/17/2014		2,278.000	4		Karang Bintang	B
1166	DPU Karang Bintang	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		2,278.000	4		Karang Bintang	B
1167	DPU Karang Bintang	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.515	4		Karang Bintang	B
1168	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2012		4.000	4		Karang Bintang	B
1169	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2012		4.500	5		Karang Bintang	B
1170	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2012		6.000	6		Karang Bintang	B
1171	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2012		0.006	5.5		Karang Bintang	B
1172	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2012		0.030	0.6		Karang Bintang	B
1173	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2013					Karang Bintang	B
1174	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2013					Karang Bintang	B
1175	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2013					Karang Bintang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1176	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2013					Karang Bintang	B
1177	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2013					Karang Bintang	B
1178	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2013					Karang Bintang	B
1179	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2013					Karang Bintang	B
1180	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2013					Karang Bintang	B
1181	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	12/31/2013					Karang Bintang	B
1182	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	9/16/2014		0.006	5.1		Karang Bintang	B
1183	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	10/1/2014		0.002	8		Karang Bintang	B
1184	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	11/3/2014		0.005	5		Karang Bintang	B
1185	DPU Karang Bintang	Jembatan Baja	11/21/2014		0.050	9.2		Karang Bintang	B
1186	DPU Karang Bintang	Jembatan Baja	10/29/2014		0.030	8		Karang Bintang	B
1187	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	3/13/2014		0.005	6.9	35.88	Karang Bintang	B
1188	DPU Karang Bintang	Jembatan Beton	6/16/2014		0.004	6.6	23.76	Karang Bintang	B
1189	DPU Karang Bintang	Saluran Sekunder	12/31/2006	Galian Tanah	1.500	1	0.5	Karang Bintang	B
1190	DPU Karang Bintang	Saluran Sekunder	12/31/2006	Galian Tanah	1.000	1	0.5	Karang Bintang	B
1191	DPU Karang Bintang	Saluran Sekunder	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	1.014	2	1.5	Karang Bintang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
119 2	DPU Karang Bintang	Saluran Sekunder	12/31/2007	Pasangan Batu	0.718	2	1.5	Karang Bintang	B
119 3	DPU Karang Bintang	Saluran Sekunder	12/31/2012		0.302	0.2	1.2	Karang Bintang	B
119 4	DPU Karang Bintang	Saluran Sekunder	12/31/2013		0.025			Karang Bintang	B
119 5	DPU Karang Bintang	Saluran Induk Pembuang	12/31/2012		2.740	9	1.8	Karang Bintang	B
119 6	DPU Karang Bintang	Saluran Sekunder Pembuang	12/31/2007	Pasangan Batu	0.600	2.5	1.5	Karang Bintang	B
119 7	DPU Karang Bintang	Tanggul Banjir	12/31/2009	tanggul dan pintu ai	0.200	0.45	1	Karang Bintang	B
119 8	DPU Karang Bintang	Tanggul Banjir	12/31/2009	tanggul	1.200	2	0.5	Karang Bintang	B
119 9	DPU Karang Bintang	Tanggul Banjir	12/31/2012		0.332	0.25	0.5	Karang Bintang	B
120 0	DPU Karang Bintang	BangunanGot Miring	12/31/2011					Karang Bintang	B
120 1	DPU Karang Bintang	Saluran Drainase	12/31/2013					Karang Bintang	B
120 2	DPU Karang Bintang	Saluran Drainase	12/31/2013					Karang Bintang	B
120 3	DPU Karang Bintang	Saluran Drainase	7/1/2014		0.468	1		Karang Bintang	B
120 4	DPU Karang Bintang	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	10/1/2014		0.003	6		Karang Bintang	B
120 5	DPU Karang Bintang	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2008	Pipa PVC,Reservoar ,i	1,658.000			Karang Bintang	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1206	DPU Karang Bintang	#REF!	12/31/2007	Pipa PVC, Reservoir, i	2,034.000			Karang Bintang	RB
1207	DPU Karang Bintang	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	12/31/2012					Karang Bintang	B
1208	DPU Mantewe	Jalan Kab. Lokal	12/31/2010	Agregat	5.500	4		Mantewe	B
1209	DPU Mantewe	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Agregat	4.658	4		Mantewe	B
1210	DPU Mantewe	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.627	3		Mantewe	B
1211	DPU Mantewe	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.350	3		Mantewe	B
1212	DPU Mantewe	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.627	3		Mantewe	B
1213	DPU Mantewe	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.300	3		Mantewe	B
1214	DPU Mantewe	Jalan Kab. Lokal	11/20/2012	Aspal	0.499	6		Mantewe	B
1215	DPU Mantewe	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	4.656	6		Mantewe	B
1216	DPU Mantewe	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	3.281	4		Mantewe	B
1217	DPU Mantewe	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	2.400	5.5	13200	Mantewe	B
1218	DPU Mantewe	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	2.400	4		Mantewe	B
1219	DPU Mantewe	Jalan Desa	12/31/2012		0.837	3	2511	Mantewe	B
122	DPU	Jalan Desa	12/31/2	Pasangan		3	1665	Mantewe	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
0	Mantewe		012	Batu, Base	0.555				
1221	DPU Mantewe	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.471	4	1885.92	Mantewe	B
1222	DPU Mantewe	Jalan Desa	12/31/2013	base course	1.500	3	4500	Mantewe	B
1223	DPU Mantewe	Jalan Desa	12/31/2013	base course	0.700	4	2800	Mantewe	B
1224	DPU Mantewe	Jalan Desa	12/31/2013	base course	0.989	4	3956	Mantewe	B
1225	DPU Mantewe	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.455	4	1820	Mantewe	B
1226	DPU Mantewe	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.567	3.5	1984.5	Mantewe	B
1227	DPU Mantewe	Jalan Desa	12/31/2013	base course	1.350	4	5400	Mantewe	B
1228	DPU Mantewe	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		2.278	4		Mantewe	B
1229	DPU Mantewe	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		2.278	4		Mantewe	B
1230	DPU Mantewe	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		2.278	4		Mantewe	B
1231	DPU Mantewe	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		2.278	4		Mantewe	B
1232	DPU Mantewe	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		2.278	4		Mantewe	B
1233	DPU Mantewe	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		2.278	4		Mantewe	B
1234	DPU Mantewe	Jembatan Beton	12/31/2012		0.012	5		Mantewe	B
1235	DPU Mantewe	Jembatan Beton	12/31/2012		4.000	5		Mantewe	B
123	DPU	Jembatan	12/31/2			1		Mantewe	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
6	Mantewe	Beton	012		0.080				
123	DPU	Jembatan	12/31/2					Mantewe	B
7	Mantewe	Beton	013						
123	DPU	Jembatan	12/31/2					Mantewe	B
8	Mantewe	Beton	013						
123	DPU	Jembatan	12/31/2					Mantewe	B
9	Mantewe	Beton	013						
124	DPU	Jembatan	12/31/2					Mantewe	B
0	Mantewe	Beton	013						
124	DPU	Jembatan	12/31/2					Mantewe	B
1	Mantewe	Beton	013						
124	DPU	Jembatan	10/1/20					Mantewe	B
2	Mantewe	Beton	14		0.004	6			
124	DPU	Jembatan	6/2/201					Mantewe	B
3	Mantewe	Beton	4		0.007	6.95	48.3		
124	DPU	Jembatan	6/2/201					Mantewe	B
4	Mantewe	Beton	4		0.008	7	55.3		
124	DPU	Jembatan	6/2/201					Mantewe	B
5	Mantewe	Beton	4		0.010	7.1	69.94		
124	DPU	Jembatan	6/2/201					Mantewe	B
6	Mantewe	Beton	4		0.009	7	65.38		
124	DPU	Jembatan	8/1/201					Mantewe	B
7	Mantewe	Beton	4		30.008	5.7	21.38		
124	DPU	Saluran	12/31/2					Mantewe	B
8	Mantewe	Drainase	012						
124	DPU	Saluran	12/31/2					Mantewe	B
9	Mantewe	Drainase	013						
125	DPU	Saluran	12/31/2					Mantewe	B
0	Mantewe	Drainase	013						
125	DPU	Saluran	12/31/2					Mantewe	B
1	Mantewe	Drainase	013						

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1252	DPU Mantewe	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2009					Mantewe	B
1253	DPU Mantewe	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2010	Pipa PVC,Reservoar ,i	2,100.000			Mantewe	B
1254	DPU Mantewe	#REF!	12/31/2007	Pipa PVC,Reservoar ,i	1,383.000			Mantewe	RB
1255	DPU Mantewe	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	12/31/2008	Pipa PVC,Reservoar ,i	1,658.000			Mantewe	B
1256	DPU Angsana	Jalan Kab. Lokal	12/31/2009	Agregat	2.598	4		Angsana	B
1257	DPU Angsana	Jalan Kab. Lokal	12/31/2010	Agregat	3.659	4		Angsana	B
1258	DPU Angsana	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Agregat	4.085	5		Angsana	B
1259	DPU Angsana	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Agregat	3.760	4		Angsana	B
1260	DPU Angsana	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.950	4		Angsana	B
1261	DPU Angsana	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.308	4		Angsana	B
1262	DPU Angsana	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	7.699	4		Angsana	B
1263	DPU Angsana	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	5.248	4		Angsana	B
126	DPU	Jalan Kab.	12/31/2	Agregat		5		Angsana	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
4	Angsana	Lokal	013		2.850				
1265	DPU Angsana	Jalan Kab. Lokal	12/27/2 012	Aspal	0.832	4		Angsana	B
1266	DPU Angsana	Jalan Desa	12/31/2 012		0.505	3.8	1919	Angsana	B
1267	DPU Angsana	Jalan Desa	12/31/2 013	Base Course	0.750	5	3750	Angsana	B
1268	DPU Angsana	Jalan Desa	12/31/2 013	Pasangan Batu, Base	0.219	4	877.4	Angsana	B
1269	DPU Angsana	Jalan Desa	12/31/2 013	Base Course	0.710	3.5	2485	Angsana	B
1270	DPU Angsana	Jalan Desa	12/31/2 013	Base Course	0.750	5	3750	Angsana	B
1271	DPU Angsana	Jalan Khusus Komplek	7/1/201 4		1.012	4		Angsana	B
1272	DPU Angsana	Jalan Khusus Komplek	7/1/201 4		1.012	4		Angsana	B
1273	DPU Angsana	Jalan Khusus Komplek	8/15/20 14		1.012	4		Angsana	B
1274	DPU Angsana	Jalan Khusus Komplek	10/1/20 14		1.012	4		Angsana	B
1275	DPU Angsana	Jalan Khusus Komplek	11/3/20 14		1.012	4		Angsana	B
1276	DPU Angsana	Jalan Khusus Komplek	7/1/201 4		1.012	4		Angsana	B
1277	DPU Angsana	Jembatan Beton	12/31/2 012		0.006	4.5		Angsana	B
1278	DPU Angsana	Jembatan Beton	12/31/2 012		1.200	6		Angsana	B
1279	DPU Angsana	Jembatan Beton	12/31/2 012		0.006	5.5		Angsana	B
128	DPU	Jembatan	12/31/2					Angsana	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
0	Angsana	Beton	013						
128	DPU	Jembatan	12/31/2					Angsana	B
1	Angsana	Beton	013						
128	DPU	Jembatan	12/31/2					Angsana	B
2	Angsana	Beton	013						
128	DPU	Jembatan	12/31/2					Angsana	B
3	Angsana	Beton	013						
128	DPU	Jembatan	12/31/2					Angsana	B
4	Angsana	Beton	013						
128	DPU	Jembatan	12/31/2					Angsana	B
5	Angsana	Beton	013						
128	DPU	Jembatan	12/31/2					Angsana	B
6	Angsana	Beton	013						
128	DPU	Jembatan	12/31/2					Angsana	B
7	Angsana	Beton	013						
128	DPU	Saluran Induk	12/31/2	Galian Tanah(alat)	3.600	2.5	1.5	Angsana	B
8	Angsana		007						
128	DPU	Saluran Induk	12/31/2	Galian Tanah (alat)	3.300	2.5	1.5	Angsana	B
9	Angsana		009						
129	DPU	Saluran Sekunder	12/31/2	Galia Tanah(alat) da	2.089	3	2	Angsana	B
0	Angsana		011						
129	DPU	Saluran Sekunder	12/31/2		2.860	2.2		Angsana	B
1	Angsana		013						
129	DPU	Saluran Sekunder	8/15/20		4.080	4.5		Angsana	B
2	Angsana		14						
129	DPU	Tanggul Banjir	12/31/2		0.164			Angsana	B
3	Angsana		013						
129	DPU	BangunanGot Miring	12/31/2					Angsana	B
4	Angsana		011						
129	DPU	BangunanGot Miring	12/31/2					Angsana	B
5	Angsana		011						
129	DPU	BangunanGot	12/31/2					Angsana	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
6	Angsana	Miring	011						
1297	DPU Angsana	Saluran Induk (Primer) Pembuang	12/31/2007	Galian Tanah(alat)	0.900	2.5	1.5	Angsana	B
1298	DPU Angsana	Pintu Air	12/31/2012		2.000	1		Angsana	B
1299	DPU Angsana	Pintu Air	12/31/2013			110	18	Angsana	B
1300	DPU Angsana	Saluran Drainase	12/31/2012		0.524		70.5	Angsana	B
1301	DPU Angsana	Saluran Drainase	12/31/2012		0.544		104.17	Angsana	B
1302	DPU Angsana	Saluran Drainase	12/31/2012		0.502		119.46	Angsana	B
1303	DPU Angsana	Saluran Drainase	12/31/2013					Angsana	B
1304	DPU Angsana	Saluran Drainase	12/31/2013					Angsana	B
1305	DPU Angsana	Saluran Drainase	12/31/2013					Angsana	B
1306	DPU Angsana	Saluran Drainase	12/31/2013					Angsana	B
1307	DPU Angsana	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	12/31/2011					Angsana	B
1308	DPU Angsana	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	12/31/2007	Pipa PVC,Reservoar ,i	0.763			Angsana	RB
1309	DPU Angsana	Jaringan Pembawa	7/11/2014		2.596	90		Angsana	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
		Kapasitas Sedang							
1310	DPU Kuranji	Jalan Kab. Lokal	12/31/2009		2.948	5		Kuranji	B
1311	DPU Kuranji	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Agregat	3.587	4		Kuranji	B
1312	DPU Kuranji	Jalan Kab. Lokal	12/27/2012	Aspal	5.581	4		Kuranji	B
1313	DPU Kuranji	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	3.420	4		Kuranji	B
1314	DPU Kuranji	Jalan Kab. Lokal	12/30/2013	Aspal	14.878	5		Kuranji	B
1315	DPU Kuranji	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kuranji	B
1316	DPU Kuranji	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	4		Kuranji	B
1317	DPU Kuranji	Jalan Desa	12/31/2012		0.300	4	1200	Kuranji	B
1318	DPU Kuranji	Jalan Desa	12/31/2012		1.305	3	3915	Kuranji	B
1319	DPU Kuranji	Jalan Desa	12/31/2012		0.867	3	2601	Kuranji	B
1320	DPU Kuranji	Saluran Sekunder	12/31/2012		2.480	2	1.5	Kuranji	B
1321	DPU Kuranji	Bangunan Waduk Pasang Surut	8/18/2014		0.183	103		Kuranji	B
1322	DPU Kuranji	Bangunan Waduk Pasang Surut	7/21/2014		0.122	93		Kuranji	B
1323	DPU Kuranji	Pintu Air	12/31/2012		2.000	1		Kuranji	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1324	DPU Kuranji	Pintu Air	12/31/2012		2.000	1		Kuranji	B
1325	DPU Kuranji	Pintu Air	12/31/2013					Kuranji	B
1326	DPU Kuranji	Saluran Drainase	12/31/2013					Kuranji	B
1327	DPU Kuranji	Bendung	12/31/2009	Galian Tanah (Alat )			3	Kuranji	B
1328	DPU Kuranji	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/31/2013					Kuranji	B
1329	DPU Kuranji	#REF!	12/31/2008	Pipa PVC,Reservoar ,i	3,316.000			Kuranji	RB
1330	DPU Kuranji	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	7/17/2014		0.250	30		Kuranji	B
1331	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2005	Aspal	0.500	4		Batulicin	B
1332	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2005	Aspal	0.030	10		Batulicin	B
1333	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2005	Agregat	2.000	30		Batulicin	B
1334	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	1.089	4		Batulicin	B
1335	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Agregat	0.196	3		Batulicin	B
1336	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.912	4		Batulicin	B
1337	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2008	Aspal	0.800	20		Batulicin	B

<b>NO</b>	<b>UPB</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tgl Perolehan</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>Panjang</b>	<b>Lebar</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
1338	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	8/3/2010	Aspal	1.423	4		Batulicin	B
1339	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.138	4		Batulicin	B
1340	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.362	3		Batulicin	B
1341	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.160	3		Batulicin	B
1342	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.560	3		Batulicin	B
1343	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.390	3		Batulicin	B
1344	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.370	3		Batulicin	B
1345	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.720	3		Batulicin	B
1346	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Agregat	0.200	3		Batulicin	B
1347	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Agregat	0.160	1		Batulicin	B
1348	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.350	3		Batulicin	B
1349	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.528	4		Batulicin	B
1350	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.455	4		Batulicin	B
1351	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.550	4		Batulicin	B
1352	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.400	4		Batulicin	B
1353	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/19/2007	Aspal	1.114	4		Batulicin	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1354	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	8/3/2010	Aspal	1.400	4		Batulicin	B
1355	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2012	Aspal	0.334	4		Batulicin	B
1356	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	5.910	10		Batulicin	B
1357	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	1.000	4		Batulicin	B
1358	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Beton	0.300	4		Batulicin	B
1359	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	11/25/2011	Aspal	3.230	4.5		Batulicin	B
1360	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Agregat	1.000	4		Batulicin	B
1361	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.173	5		Batulicin	B
1362	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.377	4		Batulicin	B
1363	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.320	4.5		Batulicin	B
1364	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.123	5		Batulicin	B
1365	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	12/31/2013	Aspal	0.163	6		Batulicin	B
1366	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	8/3/2010	Aspal	4.500	4		Batulicin	B
1367	DPU Batulicin	Jalan Kab. Lokal	7/27/2010	Aspal	0.640	3.5		Batulicin	B
1368	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2011		0.701	3	2103	Batulicin	B
1369	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2011		0.154	3	461.28	Batulicin	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1370	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2011		0.274	3	820.77	Batulicin	B
1371	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.400	4		Batulicin	B
1372	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.400	3		Batulicin	B
1373	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	3		Batulicin	B
1374	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2011	Agregat	0.200	3		Batulicin	B
1375	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2012	Beton	0.150	3	450	Batulicin	B
1376	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2012		0.325	3	975	Batulicin	B
1377	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2012		0.390	3	1170	Batulicin	B
1378	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2012	Lapis Pondasi Bawah	0.120	3	360	Batulicin	B
1379	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2012	Beton	0.190	2	380	Batulicin	B
1380	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.284	3	852	Batulicin	B
1381	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Beton	0.446	2.5	1115	Batulicin	B
1382	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course	0.416	4	1664	Batulicin	B
1383	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Beton, Pasangan Batu	0.069	3.7	255.3	Batulicin	B
1384	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Beton	0.215	3	645	Batulicin	B
138	DPU	Jalan Desa	12/31/2	Base Course,		2.92	484.72	Batulicin	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
5	Batulicin		013	Pasanga	0.166				
1386	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course, Pasanga	0.138	3.3	455.4	Batulicin	B
1387	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course, Pasanga	0.327	6	1962	Batulicin	B
1388	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course, Pasanga	0.389	3.9	1517.1	Batulicin	B
1389	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course	1.310	4.12	5397.2	Batulicin	B
1390	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course, Pasanga	0.160	5	800	Batulicin	B
1391	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course, Pasanga	0.150	4.4	660	Batulicin	B
1392	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course	0.900	4	3600	Batulicin	B
1393	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Beton, Base Course	0.977	3.32	3243.64	Batulicin	B
1394	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course, Pasanga	0.997	4.06	4047.82	Batulicin	B
1395	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Beton	0.253	1.84	465.52	Batulicin	B
1396	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Base Course, Pasanga	0.253	2.08333	526.041667	Batulicin	B
1397	DPU Batulicin	Jalan Desa	12/31/2013	Pasangan Batu, Base	0.190	2.96	562.4	Batulicin	B
1398	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.191	3.5		Batulicin	B
1399	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	7/1/2014		0.186	4		Batulicin	B
1400	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	8/4/2014		0.287	4		Batulicin	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1401	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	8/15/2014		0.227	4		Batulicin	B
1402	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.989	4		Batulicin	B
1403	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	9/1/2014		0.513	4		Batulicin	B
1404	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.430	5		Batulicin	B
1405	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.221	4		Batulicin	B
1406	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.034	2.6		Batulicin	B
1407	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	11/3/2014		0.212	3.3		Batulicin	B
1408	DPU Batulicin	Jalan Khusus Komplek	6/19/2014		0.310	3		Batulicin	B
1409	DPU Batulicin	Saluran Induk	12/31/2009	Galian Tanah (alat)	1.100	2.5	2	Batulicin	B
1410	DPU Batulicin	Saluran Induk	12/31/2009	Galian tanah dan Pas	1.100	40	1	Batulicin	B
1411	DPU Batulicin	Saluran Sekunder	12/31/2008	Pintu Air			12	Batulicin	B
1412	DPU Batulicin	Saluran Sekunder	12/31/2010	Pintu Air ,Galian Ta	7.200	3	1.5	Batulicin	B
1413	DPU Batulicin	Saluran Sekunder	12/31/2011	Galia Tanah(alat)	1.900	4	2	Batulicin	B
1414	DPU Batulicin	Saluran Sekunder	12/31/2012		1.515	3.6	1.5	Batulicin	B
1415	DPU Batulicin	Saluran Sekunder	12/31/2013		1.850	2.3		Batulicin	B
1416	DPU Batulicin	Saluran Sekunder	10/1/2014		3.840	3		Batulicin	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1417	DPU Batulicin	Saluran Induk Pembuang	12/31/2012		1.370	5	0.9	Batulicin	B
1418	DPU Batulicin	Tanggul Banjir	12/31/2012		1.100	2	1	Batulicin	B
1419	DPU Batulicin	BangunanGot Miring	12/31/2011					Batulicin	B
1420	DPU Batulicin	BangunanGot Miring	12/31/2011					Batulicin	B
1421	DPU Batulicin	Bangunan Pengeluaran/ Pintu	12/31/2010	Pintu Air			1	Batulicin	B
1422	DPU Batulicin	Pintu Air	12/31/2009	Pintu Air			2	Batulicin	B
1423	DPU Batulicin	Pintu Air	12/31/2013					Batulicin	B
1424	DPU Batulicin	Pintu Air	12/31/2013			0.054	22	Batulicin	B
1425	DPU Batulicin	Bangunan Pembawa pengaman Sungai	12/31/2009	Pasangan Batu dan Go	0.603	0.3	1	Batulicin	B
1426	DPU Batulicin	Saluran Banjir	12/31/2009	Pintu Air, Galian Tan	0.980	2.5	2	Batulicin	B
1427	DPU Batulicin	Saluran Banjir	12/31/2009	Pasangan Batu	0.360	1	1	Batulicin	B
1428	DPU Batulicin	Saluran Drainase	12/31/2009	Pasangan Batu			1.6	Batulicin	B
1429	DPU Batulicin	Saluran Drainase	12/31/2012		0.256		68.24	Batulicin	B
1430	DPU Batulicin	Saluran Drainase	12/31/2012		1.675	1.2		Batulicin	B
143	DPU	Saluran	12/31/2					Batulicin	B

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1	Batulicin	Drainase	013						
143	DPU	Saluran	12/31/2					Batulicin	B
2	Batulicin	Drainase	013						
143	DPU	Saluran	12/31/2					Batulicin	B
3	Batulicin	Drainase	013						
143	DPU	Saluran	8/4/201			1.1		Batulicin	B
4	Batulicin	Drainase	4		0.246				
143	DPU	Saluran	11/3/20			1.1		Batulicin	B
5	Batulicin	Drainase	14		0.266				
143	DPU	Saluran	7/11/20			1		Batulicin	B
6	Batulicin	Drainase	14		0.500				
143	DPU	Saluran	8/4/201			1.1		Batulicin	B
7	Batulicin	Drainase	4		0.416				
143	DPU	Saluran	6/19/20			1		Batulicin	B
8	Batulicin	Drainase	14		0.470				
143	DPU	Tanggul	12/31/2	Galian		2	1.5	Batulicin	B
9	Batulicin	Banjir	007	Tanah(alat)	1.055				
144	DPU	Bangunan	8/15/20				800	Batulicin	B
0	Batulicin	Mandi Cuci Kakus (MCK)	14						
144	DPU	#REF!	12/31/2	Pipa				Batulicin	RB
1	Batulicin		008	PVC,Reservoar ,i	3,158.000				
144	DPU	Jaringan	12/31/2					Batulicin	B
2	Batulicin	Pembawa Kapasitas Kecil	009						
144	DPU	Jaringan	12/31/2	beton		6	60	Batulicin	B
3	Batulicin	Pembawa Kapasitas Kecil	010		0.010				
144	DINAS	Jalan Kab.	7/30/20	Aspal		5.5		Kusan Hulu	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lokal	15		7.152				
1445	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	9/15/2015	Beton	8.556	1		Kusan Hilir	b
1446	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	6/7/2015	Agregat	0.900	17		Batulicin	b
1447	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	6/7/2015	Agregat	0.582	10		Batulicin	b
1448	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	6/7/2015	Agregat	0.300	10		Batulicin	b
1449	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	5/27/2015	Aspal	0.499	6.5		Kusan Hilir	b
1450	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	Jalan Kab. Lokal	5/27/2015	Aspal	0.577	5.95		Kusan Hilir	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	PENATAAN RUANG								
1451	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/27/2015	Aspal	13.561	6		Kusan Hilir	B
1452	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	9/15/2015	Aspal	4.098	5.5		Karang Bintang	b
1453	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	9/15/2015	Aspal	4.200	5.5		Mantewe	B
1454	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Propinsi Lainnya	10/22/2015	Agregat	3.229	2		Simpang Empat	b
1455	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	2.696	5.5		Simpang Empat	b
1456	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.418	3.5		Simpang Empat	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1457	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	12/31/2011	Aspal	0.389	3.5		Simpang Empat	B
1458	DPU Simpang Empat	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.509	4		Simpang Empat	B
1459	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.598	3		Simpang Empat	b
1460	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.202	3		Simpang Empat	b
1461	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.355	3		Simpang Empat	b
1462	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.269	4		Simpang Empat	b
1463	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.460	4		Simpang Empat	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1464	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.440	3		Simpang Empat	b
1465	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.070	3		Simpang Empat	b
1466	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.193	3		Simpang Empat	b
1467	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.295	3		Simpang Empat	b
1468	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	8/9/2015	Aspal	0.268	5.5		Simpang Empat	b
1469	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Negara/Nasional Lainnya	10/28/2015	Agregat	2.890	2		Satui	b
1470	DINAS PEKERJAAN	Jalan Propinsi Lainnya	9/15/2015	Aspal	8.050	18		Simpang Empat	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1471	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	2.200	5		Sungai Loban	b
1472	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	9/18/2015	Aspal	1.340	5.5		Sungai Loban	B
1473	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	9/18/2015	Aspal	8.230	5.5		Sungai Loban	b
1474	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	9/12/2015	Aspal	4.700	5.5		Angsana	B
1475	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Aspal	0.394	0.6		Kusan Hilir	b
1476	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Perkerasan	0.165	3.5		Kusan Hilir	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	RUANG								
1477	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Perkerasan	0.027	3.5		Kusan Hilir	b
1478	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Perkerasan	0.118	3.5		Kusan Hilir	b
1479	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Aspal	1.728	5		Kusan Hilir	B
1480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	12/15/2015	Aspal	1.050	4		Angsana	b
1481	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	12/15/2015	Aspal	3.400	4		Angsana	b
1482	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.550	4		Kuranji	b
148	DINAS	Jalan Kab.	10/22/2	Agregat		4		Kuranji	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lokal	015		0.100				
1484	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	1.307	4		Kuranji	b
1485	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.623	4		Karang Bintang	b
1486	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.154	4		Karang Bintang	b
1487	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.300	4		Karang Bintang	b
1488	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.175	4		Karang Bintang	b
1489	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	1.092	4		Karang Bintang	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	PENATAAN RUANG								
1490	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	1.332	4		Karang Bintang	b
1491	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.800	4.5		Kusan Hulu	b
1492	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	1.037	4.5		Kusan Hulu	b
1493	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.920	4.5		Kusan Hulu	b
1494	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Aspal	0.420	3		Batulicin	b
1495	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Aspal	0.131	3		Batulicin	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1496	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Aspal	0.110	3		Batulicin	b
1497	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Aspal	0.120	3.5		Batulicin	b
1498	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.640	4		Sungai Loban	b
1499	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.650	4		Sungai Loban	b
1500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.216	4		Sungai Loban	b
1501	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.345	4		Sungai Loban	b
1502	DINAS PEKERJAAN	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.200	4		Sungai Loban	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1503	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.150	4		Sungai Loban	b
1504	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.322	4.5		Angsana	b
1505	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.202	4.3		Angsana	b
1506	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.123	4.5		Angsana	b
1507	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.200	4.25		Angsana	b
1508	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.036	4.3		Angsana	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	RUANG								
1509	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.550	5		Angsana	b
1510	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.206	3		Angsana	b
1511	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.384	4		Angsana	b
1512	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.080	3		Angsana	b
1513	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.201	3		Angsana	b
1514	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.202	4.7		Angsana	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1515	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/22/2015	Agregat	0.600	3.5		Angsana	b
1516	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/28/2015	Agregat	0.455	3		Satui	b
1517	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/28/2015	Agregat	0.500	3		Satui	b
1518	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/28/2015	Agregat	1.650	3		Satui	b
1519	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/28/2015	Agregat	1.000	3		Satui	b
1520	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/28/2015	Agregat	0.329	3		Satui	b
1521	DINAS PEKERJAAN	Jalan Kab. Lokal	10/28/2015	Agregat	0.160	3		Satui	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	UMUM DAN PENATAAN RUANG								
152 2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	10/28/2015	Agregat	0.300	3		Satui	b
152 3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	9/6/2015	Aspal	2.250	5.5		Sungai Loban	b
152 4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kab. Lokal	2/10/2015	Aspal	2.950	14		Batulicin	b
152 5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Negara/ Nasional Lainnya	7/9/2015	Aspal	2.000	10		Simpang Empat	b
152 6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Negara/ Nasional Lainnya	9/18/2015	Aspal	7.450	14		Batulicin	b
152 7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Jalan Kab. Lokal	12/23/2015	Aspal	1.120	154.6		Simpang Empat	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	RUANG								
1528	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan Beton	12/22/2015	Beton	0.026	7.44		Kuranji	b
1529	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan Beton	12/22/2015	Beton	0.026	7.44		Kuranji	b
1530	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan Beton	12/22/2015	Beton	0.031	7.44		Kuranji	b
1531	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan Kayu	10/4/2015	Kayu	0.147	2		Kusan Hilir	b
1532	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan Kayu	10/4/2015	Kayu	0.186	1.9		Kusan Hilir	b
1533	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan Beton	9/4/2015	Beton	0.001	3		Kusan Hilir	b
153	DINAS	Jembatan	9/4/201	Kayu		5,75		Kusan Hilir	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kayu	5		0.147				
1535	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan Beton	10/4/2015	Beton	0.003	6		Simpang Empat	b
1536	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan Kayu	8/20/2015	Kayu	0.022	3		Batulicin	b
1537	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan Beton	6/12/2015	Beton	0.007	3.1		Batulicin	b
1538	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/13/2015	Beton	0.161	3		Simpang Empat	b
1539	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/27/2015	Beton	0.425	5		Simpang Empat	b
1540	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	Jalan Khusus Komplek	4/5/2015	Beton	0.664	4		Simpang Empat	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	PENATAAN RUANG								
1541	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/13/2015	Beton	0.105	3.69		Simpang Empat	b
1542	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/13/2015	Beton	0.163	3		Simpang Empat	b
1543	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/13/2015	Beton	0.382	5		Simpang Empat	b
1544	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/13/2015	Beton	1,414.000	4.2		Simpang Empat	b
1545	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/13/2015	Beton	0.264	4.3		Simpang Empat	b
1546	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	5/6/2015	Beton	0.177	4		Simpang Empat	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1547	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	10/14/2015	Beton	0.227	3		Simpang Empat	b
1548	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	10/27/2015	Beton	0.221	4.5		Simpang Empat	b
1549	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	10/23/2015	Beton	0.218	3		Simpang Empat	b
1550	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	10/23/2015	Beton	0.104	4		Simpang Empat	b
1551	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	10/23/2015	Beton	0.302	4.32		Simpang Empat	b
1552	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	7/27/2015	Beton	0.263	4		Simpang Empat	b
1553	DINAS PEKERJAAN	Jalan Khusus Komplek	1/10/2015	Beton	0.168	3		Simpang Empat	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1554	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	1/10/2015	Beton	0.115	3		Simpang Empat	b
1555	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	10/23/2015	Beton	0.290	3.5		Simpang Empat	b
1556	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	11/12/2015	Beton	0.180	3.5		Simpang Empat	b
1557	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Drainase	11/12/2015	Beton	0.180	0.5		Simpang Empat	b
1558	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/16/2015	Base coast	0.185	6		Kusan Hilir	b
1559	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/20/2015	Beton	0.397	4		Kusan Hilir	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	RUANG								
1560	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/20/2015	Beton	0.293	4		Kusan Hilir	b
1561	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/6/2015	Beton	1,785.000	2		Kusan Hilir	b
1562	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	4/6/2015	Beton	0.475	2.3		Kusan Hilir	b
1563	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	10/27/2015	Agregat	0.740	6		Kusan Hilir	b
1564	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	10/27/2015	Beton	0.253	3.5		Kusan Hilir	b
1565	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	7/27/2015	Beton	0.141	1.9		Kusan Hilir	b
156	DINAS	Jalan Khusus	7/27/20	Beton		6		Batulicin	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
6	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Komplek	15		0.380				
1567	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Khusus Komplek	5/10/2015	Agregat	1,117.500	6		Kusan Hulu	b
1568	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0.018	6	52.5	Sungai Loban	b
1569	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0,010	9	90	Sungai Loban	b
1570	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0,010	9	90	Simpang Empat	b
1571	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0.027	10.5		Kusan Hulu	b
1572	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0.028	11.5		Kusan Hulu	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	PENATAAN RUANG								
1573	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0.019	8	152	Angsana	b
1574	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0.019	7	66.5	Angsana	b
1575	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0.009	8	72	Satui	b
1576	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0.009	8	72	Satui	b
1577	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0.015	10.5	65.5	Mantewe	b
1578	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	12/30/2015	Beton	0.013	10	68.75	Mantewe	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
1579	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Drainase	10/14/2015	Beton	0.491	1		Kusan Hilir	b
1580	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Drainase	4/13/2015	Beton	0.343	0.5		Simpang Empat	b
1581	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Drainase	4/13/2015	Beton	0.513	1		Karang Bintang	b
1582	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Drainase	4/13/2015	Beton	0.444	1		Simpang Empat	b
1583	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Drainase	6/7/2015	Beton	0.534	1		Simpang Empat	b
1584	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Drainase	9/30/2015	Beton	0.172	0.5		Simpang Empat	b
1585	DINAS PEKERJAAN	Jaringan Distribusi	4/9/2015	Kabel	0.920			Batulicin	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tegangan dibawah 1 KVA							
1586	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Pengaman Pasang Surut Lainnya	9/21/2015	Beton	0.176	3		Kusan Hilir	b
1587	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Pengaman Pasang Surut Lainnya	8/19/2015	Beton	0.126	3		Kusan Hilir	b
1588	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	11/26/2015	Pasangan Batu	2.100	3,4		Kusan Hulu	b
1589	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	10/13/2015	Pasangan Batu	6.036	3.7		Kusan Hulu	b
1590	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	2/11/2015	Pasangan Batu	2.849	3.8		Kusan Hulu	b
1591	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	7/12/2015	Pasangan Batu	5.517	3		Kuranji	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	RUANG								
1592	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	7/9/2015	Pasangan Batu	2.285	3.8		Kusan Hulu	b
1593	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	10/16/2015	Pasangan Batu	0.418	0.27		Simpang Empat	b
1594	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	8/7/2015	Pasangan Batu	1.860	4		Satui	b
1595	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	12/10/2015	Pasangan Batu	4.000	3.5		Satui	b
1596	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	9/7/2015	Pasangan Batu	0.175	3		Kusan Hilir	b
1597	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	8/7/2015	Pasangan Batu	0.142	0.5		Kusan Hilir	b
159	DINAS	Saluran	6/22/20	Pasangan		0.5		Kusan Hilir	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
8	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sekunder	15	Batu	0.276				
1599	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	10/20/2015	Pasangan Batu	7.795	3.6		Kusan Hilir	b
1600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	10/20/2015	Pasangan Batu	0.285	0.3		Kusan Hilir	b
1601	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	10/16/2015	Pasangan Batu	3.309	4.3		Kusan Hilir	b
1602	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Waduk Penyimpanan Air Hujan	10/8/2015	Galian Tanah	0.005	3.5		Simpang Empat	b
1603	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Chekdam/ Penahan Sadimn	8/18/2015	Pasangan Batu	0.050	19		Mantewe	b
1604	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	Jaringan Pembawa Kapasitas	11/12/2015	Pipa GIP	4,212.000			Mantewe	b

NO	UPB	Uraian	Tgl Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Lokasi	Kondisi
	PENATAAN RUANG	Sedang							
1605	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	10/23/2015	Pipa GIP	0.024			Simpang Empat	b
1606	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pintu Air	11/30/2015	Besi	0.094	42		Kusan Hulu	b
1607	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Waduk Penyimpanan Air Hujan	9/11/2015	Galian Tanah	0.043	8.7		Kuranji	b
1608	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Penguat Tebing	1/12/2015	Pasangan Batu	0.049	2		Kusan Hilir	b
1609	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Waduk Penyimpanan Air Hujan	7/12/2015	Galian Tanah	0.054	27		Mantewe	b
1610	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Saluran Sekunder	7/12/2015	Pasangan Batu	1.280	7		Kusan Hulu	b

Sumber : Data Aset DPU Tahun 2015

## 2.3. Kinerja Pelayanan

### 2.3.1. Kondisi Infrastruktur

#### A. Jalan dan Jembatan

Pembangunan jaringan jalan dimaksudkan untuk mendukung konektivitas antar wilayah, antar pusat pelayanan dan akses terhadap sentra-sentra produksi dan permukiman penduduk. Panjang jalan di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 sebesar 1.811,82 Km, terdiri dari Jalan Nasional sebesar 225,70 Km (12,46 %), Jalan Kabupaten sebesar 1.039,99 Km (56,40 %) dan Jalan Desa sebesar 546,13 Km (30,14 %). Sementara itu untuk jalan dengan kewenangan provinsi tidak terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu karena jalan provinsi yang ada sebelumnya sudah meningkat menjadi kewenangan jalan nasional.

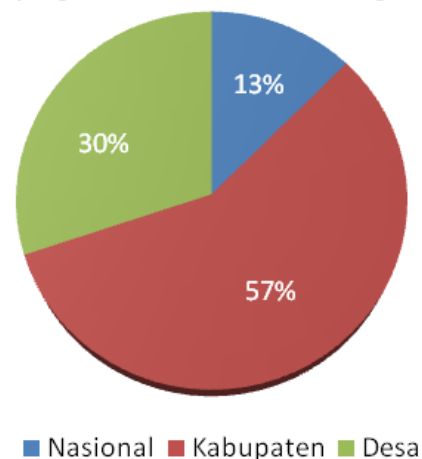
Tabel 2g.

Panjang Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu  
Berdasarkan Kewenangannya Tahun 2015

Kewenangan Jalan	Panjang (Km)	Presentase (%)
Nasional	225.70	12,46
Provinsi	-	-
Kabupaten	1.039,99	57,40
Desa	546,13	30,14
Total	1.811,82	100,00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Grafik 2.1.  
Panjang Jalan Menurut Kewenangannya



Jalan Nasional yang terdapat di ruas jalan kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 6 ruas jalan yaitu terdiri dari,

- Ruas Ds. Sei Cuka (Bts. Kab.Tanbu) - Sebamban
- Ruas Sebamban – Pagatan
- Ruas Pagatan – Batulicin
- Ruas Batulicin - Serongga (Bts. Kab. Kotabaru)
- Ruas Mantewe – Batulicin

f. Batas Kab Tanah Bumbu – Mantewe

Jalan kabupaten terdapat sebanyak 693 ruas jalan yang dibedakan atas 5 klasifikasi yaitu jalan kabupaten, jalan poros desa, jalan antar kecamatan, jalan lingkungan dan jalan perusahaan. Jumlah rusa terbanyak terdapat pada jalan kabupaten sebanyak 402 ruas dan jalan lingkungan sebanyak 186 ruas, sementara itu panjang jalan terbesar terdapat pada jalan poros desa yaitu sebanyak 418,90 Km dan jalan kabupaten sebanyak 291,30 Km. Jalan yang dibangun dan dikelola oleh perusahaan terdapat sebanyak 44,27 Km yang merupakan jalan perkebunan sawit, tambang dan pengusahaan hutan.

Tabel 2h.

Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Klasifikasinya di Kabupaten Tanah Bumbu  
Tahun 2015

Klasifikasi Jalan Kabupaten	Ruas Jalan		Panjang Jalan	
	Buah	%	Km	%
Jalan Kabupaten	402	58,01	291,30	28,01
Jalan Poros Desa	84	12,12	418,90	40,28
Jalan Antar Kecamatan	18	2,60	172,86	16,62
Jalan Lingkungan	186	26,84	112,66	10,83
Jalan Perusahaan	3	0,43	44,27	4,26
Total	693	100,00	1.039,99	100,00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Perkerasan jalan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 umumnya sudah memiliki jalan aspal sepanjang 693,07 Km (38,25 %) dan jalan agregat sepanjang 720,37 Km (39,76 %). Namun demikian jalan dengan perkerasan tanah masih cukup banyak yaitu sepanjang 348,65 Km (19,24 %).

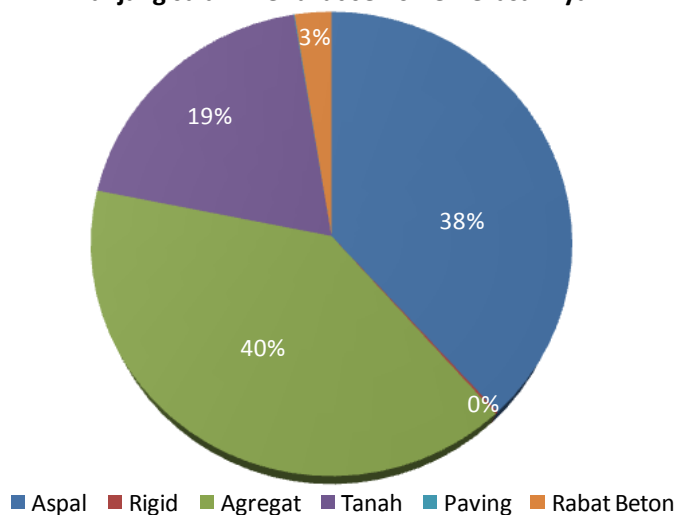
Tabel 2i.

## Panjang Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Perkerasannya Tahun 2015

Jenis Perkerasan	Jalan Nasional		Jalan Kabupaten		Jalan Desa		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Aspal	225.70	100	409.42	39.37	57.95	10.61	693,07	38,25
Rigid	-	-	2.62	0.2	0.08	0.01	2,70	0,15
Agregat	-	-	277.58	26.69	442.79	81.08	720,37	39,76
Tanah	-	-	325.85	31.33	22.80	4.18	348,65	19,24
Paving	-	-	1.01	0.10	0.00	0.00	1,01	0,06
Rabat Beton	-	-	23.51	2.26	22.51	4.12	46,02	2,54
Total	225.70	100	1.039,99	100	546,13	100	1.811,82	100

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

**Grafik 2.2.**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Perkerasannya**



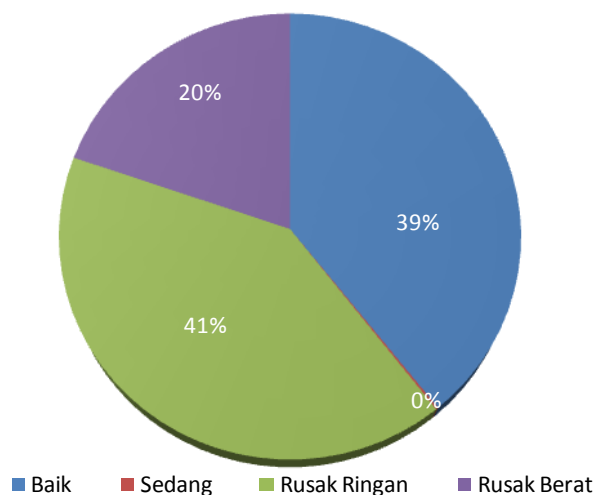
Ditinjau dari kondisinya lebih dari separuh jalan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 dalam kondisi rusak yaitu mencapai 1.069,02 Km (59 %), baik kategori rusak ringan (39,76 %) maupun rusak berat (19,24 %). Sedangkan jalan dengan kondisi baik mencapai 693,07 Km (38,25 %).

Tabel 2j.

## Panjang Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Kondisinya Tahun 2015

Jenis Perkerasan	Jalan Nasional		Jalan Kabupaten		Jalan Desa		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	145.20	64.33	272.10	26.16	30.84	5.65	693,07	38,25
Sedang	80.50	35.67	140.64	13.52	48.93	8.96	2,70	0,15
Rusak Ringan	0	0	557.06	53.56	460.42	84.31	720,37	39,76
Rusak Berat	0	0	70.19	6.75	5.93	1.09	348,65	19,24
Total	225.70	100	1.039,99	100	546,13	100	1.811,82	100

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Grafik 2.3.  
Panjang Jalan Menurut Kondisinya

Perkerasan jalan dan kondisi jalan untuk setiap klasifikasi jalan kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2h.

## Panjang Perkerasan Jalan Kabupaten Menurut Klasifikasinya di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

Jenis Perkerasan	Jalan Kabupaten		Jalan Poros Desa		Jalan Antar Kecamatan		Jalan Lingkungan/Desa		Jalan Perusahaan	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%

Aspal	167.6 1	57.5 4	107.73	25.7 2	117.2 2	67.8 1	16.87	14.9 7	0.00	0.00
Rigid	0.62	0.21	0.00	0.00	2.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Agregat	27.44	9.42	138.15	32.9 8	25.09	14.5 1	80.23	71.2 2	6.67	15.0 7
Tanah	75.27	25.8 4	173.02	41.3 0	28.55	16.5 2	11.41	10.1 3	37.60	84.9 3
Paving	1.01	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rabat Beton	19.36	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	3.68	0.00	0.00
Total	225.7 0	100	1.039,9 9	100	546,1 3	100	1.811,8 2	100	44,27	100

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Tabel 2i.

Panjang Kondisi Jalan Kabupaten Menurut Klasifikasinya di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

Jenis Perkerasan	Jalan Kabupaten		Jalan Poros Desa		Jalan Antar Kecamatan		Jalan Lingkungan/Desa		Jalan Perusahaan	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	109.4 6	37.5 8	68.95	16.4 6	91.49	52.9 3	2.20	1.95	0.00	0.00
Sedang	78.12	26.8 2	31.81	7.59	27.73	16.0 4	2.98	2.65	0.00	0.00
Rusak Ringan	103.5 7	35.5 5	287.63	68.6 6	53.64	31.0 3	104.45	92.7 1	7.77	17.5 5
Rusak Berat	0.15	0.05	30.51	7.28	0.00	0.00	3.03	2.69	36.50	82.4 5
Total	225.7 0	100	1.039,9 9	100	546,13	100	1.811,8 2	100	44,27	100

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Pembangunan, peningkatan ataupun pemeliharaan jalan dilakukan setiap tahun pada jalan kabupaten dan jalan desa yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Selama 5 tahun terakhir telah dilakukan penanganan maupun pembangunan jalan sepanjang

Tabel 2j.  
Pembangunan/Peningkatan/  
Pemeliharaan Jalan di Kabupaten  
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan (Km)
2011	103.00
2012	353.24
2013	444.70
2014	11,473.26
2015	4,444.08
Total	16,927.45

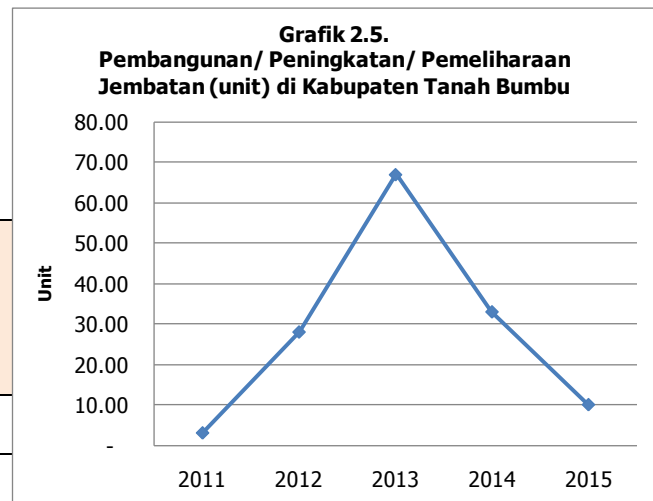
Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu



Untuk menunjang aksesibilitas jalan dan keterjangkauan antar kawasan, dilakukan pembangunan atau pemeliharaan beberapa jembatan sebanyak 141 lokasi selama kurun waktu tahun 2011-2015 yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 2k.  
Pembangunan/ Peningkatan/  
Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten  
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan (lokasi)
2011	3.00



2012	28.00
2013	67.00
2014	33.00
2015	10.00
Total	141.00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

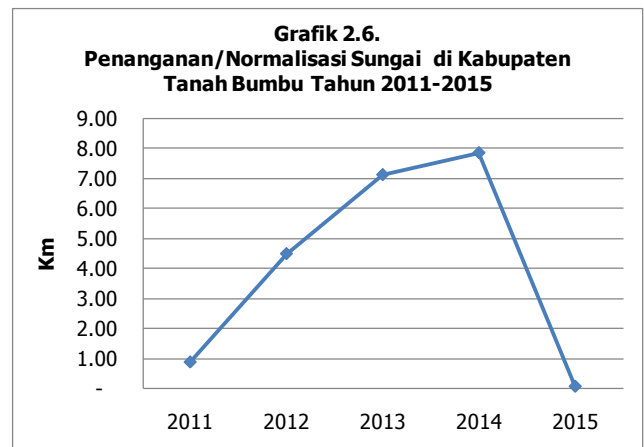
## B. Sumber Daya Air

Sungai yang ada di kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 164 sungai yang tersebar di 10 kecamatan dengan panjang 694,796.8 m. terdapat 2 sungai besar di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Sungai Batulicin, Sungai Kusan dan Sungai Satu. terdapat 22 DAS di Kabupaten Tanah Bumbu (Keppres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai) dengan luas das sebesar 4.791,38 Km<sup>2</sup>

Tabel 2l.

Penanganan / Normalisasi Sungai di  
Kabupaten Tanah Bumbu  
Tahun 2011-2015

Tahun	Penanganan/Normalisasi Sungai (Km)
2011	0.86
2012	4.48
2013	7.11
2014	7.85
2015	0.05



Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan kewenangannya terdapat Daerah Irigasi Batulicin seluas 3010 Ha yang menjadi kewenangan pusat, sebanyak 38 Daerah Irigasi dengan luas 14.472 Ha yang menjadi kewenangan kabupaten, Daerah Irigasi Rawa Parit Kanan/Kiri

Pagatan – Batulicin seluas 2000 Ha yang menjadi kewenangan propinsi dan 28 Daerah Irigasi Rawa seluas 7.366 Ha yang menjadi kewenangan kabupaten.

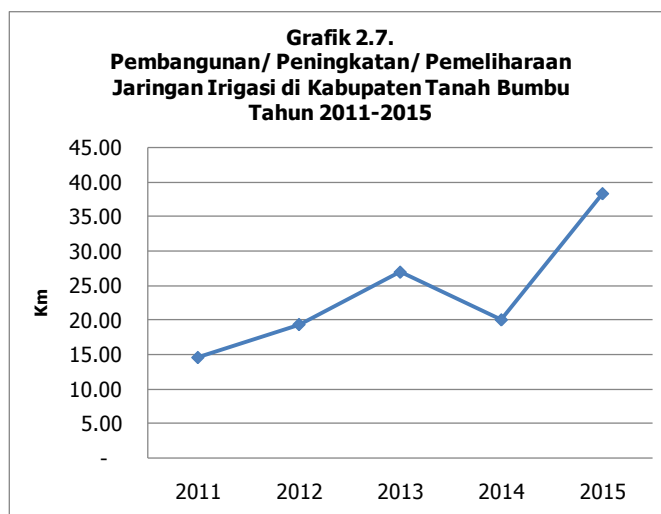
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah dilaksanakan pembangunan atau pemeliharaan terhadap jaringan rigasi sepanjang 209,31 Km yang dilaksanakan secara rutin pada setiap tahunnya dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2m.

Pembangunan/ Peningkatan/  
Pemeliharaan Jaringan Irigasi  
di Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Irigasi (Km)
2011	14.60
2012	19.38
2013	26.96
2014	20.05
2015	38.33
Total	209.31



Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Perkembangan kinerja sektor sumber daya air lainnya adalah pembangunan saluran pembuang, baik saluran pembuang utama maupun sekunder, dengan panjang saluran yang berhasil dibangun atau dilakukan pemeliharaan sebanyak 13,76 Km yang dilaksanakan pada tahun 2012 hingga tahun 2014, sementara tahun 2015 tidak ada kegiatan pembangunan/pemeliharaan saluran pembuangan

Tabel 2n.  
Pembangunan/ Pemeliharaan  
Saluran Pembuang di Kabupaten  
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Pemeliharaan Saluran Pembuang (Km)
2011	-
2012	2.74
2013	7.57
2014	1.95
2015	-
Total	13.76

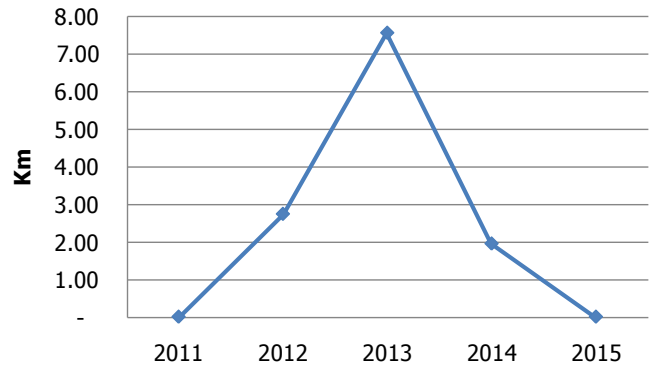
Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Terkait dengan pengembangan jaringan rogasi adalah pembangunan/pemeliharaan bangunan pintu air yang telah dilaksanakan sebanyak 32 lokasi pintu air selama 5 tahun terakhir, dengan perkembangan sebagai berikut :

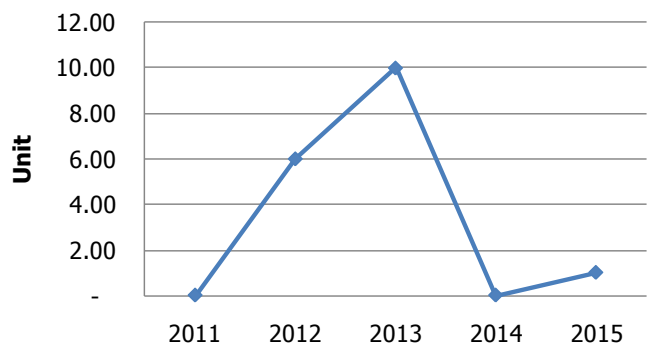
Tabel 2o.  
Pembangunan / Pemeliharaan  
Bangunan Pintu Air di Kabupaten  
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/Pemeliha raan Bangunan Pintu Air (unit)
2011	-
2012	6.00
2013	10.00
2014	-

**Grafik 2.8.**  
**Pembangunan/ Pemeliharaan Saluran**  
**Pembuang di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun**  
**2011-2016**



**Grafik 2.9.**  
**Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan**  
**Pintu Air di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun**  
**2011-2015**



2015	1.00
Total	32.00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 2 buah bendung yaitu Bendung Karang Bintang dan Bendung Gunung Tinggi yang berfungsi untuk melayani sistem irigasi teknis yang ada. Selain itu terdapat juga 92 embung yang tersebar diseluruh kecamatan yang dimanfaatkan untuk fungsi air baku air bersih, pertanian, perikanan dan lainnya. Potensi air permukaan lainnya adalah berupa waduk Terdapat 1 buah waduk yaitu Waduk Kodeco yang berfungsi sebagai sumber air baku permukaan IPA Kodeco.



Bendung Karang Bintang



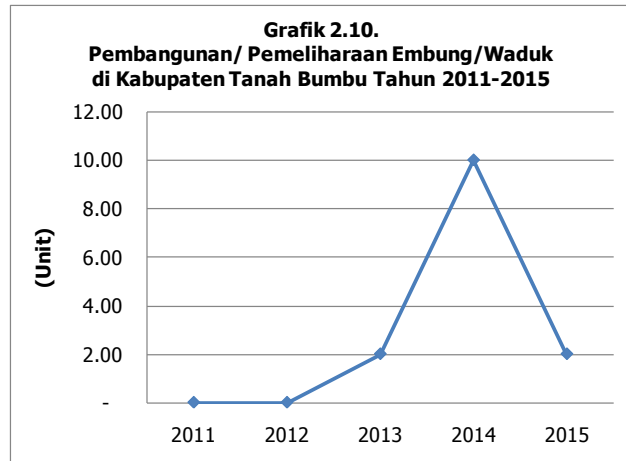
Waduk Kodeco

Untuk kegiatan sumber daya air lainnya adalah pemeliharaan atau rehabilitasi tampungan sumber air permukaan berupa waduk atau embung, dengan kinerja pelaksanaan selama 5 tahun sebesar 15 unit atau lokasi embung/waduk, dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2p.

Pembangunan / Pemeliharaan Embung/  
Waduk di Kabupaten Tanah Bumbu  
Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Pemeliharaan Embung/ Waduk (unit)
2011	-
2012	-
2013	2.00
2014	10.00
2015	2.00
Total	15.00



Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Terdapat 12 danau di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Danau Sungai Dua, Danau Karang Bintang, Danau Selaselilau, Danau Kuranji, Danau Purun, Danau Patampaan, Danau Dukuhrejo, Danau Jombang, Danau Panjang, Danau Cuka, Danau Mekar Jaya, Danau Sekapuk



*Danau Sungai Dua*



*Danau Karang Bintang*



*Danau Selaselilau*



*Danau Kuranji*



*Danau Purun*



*Danau Petampaan*



*Danau Dukuh Rejo*



*Danau Jombang*



*Danau Panjang*



*Danau Sungai Cuka*



*Danau Mekar Jaya*



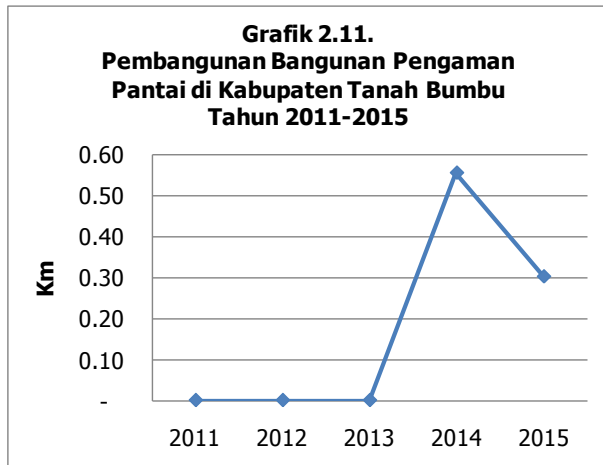
*Danau Sekapuk*

Garis pantai di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah pesisir cukup panjang membentang mulai dari Kecamatan Satui hingga Kecamatan Simpang Empat. Selama 5 tahun terakhir telah dilakukan upaya penanganan pantai dari abrasi yaitu sepanjang 0,86 Km yang dilakukan pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel 2q.  
Penanganan Pengaman Pantai  
di Kabupaten Tanah Bumbu  
Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai (Km)
2011	-
2012	-
2013	-
2014	0.56
2015	0.30
Total	0.86

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu



### C. Air Minum

Kondisi pelayanan PDAM eksisting saat ini di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 5 IPA yang terbagi dalam 3 wilayah pelayanan, yaitu BNA Batulicin, Cabang Kusan Hilir/Pagatan dan Cabang Satui yang telah melayani seluruh kecamatan.

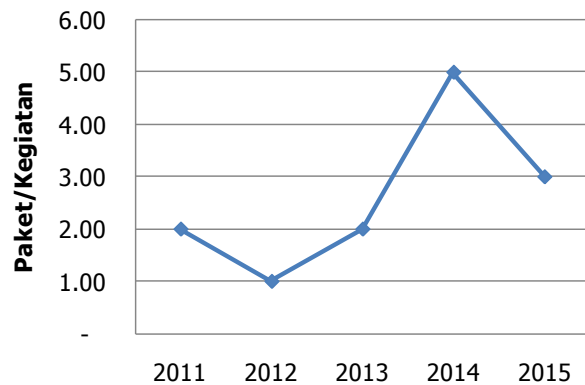
Jumlah sambungan air minum tahun 2015 sebanyak 14.951 SR yang dilayani oleh 19 IPA dengan kapasitas terpasang sebesar 430 liter/.dt dan kapasitas terpasang sebesar 256,30 liter/dt.

Upaya pemenuhan penutuhan air bersih atau air minum penduduk dilakukan dengan pengembangan instalasi pengolah air minum (IPA) dan pembangunan jaringan perpipaan. Kinerja sektor air minum selama 5 tahun telah dilakukan pembangunan/pengembangan air bersih sebanyak 21 paket atau kegiatan, baik pembangunan IPA maupun pengembangan perpipaan yang meliputi sistem penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan.

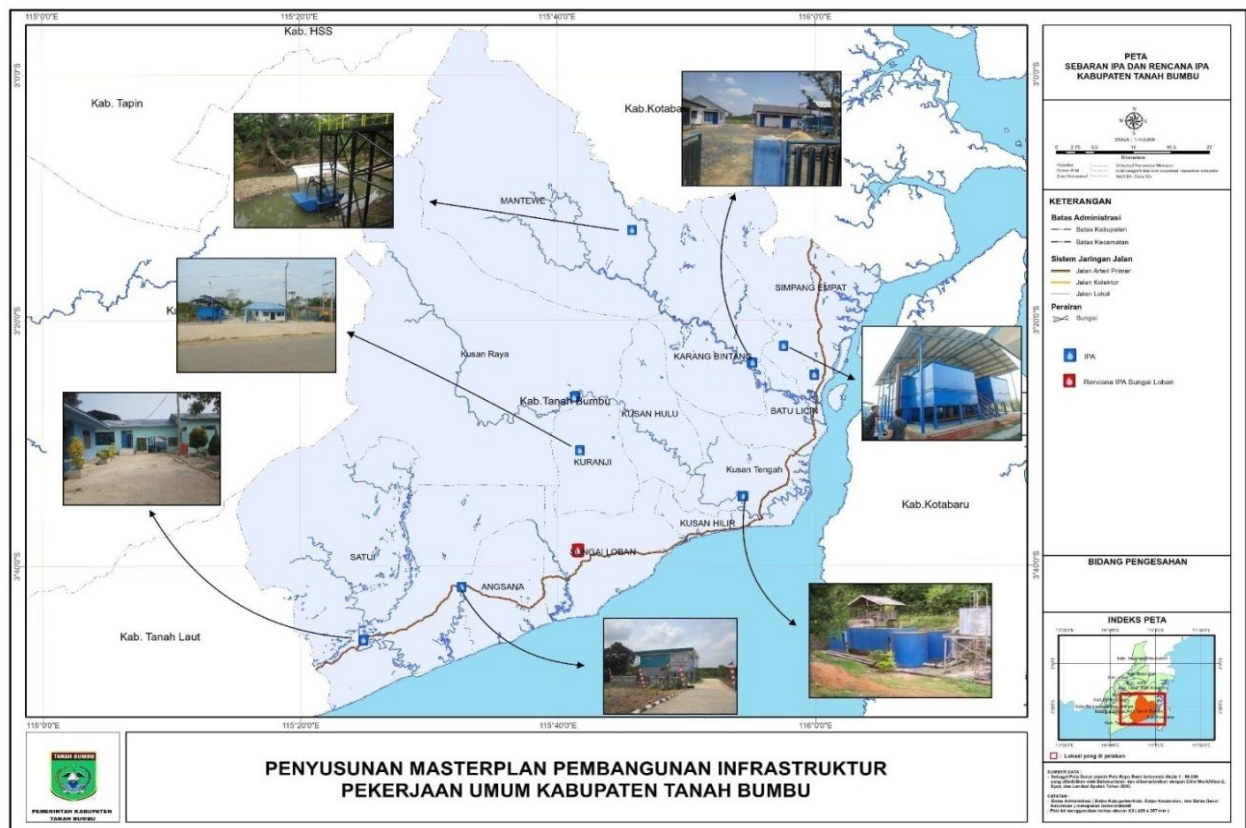
# Penanganan Pengaman Pantai di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan Pengembangan Air Bersih (paket)
2011	2.00
2012	1.00
2013	2.00
2014	5.00
2015	3.00
Total	21.00

## Pembangunan Pengembangan Air Bersih



Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu



Gambar 2.1.

Penyebaran Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di Kabupaten Tanah Bumbu

#### D. Air Limbah

Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 16 unit MCK Komunal (digunakan oleh 366 KK) sementara untuk SPAL terpusat (Off Site) maupun IPAL kawasan/terpusat belum ada.

Kepemilikan tangki septik yang memenuhi syarat pengolahan air limbah pada jamban rumah tangga di Kabupaten Tanah Bumbu baru mencapai 16,5 %, sehingga masih terdapat 83,5 % penduduk belum memiliki tangki septik dan pengolahan yang sesuai standar teknis/SNI (perhitungan SPM)

Masih ada masyarakat yang mengalirkan limbah air kotor (black water) kesungai melalui toilet terapung di bantaran sungai atau pipa pembuangan yang terhubung dengan jamban rumah.



MCK Girimulya



MCK Karang Bintang



MCK Karang Indah



MCK Karya Bakti



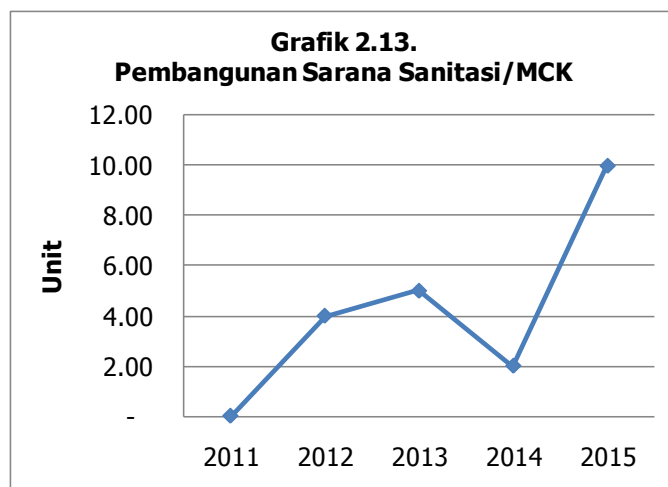
MCK Salimuran

Kinerja penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat salah satunya dilakukan melalui pembangunan sarana MCK di beberapa lokasi, dengan jumlah MCK yang telah dibangun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 21 unit berupa MCK++ dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2r.  
Pembangunan Fasilitas sanitasi/MCK  
di Kabupaten Tanah Bumbu  
Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan Fasilitas Sanitasi/MCK (unit)
2011	-
2012	4.00
2013	5.00
2014	2.00
2015	10.00
Total	21.00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu



## F. Tata Ruang

Kondisi terkait perencanaan tata ruang yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini (tahun 2015) secara umum memperlihatkan kemajuan yang cukup baik, karena berdasarkan data-data dokumen yang sudah dimiliki dan disusun untuk perencanaan tata ruangnya dirasa cukup memadai. Namun demikian Dokumen RTRW Kabupaten yang menjadi induk perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu saat ini masih belum menjadi PERDA karena beberapa permasalahan yaitu : adanya perbedaan terkait pola ruang antara RTRW Provinsi Kalsel dengan RTRW Kabupaten dalam hal penyesuaian dengan kawasan hutan.

Beberapa rencana rinci di Kabupaten Tanah Bumbu telah disusun yaitu berupa yaitu RDTR, Peraturan Zoning, serta RTBL dan DED. Dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi sudah disusun di 10 kecamatan, kecuali kecamatan baru hasil pemekaran yang belum dilakukan penyusunan, yaitu Kecamatan Kusan Raya dan Kecamatan Kusan Tengah.

Beberapa rencana spasial dari sektoral sebagian juga telah disusun dan sedang tahap penyusunan rencana, seperti: rencana pengembangan perumahan dan permukiman (RP3KP), rencana kawasan industri, rencana induk pelabuhan, rencana induk pariwisata, rencana pengembangan kawasan agrowisata, kawasan minapolitan serta rencana pengembangan tata ruang sektoral lainnya

### **G. Bangunan Gedung**

Dari 46 instansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Bumbu, baru 35 SKPD yang telah memiliki bangunan gedung kantor sendiri, sisanya sebanyak 11 SKPD masih meminjam atau menumpang di gedung kantor SKPD lainnya, yaitu terdiri dari 3 badan, 3 dinas, 3 kantor dan 2 kecamatan yang merupakan kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2015.

Jenis bangunan umum yang menjadi kewenangan pemerintah dalam penyediaannya di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari fasilitas terminal terdapat 4 unit di Kecamatan Kusan Hilir, Satui, Angsana dan Batulicin, Pos pemadam kebakaran terdapat sebanyak 4 unit di Kecamatan Kusan Hilir, Satui, Batucin dan Simpang Empat, serta fasilitas perpustakaan umum terdapat sebanyak 1 unit di Kecamatan Batulicin

Kinerja sektor bangunan gedung berupa dilaksanakannya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung kantor pemerintahan sebanyak 15 unit/kegiatan pada periodr 5 tahun terakhir. Sementara itu untuk pembangunan/pemeliharaan bangunan fasilitas umum/sosial sebanyak 22 unit/kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

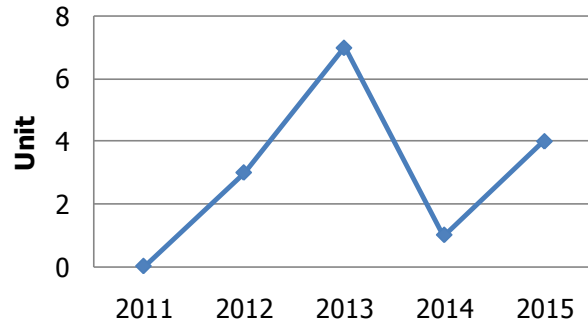
Tabel 2s.

Pembangunan Gedung Kantor  
Pemerintahan di Kabupaten Tanah  
Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (unit)
2011	0
2012	3
2013	7
2014	1
2015	4
Total	15

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

**Grafik 2.14**  
**Kegiatan Pembangunan Gedung**  
**Kantor Pemerintahan di Kabupaten**  
**Tanah Bumbu Tahun 2011-2015**



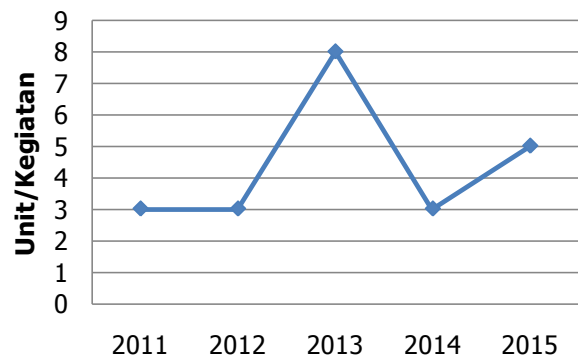
Tabel 2t.

Pembangunan Gedung Fasilitas  
Umum/Sosial di Kabupaten Tanah  
Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Kegiatan Pembangunan Fasum/Fasos
2011	3
2012	3
2013	8
2014	3
2015	5
Total	22

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

**Grafik 2.15.**  
**Kegiatan Pembangunan Fasum/Fasos**  
**di Kabupaten Tanah Bumbu**  
**Tahun 2011-2015**



## **H. Perumahan dan Permukiman**

Terdapat 31 permukiman desa nelayan yang tersebar di 6 kecamatan pesisir di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Kecamatan Simpang Empat, Barulicin, Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana dan Satui. Hingga tahun 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu hanya terdapat 16 lokasi perumahan yang dibangun oleh pengembang, terjadi penambahan sebanyak 23 lokasi perumahan baru dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga jumlah lokasi perumahan pada tahun 2015 sebanyak 39 lokasi.

Kawasan permukiman kumuh pada tahun 2015 terdapat di 14 lokasi dengan luas sebesar 244,15 Ha yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Batulicin, Simpang Empat, Kusan Hilir dan Satui.

## **I. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tanah Bumbu berupa taman, makam dan lapangan olahraga, dengan jumlah taman pada tahun 2015 sebanyak 9 unit seluas 25,7 Ha tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Batulicin, Simpang Empat, Karang Bintang dan Kusan Hilir.

Lapangan olahraga tersebar di seluruh kecamatan sebanyak 34 unit dengan luas 45,22 Ha yang umumnya berupa lapangan volley dan lapangan sepakbola. Demikian juga untuk RTH pemakaman tersebar diseluruh kecamatan.

## **J. Jasa Konstruksi**

Pelaku jasa konstruksi berdasarkan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) yang diterbitkan sampai dengan tahun 2015 terdiri dari 2 perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan 117 perusahaan berbentuk CV.

Sebaran perusahaan jasa konstruksi terbanyak terdapat di Ibukota Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu di Kecamatan Simpang Empat 62 perusahaan (54%), kemudian 20 perusahaan di Kecamatan Batulicin (17%), Kusan Hilir 19 buah (17%), Karang Bintang 8 perusahaan (7%), Satui 4 perusahaan (3%), dan Kuranji 2 perusahaan (2%), kecamatan lainnya tidak terdapat pelaku usaha jasa konstruksi.

Bidang layanan jasa konstruksi yang terbanyak di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Bidang Bangunan Sipil sebanyak 90 sertifikat (42%), sedangkan terbanyak kedua adalah bidang bangunan gedung 79 sertifikat (37%). Sertifikat jasa layanan

lainnya adalah meliputi bidang arsitektur, bidang mekanikal, bidang elektrikal, bidang jasa inspeksi teknis, bidang perencanaan rekayasa, bidang pengawasan rekayasa, bidang jasa pelaksanaan spesialis.

## K. Drainase

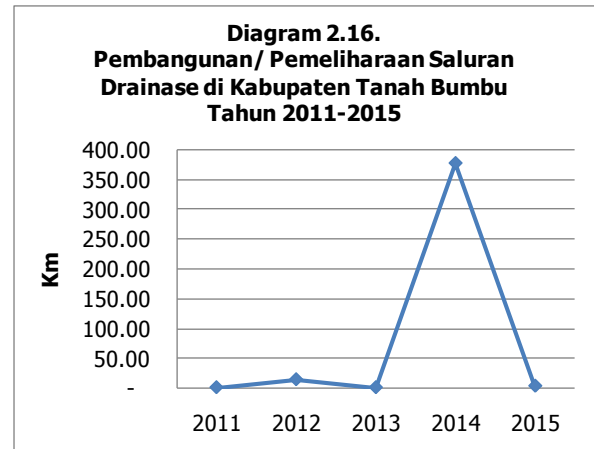
Kinerja setor drainase selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif, yaitu dengan telah dibangun atau dilakukannya pemeliharaan saluran drainase sepanjang 393,01 Km. Penyebaran lokasi kegiatan pembangunan/pemeliharaan jaringan drainase tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebanyak 186 lokasi, dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2u.

Pembangunan/Pemeliharaan Saluran  
Drainase di Kabupaten Tanah  
Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Pemeliharaan Saluran Drainase (Km)
2011	-
2012	13.41
2013	-
2014	377.10
2015	2.50
Total	393.01

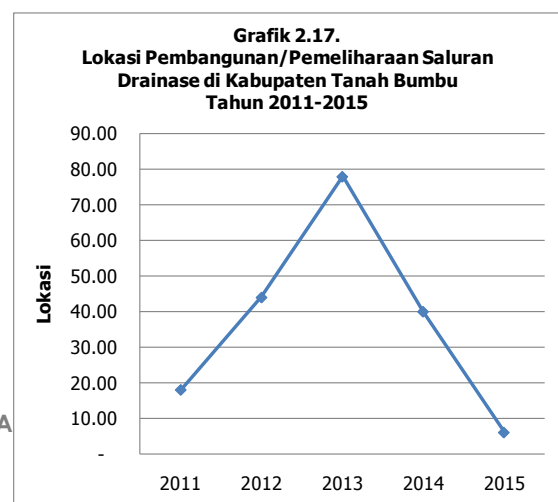
Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu



Tabel 2v.

Lokasi Pembangunan/Pemeliharaan  
Saluran Drainase di Kabupaten  
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Pemeliharaan Saluran Drainase (lokasi)
2011	186
2012	186
2013	186
2014	186
2015	186



2011	18.00
2012	44.00
2013	78.00
2014	40.00
2015	6.00
<b>Total</b>	<b>186.00</b>

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi**

Sejalan dengan awal terbentuknya DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2003, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai kerangka acuan kerja program 5 tahunan yang tiap tahunnya diimplementasikan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Program dan Kegiatan. Hingga saat ini DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu memasuki tahap Renstra ke 2 yaitu untuk tahun 2016 s.d. 2021 dengan capaian kinerja untuk 5 tahun sebelumnya (2011 – 2015) dapat dilihat dalam tabel 2.1.

### **2.3.2. Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG pada level program, selanjutnya, kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.1.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
ASPEK PELAYANAN UMUM																		
Fokus Layanan Urusan Wajib																		
1.	IKK																	
2.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		59,47	-	12.91	37.73	52.67	59.47	9.867	20.038	29.705	39.709	51.202		155.216	78.731	75.393	86.097
2.2.	Rasio Jaringan Irigasi		0,0101	-	0.0066	0.008	0.009	0.0101	0.00120	0.0012358	0.001266	0.001375	0.001483		18.724	15.830	15.277	14.683
2.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi		50	-	10.76	30.45	40.25	50	-	0.856	1.218	2.075	3.494		7.953	4.001	5.154	6.989
2.4.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		3.81	-	3.98	3.92	3.87	3.81										
2.6.	Rasio rumah layak huni		52.16	-	50,98	51,14	51.7	52.16										
2.7.	Rasio permukiman layak huni																	
2.8.	Panjang jalan dilalui Roda 4		0.005	-	0.0055	0.0053	0.0052	0.005	0.453	0.449	0.426	0.409	0.415		8168.512	8046.726	7873.454	8300.302

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
2.9.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)		1.3	-	5.3	4	2.67	1.3	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054		151.95 6	201.34 2	301.63 6	619.515
2.10.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )		87.73	-	16.76	70.85	84.05	87.73	17.123	34.449	47.927	63.974	80.699		205.54 4	67.646	76.115	91.985
2.11.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)		0	-	0	0	0	0										
2.12.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar																	
2.13.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar								0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
2.14.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		82,37	-	58.33	65.96	70.93	82.37	0.199	0.760	3.433	3.882	3.990		1.304	5.205	5.472	4.844
2.15.	Pembangunan turap di		39,6	-	12,3	31,5	36,0	39,6										

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota																	
2.16.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik		41,33	-	35.91	38.41	39.87	41.33	38.046 46	38.252	27.899	37.232	43.220		106.52 3	72.636	93.384	104.574
2.17.	Lingkungan Pemukiman		0,207	-	0.284	0.213	0.21	0.207	0.0509	0.0499	0.0485	0.049	0.049		17.579	22.790	23.115	23.450
2.	Perumahan																	
2.1.	Rumah tangga pengguna air bersih		69.77	-	35.44	41.58	56.01	69.77	19.223	29.727	47.444	47.934	53.416		83.881	114.10 4	85.582	76.561
2.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi		50	-	10.76	30.45	40.25	50	27.152	44.842	60.810	72.799	78.504		416.74 7	199.70 3	180.86 7	157.008
2.3.	Lingkungan pemukiman kumuh		0.207	-	0.284	0.213	0.21	0.207										
2.4.	Rumah layak huni			-														
3.	Lingkungan Hidup																	
3.1.	Persentase Penduduk berakses airminum		-	-	35.44	41.58	56.01	69.77					46.825					46.825
3.2.	Persentase Luas pemukiman yang tertata		-	-	0.339	0.088	0.281	0.17										
3.3.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor		-	-	0	0	0	0										

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	dan Sumber Mata Air																	
4.	Lingkungan Hidup																	
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih																	
	SPM Nomor 04/PRT/M/2010																	
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100							1.554382	1.8996481	1.83	1.94	2.03	1.554382	1.8996481	1.83	1.94	2.03
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70							62.8667	64.826097	66.65	68.44	63.86	62.8667	64.826097	66.65	68.44	63.86
3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100							0.990368	1.0043358	98.38%	99.04%	98.97%	0.990368	1.0043358	98.38%	99.04%	98.97%
4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100							8.861967	8.8619672	8.86	8.86	8.86	8.861967	8.8619672	8.86	8.86	8.86

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/	40							28.145 81	23.763 84	45.36	47.85	56.83	28.145 81	23.763 84	45.36	47.85	56.83

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	hari																	
9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20							8.88	9.26	10.30	10.46	10.76	8.88	9.26	10.30	10.46	10.76
12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70							19.37	20.62	23.61	25.41	26.95	19.37	20.62	23.61	25.41	26.95
13	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50							0.18	0.87	4.16	8.00	11.79	0.18	0.87	4.16	8.00	11.79

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10							1.94	4.74	4.88	4.88	4.88	1.94	4.74	4.88	4.88	4.88
15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100							29.38	47.13	66.29	94.36	96.10	29.38	47.13	66.29	94.36	96.10
16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	100							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100							0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100							0	14.286	14.286	42.857	57.143	0	14.286	14.286	42.857	57.143
19	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui	100							0	0	0	0		0	0	0	0	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	peta analog dan peta digital																	
20	Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	10 0							0	50	53.57	72.73	72.73	0	50	53.57	72.73	72.73
21	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	10 0							5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100																
23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25							2.16	2.85	2.94	2.79	3.83	2.16	2.85	2.94	2.79	3.83
	SPM Nomor 01/PRT/M/2014																	
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100																2.03
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70																63.86
3	Tersedianya jalan yang	10																98.97%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	0																
4	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40																56.83
5	Penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat yang memadai.	60																0
6	Pengurangan sampah di perkotaan.	20																10.76
7	Pengangkutan Sampah																	
8	Pengoperasian TPA	5																0

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
9	Persentase Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50																11.79
10	Berkurangnya genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun																	
11	Persentase Jumlah Izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan																	
12	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10																4.88
13	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi																	
14	tersedianya layanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100																100
15	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100																
16	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25																3.83

Tabel 2.2.

### Anggaran dan Realisasi Pelayanan SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	125,000,000	100,000,000	102,000,000	147,000,000	93,200,000									
Pendapatan Asli Daerah	125,000,000	100,000,000	102,000,000	147,000,000	93,200,000		48,710,000	5,600,000	230,450,000	334,050,000	-	48.71	5.49	156.77
- Hasil retribusi daerah		100,000,000	102,000,000	147,000,000	93,200,000									
<b>BELANJA DAERAH</b>	132,862,864,546	246,337,569,210	415,229,560,685	369,639,164,725	276,514,391,598	123,674,214,081	191,996,222,902	341,958,412,877	353,489,996,823	219,056,607,353	93.08	77.94	82.35	95.63
Belanja tidak langsung	2,255,189,886	2,637,275,975	2,414,118,985	2,475,094,355	3,033,112,498	2,126,779,113	2,374,837,552	2,234,619,996	1,669,614,503	2,814,548,268	94.31	90.05	92.56	67.46
- Belanja pegawai		2,637,275,975	2,414,118,985	2,475,094,355	3,033,112,498									
Belanja langsung	130,607,674,660	243,700,293,235	412,815,441,700	367,164,070,370	273,481,279,100	121,547,434,968	189,621,385,350	339,723,792,881	351,820,382,320	216,242,059,085	93.06	77.81	82.29	95.82
- Belanja pegawai		1,710,090,700	2,815,810,000	1,894,155,000	1,457,000,000									
- Belanja barang dan jasa		14,274,938,900	34,343,794,100	7,947,640,570	15,556,618,100									
- Belanja modal		227,715,263,635	375,655,837,600	357,322,274,800	256,467,661,000									
<b>Total</b>														

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021, ada beberapa tantangan yang muncul dan perlu dihadapi diantaranya adalah :

1. Tuntutan masyarakat akan mutu konstruksi yang handal, keselamatan dan kebutuhan akan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*sustainable development*).
2. Masih terbatasnya tenaga terampil / ahli dan profesional di bidang Pekerjaan Umum, baik di *internal* DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG sendiri maupun di pihak perusahaan-perusahaan penyedia jasa yang ada untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan di bidang Pekerjaan Umum serta terbatasnya peralatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa tersebut;
3. Adanya tumpang tindih kepemilikan lahan yang disertai dengan bukti-bukti kepemilikan yang tidak jelas dalam pembebasannya, ketika akan dilaksanakan ganti rugi, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan dapat terhambat/tertunda;
4. Keterbatasan dana pembangunan infrastruktur yang tersedia, sehingga tidak semua prioritas dapat terpenuhi dalam waktu yang diinginkan;
5. Tidak lengkapnya alat uji mutu laboratorium sehingga tidak tercapai kualitas kontrol pekerjaan.
6. Kendala cuaca yang kurang baik (sering hujan) dan tidak menentu sehingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan menjadi kurang optimal;

Sedangkan peluang yang ada dan perlu dimanfaatkan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan sudah cukup jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Unsur-Unsur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 52 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 38 orang dan Non-PNS sebanyak 14 orang dengan tingkat pendidikan yang cukup baik (S2 sebanyak 4 orang; S1 Teknik Sipil dan Arsitektur sebanyak 22 orang, S1 ekonomi sebanyak 1 orang; S1 pendidikan teknis sebanyak 1 orang; D4 sebanyak 4 orang; D1 sebanyak 1 orang; D3 sebanyak 3 orang, SLTA/ sederajat sebanyak 14 orang; SD/ sederajat sebanyak 2 orang).
3. Adanya tawaran pelatihan dan kerjasama dengan lembaga terkait atau di lingkungan Kementerian yang dapat meningkatkan kompetensi SDM.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS**

#### **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

##### **3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pembangunan Tanah Bumbu pada RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, maka Visi Kabupaten Tanah Bumbu yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah:

***"Terwujudnya Kabupaten tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)".***

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Penataan dan pengelolaan Pelabuhan sebagai Terminal Poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan

pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar local.
5. Menyelenggarakan tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif, dan Bersih

Dalam rangka untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021 sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang terkait dengan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati. Tugas-tugas dibidang Pekerjaan Umum ini yaitu pembangunan-pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat adalah terutama dibidang kebinamargaan (infrastruktur jalan), bidang keciptakaryaan yaitu dalam hal pengembangan lingkungan, pengelolaan dan penyediaan air bersih/minum serta pembangunan dibidang yang menunjang lainnya.

Dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang telah diuraikan dalam bab II, dan berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu seperti yang telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d. 2021, dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai peranan yang cukup penting untuk menunjang pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021, dalam hal ini adalah untuk menunjang pencapaian Misi I : "Menyelenggarakan

penataan ruang wilayah yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas”.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b> , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Misi 1</b> <b>Menyelenggarakan Penataan dan Pengelolaan Pelabuhan sebagai Terminal Point Guna Mendorong Pemanfaatan Keunggulan Maritim Serta Menyelenggarakan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Mampu Mendorong Optimalisasi Perekonomian Masyarakat dan Pariwisata</b>			
	Sasaran : Terwujudnya Ekonomi Maritim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakpastian penyediaan sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya penyesuaian dan kepastian tentang DED Pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terdapat Alokasi Ruang Kawasan Pelabuhan</li> </ul>

<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b>, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)</p>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Strategi :</p> <p>Pengembangan kawasan pelabuhan sebagai terminal point</p>	<p>penunjang pelabuhan terkait lokasi, legalitas lahan dan finalisasi DED pelabuhan untuk 30.000 DWT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya kepastian lokasi dan lahan rencana pengembangan angkutan laut dan industri perikanan dan maritim</li> </ul>	<p>Internasional Kapasitas minimal 30.000 DWT, mengingat DED Pelabuhan yang ada hanya untuk 3000 DWT atau 10.000 DWT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian dan kelancaran pelaksanaan pembebasan lahan 100 Ha pada Tahun 2017</li> <li>• Kelengkapan Readines Kriteria Pembangunan Pelabuhan yang harus dipenuhi (Amdal, Masterplan Kawasan Pelabuhan dll)</li> <li>• Belum tersusunnya perencanaan</li> </ul>	<p>dalam RTRW,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terdapat Dokumen Perencanaan Pelabuhan</li> <li>• Akses jalan utama menuju pelabuhan sudah terbangun</li> <li>• Kebutuhan pemenuhan infrastruktur air minum sudah diantisipasi dalam dokumen Rispam</li> </ul>

<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b>, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)</p>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			infrastruktur penunjang pelabuhan (air minum, pengolahan limbah dll)	
	<p>Sasaran : Berkembangnya industri pariwisata daerah</p> <p>Strategi : Peningkatan pengelolaan kepariwisataan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdapat arahan sektor terkait prioritas pengembangan obyek wisata dan perbaikan dan peningkatan infrastruktur kawasan wisata</li> <li>• Beberapa kawasan wisata yang ada belum memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala ketersediaan dan pembebasan lahan karena belum tersedianya dokumen masterplan sebagai acuan, sehingga tidak memungkinkan untuk pembuatan DED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah tersedia infrastruktur eksisting sebagai penopang kegiatan wisata, serta ketersediaan infrastruktur disekitar kawasan yang dapat dikonektingkan kedepannya saat rencana pengembangan sudah ditetapkan</li> </ul>

<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b>, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)</p>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		masterplan obyek wisata dan DED		
2	<b>Misi 2</b> <b>Meningkatkan kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saling Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional</b>			
	Sasaran : Meningkatnya Sektor Industri dan Perdagangan  Strategi : Pengembangan Industri Pengolahan	Kewenangan pengelolaan dan kepemilikan kawasan atau lokasi industri, terkait investasi infrastruktur yang akan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan kegiatan industri yang belum signifikan, sehingga infrastruktur yang dibangun terkesan terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terbangun-nya akses jalan yang sangat lebar menuju kawasan industri yang terkoneksi dengan lokasi pelabuhan</li> </ul>

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b> , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dibangun dengan menggunakan uang negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan dukungan air baku untuk pemenuhan air bersih kawasan industri</li> <li>• Keterbatasan pasokan sumber energi listrik oleh PLN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status lahan yang sudah jelas untuk kelancaran pembangunan infrastruktur kawasan.</li> </ul>
	Sasaran : Meningkatnya Sektor Industri dan Perdagangan  Strategi : Pengembangan Perdagangan	Rencana pembangunan atau peningkatan pasar menjadi kewenangan SKPD yang menangani tentang hal tersebut, sehingga keterlibatan Dinas PU berdasarkan arahan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya dokumen DED</li> <li>• Permasalahan status lahan pasar dan pengelolaannya serta pembebasan lahan disekitarnya untuk pengembangan pasar</li> <li>• Kesulitan mencari lahan untuk Relokasi penampungan sementara pedagang pasar saat dilakukan rehab atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas pasar yang menunjukkan peningkatan sebagai pusat transaksi ekonomi setempat</li> <li>• Tersedianya database kondisi dan penyebaran pasar seluruh kabupaten.</li> </ul>

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b> , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penanganan dari SKPD terkait	pembangunan.	
	Sasaran : 1. Meningkatnya sektor pertanian 2. Meningkatkan ketahanan pangan Strategi : Meningkatkan produktivitas pertanian		•	•
3	<b>Misi 3</b> <b>Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan</b>			
	Sasaran : 1. Berkurangnya tingkat	• Keterbatasan kewenangan	• Status dan kewenangan	• Sudah ada database

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b> , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pencemaran, kerusakan lingkungan 2. Berkurangnya potensi kerawanan bencana alam 3. Terwujudnya lahan RTH  Strategi : Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup	dalam lingkup pengelolaan DAS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya Kesadaran masyarakat untuk kebersihan dan pengolahan sampah yang benar serta budaya sanitasi yang sehat</li> <li>• Rendahnya akses pengelolaan sampah ke masyarakat serta akses terhadap sanitasi yang layak</li> </ul>	kawasan hutan yang membatasi pelaksanaan fisik infrastruktur dilakukan secara optimal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak permukiman yang berjauhan sehingga pelayanan persampahan dan air limbah yang terpadu menjadi tidak efisien dan optimal.</li> <li>• Keinginan masyarakat untuk memanfaatkan sarana sampah yang tersedia serta pengolahan limbah yang layak masih kurang</li> <li>• Belum adanya institusi teknis yang mengelola air limbah</li> </ul>	tentang sungai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah tersusun masterplan sungai, waduk dan sumberdaya air lainnya</li> <li>• Pemanfaatan sungai sebagai sumber air baku IPA air minum sudah dilakukan secara optimal</li> <li>• Sudah tersedianya dokumen perencanaan teknis dan manajemen persampahan (PTMP) kabupaten</li> <li>• Sudah dikelolanya TPA</li> </ul>

<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b>, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)</p>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			secara cepat dan tepat yang dilengkapi dengan SOP, Operator, Otoritas, dll	dengan cara control landfill <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah tersusunnya Masterplan Air Limbah</li> <li>• Akan dibangunnya IPAL komunal skala kawasan atau komunitas</li> <li>• Akan dibangunnya IPLT</li> <li>• Sudah tersedianya database air limbah dan persampahan</li> </ul>
	Sasaran : Pemanfaatan sumber daya air untuk sumber energi dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan anggaran daerah dalam pemeliharaan fasilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya air baku irigasi pada saat musim kemarau, sehingga fungsi Irigasi belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terbangunnya jaringan DI dan DR di beberapa lokasi</li> </ul>

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b> , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Strategi : Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup	saluran irigasi dan rencana pembangunan jaringan baru yang cukup luas • Akses beberapa lokasi yang terisolir dan jauh menyebabkan tidak maksimalnya pemeliharaan saluran	• Status kepemilikan lahan adat atau masyarakat untuk pengembangan jaringan atau daerah irigasi baru	• Tersedianya potensi air baku untuk irigasi yang potensial untuk pembangunan Bendungan di daerah Kusan • Potensi pembiayaan dari pusat dan provinsi terkait dengan kewenangan pembangunan bendungan dan jaringan DI/DR • Sudah tersusunnya masterplan irigasi dan sungai • Sudah tersedianya

<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b>, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)</p>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				database DI/DR.
	<p>Sasaran : Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Air Bersih</p> <p>Strategi : Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup</p>	•	•	•
	<p>Sasaran : Tertatanya kawasan pemukiman berbasis lingkungan</p> <p>Strategi : Peningkatan Kualitas Permukiman</p>	•	•	•
5	<p><b>Misi 4</b></p> <p><b>Menyelenggarakan program penguatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA)</b></p>			

<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b>, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)</p>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal</b>			
	<p>Sasaran : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Strategi : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan</p>	<p>Prioritas, jumlah dan tahapan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan Sarana kesehatan menjadi kewenangan SKPD lain, sehingga perencanaan dan pembangunannya bergantung dari arahan sektor</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah tersedia database sarana kesehatan puskesmas, pustu, polindes</li> </ul>
6	<b>Misi 5 Menyelenggarakan tata</b>			

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b> , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih</b>			
	Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik  Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergisitas proses izin pemanfaatan ruang dari bidang tata ruang dan jasa konstruksidan Jaskon terhadap pelayanan satu pintu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Tersedia sistem, sarana dan prasarana yang mendukung Pengembangan pusat informasi berbasis IT.</li> <li>• Ketersediaan jaringan internet yang terbatas untuk kontinuitas pelayanan online</li> <li>• masih kurangnya SDM Operator</li> <li>• belum adanya ketentuan tentang sertifikat layak fungsi (SLF) dan tim ahli bangunan gedung</li> <li>• belum adanya tim ahli bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adanya bidang yang khusus menangani tentang pemanfaatan tata ruang dan jasa konstruksi</li> <li>• Sarana dan prasarana kerja yang memadai dan refresentatif</li> <li>• SDM Aparatur didominasi usia produktif dibawah 40 tahun, yang masih optimal untuk berkembang</li> <li>• Memiliki keahlian dan</li> </ul>

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu <b>sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata</b> , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			gedung yang akan menjadi sarana konsultasi permasalahan konstruksi • Basis keilmuan masih belum sesuai dengan bidang yang ditanganinya	ketrampilan yang telah didapat dari berbagai pelatihan yang diikuti

### 3.2. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

#### 3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu kementerian dalam Kabinet Kerja yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Permukiman. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi "***Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***", yang berusaha dicapai melalui pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan visi dan misinya adalah:

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian  
Pekerjaan Umum 2015-2019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong  
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>Tujuan 1</b> Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.</p>			
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Peningkatan pembangunan infrastruktur ke pu an dan infrastruktur sektor lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan pembiayaan daerah bidang ke pu a n</li> <li>• Koordinasi dan Pembangunan Bidang Infrastruktur belum maksimal</li> </ul>	Adanya KAPET Batulicin sebagai KSN dan terdapatnya KSP Pesisir menjadiakn keterpaduan antar tingkat pemerintahan terjadi
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	-	Belum tersedianya basis data infrastruktur yang menyeluruh yang menjadi dasar	Telah dimulainya e-government, dan e-budgetting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			keterpaduan	
3	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	Pembinaan terhadap pelaku Jasa Konstruksi belum maksimal	Terbatasnya pelaku jasa konstruksi	Pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi dan aparatur pelaksana juga dilakukan oleh tingkatan pusat ke daerah
<b>Tujuan 2</b> Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi				
1	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi	Pengembangan sumber daya air irigasi dan bendungan memerlukan dana besar	Belum terdapat kelayakan pengembangan dan dokumen konstruksi (DED)	Sistem Irigasi eksisting tersedia dapat dikembangkan dan lokasi calon bendungan baik untuk PLTA maupun irigasi tersedia
2	Meningkatnya ketahanan air	Pengembangan air baku untuk SPAM dari sungai, bendung, danau dan air tanah memerlukan data investigasi potensi yang belum tersedia lengkap	Budidaya di kawasan lindung dan bagian hulu menyebabkan degradasi dan menurunkan kemampuan catchment air	Memiliki daerah hulu sebagai kawasan resapan air dan persediaan air baku

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tujuan 3</b> Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim				
1	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Infrastruktur Akses Pelabuhan dan Kawasan Industri serta Sektor Produksi belum tuntas	Pengembangan pelabuhan baru untuk mendukung industri dan sektor produksi masih terkendala lahan	Terdapat pelabuhan samudera yang dioperasikan perusahaan negara PT Pelindo dan terdapat rencana pengembangan pelabuhan
2	Meningkatnya kemantapan jalan nasional	Semua kawasan telah terhubung melalui jalan nasional dan melalui jalan penghubung, Jalan Kab., jalan desa memerlukan biaya pemeliharaan	Luasnya wilayah kabupaten dan panjangnya jaringan jalan yang perlu dipelihara dan ditingkatkan	Panjang ruas jalan nasional melingkupi seluruh wilayah dari barat, menyusuri selatan ke timur kemudian ke utara mampu menjangkau seluruh kawasan dalam kondisi cukup baik
<b>Tujuan 4</b> Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"				
1	Meningkatnya dukungan layanan	Jaringan Jalan Lingkungan belum	Pertumbuhan perumahan	Kawasan perumahan permukiman tumbuh di

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	dapat diakomodir keseluruhan	permukiman cukup cepat dan tidak dapat disertai pembangunan infrastruktur dasarnya	seputar kawasan perkotaan
2	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Pengembangan Prasarana Sarana Umum (PSU) masih terbatas	Tidak tersedia lahan untuk pengembangan PSU di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang dikembangkan maupun yang ada secara natural	Permintaan PSU oleh masyarakat membantu identifikasi Kebutuhan PSU
3	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Dukungan Pembiayaan daerah untuk perumahan bersubsidi masih sangat terbatas dan belum ada	Masyarakat konsumen perumahan terkendala pada proses permohonan dan persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)	Telah terdapat bantuan pemerintah untuk perumahan bersubsidi, baik masyarakat umum maupun Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI.

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Tujuan 5</p> <p>Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</p>			
1	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan	Pengawasan pelaksanaan kualitas jasa konstruksi masih terbatas pada kualitas aparatur jasa konstruksi	Kompleksitas jasa konstruksi dan terbatasnya kualitas pelaku jasa konstruksi di daerah.	Adanya pembinaan untuk pengembangan jasa konstruksi baik dari pembiayaan daerah maupun pusat.
2	Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas	SDM Jasa Konstruksi belum sepenuhnya bersertifikasi kompetensi	Pelatihan dan pembinaan kompetensi keahlian dan ketrampilan jasa konstruksi masih terbatas, begitu juga sdm personil pelakunya yang selalu berganti	Adanya pembinaan untuk pengembangan jasa konstruksi baik dari pembiayaan daerah maupun pusat.
3	Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas	-	Organisasi Usaha Jasa Konstruksi masih terbatas pada pemahaman jasa konstruksi	Pembinaan Organisasi Jasa Konstruksi melalui LPJK, baik Jasa Konsultansi maupun Jasa Kontraktor.

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			konvensional	
4	Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	-	-	-
5	Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana	-	-	-

### 3.2.2. Telaahan Renstra Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana strategis DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama secara terencana dan sistematis yang dimulai dari peningkatan kinerja dan perilaku aparatur dalam memberikan layanan, pengawasan dan pengendalian manajemen yang lebih efektif, efisien dan dapat meningkatkan produktivitas program rencana kerja tahunan dengan dapat meningkatkan partisipasi peran serta masyarakat, sehingga rencana strategis dapat pula berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang lebih jelas dalam mencapai ukuran kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan misi pada

bidang pekerjaan umum. Visi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi harapan yang ingin dicapai adalah

**"Terwujudnya infrastruktur yang handal, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera."**

Dengan misi, tujuan dan sasaran yang sejalan dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ditinjau dari apa yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor penghambat dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi pelayanan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu :

1. Tingkat kecepatan informasi yang diperoleh
2. adanya keharusan untuk anggaran, dimana adanya Keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu
3. Kadang ada kendala untuk melakukan koordinasi terutama di tingkat kementerian
4. Belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi
5. Belum adanya keterpaduan penanganan drainase lingkungan secara menyeluruh

Sedangkan faktor pendukungnya antara lain :

1. Adanya kesesuaian program dan kegiatan
2. Adanya tujuan akhir yang sama yaitu agar terciptanya infrastruktur yang andal.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu telah ditetapkan :

1. Rencana Struktur Ruang; Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Penyediaan fasilitas dan utilitas
2. Rencana Pola Ruang ; Rencana alokasi penggunaan ruang yaitu : kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya, kawasan budi daya non pertanian (kawasan permukiman, pariwisata, perindustrian dan pertambangan),

### 3. Rencana Kawasan Strategis ; Rencana pengembangan wilayah prioritas

Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten ini adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, dimana DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG dilihat dari tugas dan fungsinya sangat terkait dalam hal ini.

Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah, ada beberapa faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu :

#### 1. Faktor Penghambat

Yang menjadi penghambat dalam kaitannya dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan tata ruang serta penetapan tata ruang yang tidak sesuai dengan kondisi reel dan kebutuhan di lapangan.

#### 2. Faktor Pendorong

Faktor yang menjadi pendorongnya adalah adanya kepastian tata ruang yang memudahkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk menetapkan alokasi kegiatan

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	<b>Rencana Struktur</b>			
1	Sistem	Perwujudan Pusat-Pusat	Jumlah Pusat-Pusat	Pertumbuhan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perkotaan	Kegiatan dan Perkotaan belum optimal untuk dapat menjadi dan memenuhi kriteria Pusat : PKWp, PKLp, PPK dan PPL melalui kebutuhan infrastruktur dan sistem konektivitas keterhubungannya	kegiatan meningkat, pemekaran kecamatan, dan luasan kegiatan berkembang diluar kemampuan pelayanan	Pusat-Pusat Kegiatan masih tersentral pada ruas-ruas jalan nasional dan jalan arteri
2	Jaringan Jalan	Memenuhi indikator terpenuhinya jalan penghubung ke semua Ibukota Kecamatan, kawasan permukiman dan pusat-pusat produksi minimal dengan dilalui Kendaraan Bermotor R4 dan memelihara serta mempertahankan proporsi panjang jalan yang ada dalam kondisi mantap (baik dan sedang), khususnya pada kewenangan Jalan Kab., Jalan Desa, Jalan Lingkungan dan	Luasnya wilayah dan pusat permukiman dan pusat produksi yang harus dihubungkan dengan jaringan Jalan Kab. dan jalan desa cukup besar.	Panjangnya Jalan Arteri dengan kewenangan nasional, sehingga mendapatkan dukungan pembiayaan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pembinaan Jalan Lainnya terhadap Jalan Nasional		
4	Sumber Daya Air	Mewujudkan pengembangan sistem sda melalui jaringan irigasi, jaringan air baku, pengendalian banjir dan pengaman pantai, dimana terdapat keterbatasan kemampuan pembiayaan dan pendanaan daerah	Semakin berkurangnya sistem yang ada, baik karena kondisi alam, pemanfaatan untuk sektor bukan pendukung (perkembangan non pertanian / perkebunan) meningkatnya abrasi.	Kawasan pertanian yang harus didukung sistem irigasi jumlahnya cenderung menurun, terdapat dukungan pembiayaan pusat (APBN) dari sektor SDA.
5	Persampahan	Pengembangan dan Peningkatan TPA sesuai ketentuan peraturan perundangan dan kebutuhan pelayanan persampahan masih belum terwujud untuk kondisi kabupaten keseluruhan	TPA masih memiliki dan beroperasi dengan sistem sanitary landfill	Posisi keberadaan lokasi TPA saat ini sudah cukup sesuai untuk peningkatan kapasitas TPA
6	Drainase	Sistem Drainase Perkotaan (baik primer, sekunder, dan tersier)	Kawasan Perumahan dan Permukiman tumbuhan dan	Pengembangan kawasan baru terbangun

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		meliputi drainase kawasan/ lingkungan dan pengendalian banjir dari luapan sungai utama maupun Banjir ROB dari pengaruh pasang yang cukup tinggi di beberapa perkotaan sehingga belum dapat mengurangi luasan genangan	berkembang pada kawasan rawan banjir, baik karena dataran banjir, daerah rendah, dsb	diarahkan pada daerah yang lebih tinggi, untuk menghindari peningkatan kawasan banjir dan luasan genangan akibat kurangnya kemampuan sistem drainase
7	Air Minum	Memelihara dan meningkatkan sistem perpipaan yang ada (SPAM PDAM) untuk rasio dan cakupan pelayanan perkotaan dan pusat – pusat produksi yang luas belum terpenuhi, disamping sumber air baku yang ada cukup terbatas	Kawasan pengembangan baru yang harus dilayani cukup banyak, sistem SPAM belum mampu menjangkau	Telah terdapat sistem SPAM oleh PDAM yang masih perlu ditingkatkan cakupan pelayanannya
8	Air Limbah	Belum terdapat IPLT, dan IPAL Kawasan serta sarana prasarana penunjang operasional	Kurangnya kesiapan perencanaan pembangunan kawasan dan	IPLT telah mulai dibangun tahun 2016, sarana prasarana dan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		lainnya.	lingkungan dengan sistem Air Limbah dan belum siapnya masyarakat	sistem pendukungnya akan di siapkan secara bertahap
II	<b>Rencana Pola Ruang</b>			
1	Kawasan Lindung	Degradasi Hulumenurunkan kemampuan persediaan air baku dan meningkatkan banjir atas menurunnya kemampuan Catchment nya	Pengendalian pemanfaatan daerah hulu sebagai catchment terdapat pada sektor lainnya	Sistem Sungai kewenangannya terdapat pada Dinas PU
2	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Belum semua kawasan pertanian sebagai pusat-pusat produksi terlayani dengan sistem irigasi yang baik dan optimal	Belum adanya penatapan dan legalisasi terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang disertai sistem insentif sebagai pendukung perwujudannya	Jumlah lahan pertanian yang harus dilayani irigasi berkurang, karena beralih ke perkebunan
II	<b>Rencana Pola Ruang</b>			
3	Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman tumbuh berkembang	Legalitas RTR Kawasan Perkotaan	Kawasan Permukiman

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perkotaan dan Perdesaan	meluas, tanpa diikuti dengan jaringan infrastruktur dan PSU yang melayaninya	sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan dan rencana pengembangan permukiman terkendala belum selesainya perda RTRW Kabupaten, sehingga dari sisi pelayanan publik belum terdapat legalitas perizinan pemanfaatan ruang	diarahkan secara terpusat pada beberapa pusat tertentu: Simpang empat-Batulicin, Sungai Danau Satui, dan beberapa Pusat Permukiman Perdesaan lainnya
4	Kawasan Pariwisata	Fokus pengembangan pariwisata bahari belum dapat didukung oleh pelayanan infrastruktur pendukungnya dengan baik	Kawasan Pariwisata Bahari terkadang berbenturan dengan kepentingan Kawasan Lainnya (Pelabuhan dan Pengembangan Permukiman)	Telah terdapat potensi pesisir yang didukung dengan perencanaan pengelolaan pesisir dan sudah dalam status legalitas peraturan bupati (RZWP3K)
5	Kawasan	Infrastruktur pelabuhan	Meskipun dokumen	Telah terdapat

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelabuhan	belum dapat dibangun	awal perencanaan pelabuhan telah tersedia, namun masih terkendala proses pengembangan, dari awal yaitu ketersediaan lahan/ tanah, status tanah masih belum dikuasai pemerintah	beberapa pola ruang kawasan pelabuhan yang ditetapkan dalam draft pola ruang dan tersedia perencanaannya
6	Kawasan industri	Infrastruktur dan Prasarana Sarana Umum, serta Utilitas Kawasan industri yang belum terbangun, khususnya pemenuhan air baku untuk proses pengolahan industri yang juga belum siap.	Pengembangan infrastruktur pendukung belum siap, dan masih belum terdapat dokumen-dokumen perencanaan panduan konstruksi (DED)	Pertumbuhan pembangunan kawasan cukup lambat sehingga memberikan peluang dan kesempatan waktu untuk membangun infrastruktur kawasan
III	<b>Rencana Kawasan Strategis</b>			
1	Kawasan	Pengembangan	Perwujudan Kawasan	Telah terdapat

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Strategis Nasional (KSN) : Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batulicin	infrastruktur pendukung belum siap, dan masih belum terdapat dokumen-dokumen perencanaan panduan konstruksi (DED)	Strategis juga bergantung terhadap sektor lainnya	Dokumen RTR Kawasan
2	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Perdagangan Jasa dan Indurtsi Batulicin</li> <li>Kawasan Pesisir</li> </ul>	Pengembangan infrastruktur pendukung belum siap, dan masih belum terdapat dokumen-dokumen perencanaan panduan konstruksi (DED)	Perwujudan Kawsan Strategis juga bergantung terhadap sektor lainnya	Telah terdapat Dokumen RTR Kawasan
3	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaw KAPET</li> <li>Kaw Agropolitan</li> <li>Kaw</li> </ul>	Pengembangan infrastruktur pendukung belum siap, dan masih belum terdapat dokumen-dokumen perencanaan panduan konstruksi (DED)	Perwujudan Kawsan Strategis juga bergantung terhadap sektor lainnya	Telah terdapat Dokumen RTR Kawasan, Dokueman Masterplan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Minapolitan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaw Batulicin &amp; Gunung Tinggi</li> <li>• Kaw Pelabuhan</li> </ul>			

### 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang urusan Pekerjaan Umum, menemukan berbagai permasalahan, antara lain :

#### **UMUM :**

1. Keterbatasan anggaran pembangunan
2. SDM :
  - Operator lapangan minimal S1
  - Aparatur negara
3. Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi
4. Organisasi kerja kurang efektif dalam distribusi beban kerja
5. Terbatasnya Sarana kerja
6. Kurangnya regulasi pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi
7. Keterbatasan pembebasan lahan dalam pelaksanaan konstruksi
8. Kurangnya keterpaduan dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan infrastruktur lintas sektor

## **A. Bidang Bina Marga**

1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur Jalan Kab., jalan poros kecamatan, jalan poros desa dan jalan desa/lingkungan yang menghubungkan ke pusat-pusat kegiatan kabupaten, propinsi dan nasional serta peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat;
2. Pembangunan dan peningkatan jalan baru terkendala oleh penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana;
3. Letak jalan poros kecamatan dan desa yang berada di tengah perkebunan sawit dan karet yang mengakibatkan seringnya dilintasi angkutan muatan sawit dan karet dengan pembebanan berlebih (*overloading*) sehingga umur jalan yang direncanakan tidak terpenuhi;
4. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan dan karena belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi dan melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan ditengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan;
6. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan Jalan Kab./kota;
7. Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pelanggan;
8. Tidak kontinyunya update data aset infrastruktur Jalan Kab., jalan poros kecamatan, jalan poros desa dan jalan lingkungan, karena keterbatasan personil yang khusus menangani tentang hal tersebut.
9. Belum adanya regulasi daerah tentang sempadan jalan

## **B. Bidang Cipta Karya**

1. Kurangnya rasa memiliki (*sense of belonging*) infrastruktur Air Bersih/minum yang dibangun pemerintah;
2. Kerusakan hutan dan DAS yang parah terhadap penyediaan sumber air baku
3. Teknologi Pengelolaan dan distribusi air SPAM yang masih sangat terbatas.
4. Penyediaan Bangunan gedung pemerintah sebagai sarana kerja untuk pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pelayanan kemasyarakatan belum terpenuhi;
5. Kondisi beberapa bangunan gedung pemerintah daerah tidak terpelihara dengan baik karena rendahnya volume kegiatan dan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung;
6. Belum tersedianya lahan perkantoran yang bebas guna pembangunan perkantoran di kabupaten tanahumbu;
7. Belum adanya Peruntukan kawasan yang jelas sesuai dengan RTRW
8. Rendahnya capaian pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat karena perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan BABS dan tingkat ekonomi yang tidak memungkinkan pembuatan jamban rumah
9. Sistem sanitasi individu yang tidak memenuhi standart
10. Meningkatnya jumlah dan penyebaran genangan karena jaringan drainase yang terbatas, meningkatnya perkembangan lahan terbangun, semakin berkurangnya daerah resapan air karena pembangunan fisik yang tidak ramah lingkungan, tidak berfungsinya saluran drainase karena tersumbat oleh sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat.
11. Terbatasnya infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman
12. Belum adanya ketegasan kewenangan penanganan infrastruktur lingkungan di desa, terkait dengan ketersediaan dana desa.
13. Masih adanya penyebaran kawasan kumuh karena minimnya infrastruktur lingkungan yang layak, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, dan kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur lingkungan yang rendah.

14. Keterbatasan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program-program kecipta karyaan.
15. Pengendalian pengembangan perumahan yang tidak diikuti dengan penyediaan infrastruktur perumahan yang memadai
16. Kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanganan kawasan permukiman di tepi sungai
17. Konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan karena ketidakpastian status lahan, perubahan kebijakan dan keterbatasan anggaran.
18. Kontinuitas ketersediaan air baku untuk program air minum non perpipaan atau perdesaan, yang mengakibatkan menurunnya animo pengelolaan instalasi secara swadaya oleh masyarakat.
19. Tidak terkoordinasinya prioritas pelaksanaan program yang bersumber dari kontribusi pembiayaan pihak swasta melalui program kemitraan (CSR), sehingga tidak tercapai ,Tepat sasaran
20. Belum terbentuknya tim tenaga ahli bangunan gedung (TABG)

### **C. Bidang Pengairan**

1. Perubahan iklim global akibat degradasi lingkungan yang disebabkan Pembangunan yang tidak ramah lingkungan yang berpengaruh terhadap musim tanam yang memerlukan air irigasi;
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat/P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dalam pengelolaan Tata guna air irigasi dan sumber Daya Air.
3. Belum ada Perda tentang Pengelolaan Irigasi dan Sungai, Danau, Cekdam, Embung dan Pantai.
4. Kurangnya suplai air baku untuk irigasi pada saat musim kemarau karena belum adanya irigasi teknis.
5. Kurangnya kegiatan normalisasi sungai untuk mengatasi tingginya sedimentasi yang mengakibatkan menurunnya kapasitas tampung sungai terhadap debit banjir.
6. Rendahnya penanganan abrasi pantai karena terbatasnya anggaran

7. Belum maksimalnya penerapan Perda tentang Sempadan Sungai
8. Menurunnya tingkat layanan irigasi karena berkurangnya areal pertanian akibat alih fungsi lahan
9. Pemanfaatan potensi air baku dan pengendalian daya rusak air yang berlimpah saat musim hujan, sementara pada saat musim kemarau mengalami kekeringan, karena saat air berlimpah tidak dapat tertampung akibat belum adanya bangunan penampung air (bendungan) yang multi fungsi yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku, energi listrik, irigasi, dan pengendali banjir

#### **D. Bidang tata ruang dan jasa konstruksidan Jasa Konstruksi**

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang
2. Belum maksimalnya pengawasan dalam hal pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan tata ruang yang semakin berkualitas, karena terbatasnya sumberdaya manusia dan anggaran pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang
3. Kondisi eksisting pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, antara lain sempadan sungai, sempadan pantai kawasan hutan dan lainnya.
4. Minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik karena terbatasnya lahan terbuka di kawasan perkotaan dan terbatasnya anggaran untuk pembebasan lahan.
5. Belum adanya sarana sistem informasi pemanfaatan tata ruang sebagai media untuk sosialisasi aturan dan ketentuan pemanfaatan ruang.
6. Adanya resistensi masyarakat terkait penerapan kebijakan pemanfaatan tata ruang.
7. Terbatasnya sumberdaya penyedia jasa konstruksi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Sebagai instansi pelaksana teknis pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dihadapkan pada sejumlah isu-isu pembangunan baik yang semakin kompleks.

Isu ini adalah bagian dari berbagai fakta dan permasalahan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu. Isu-isu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Industri Batulicin sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional
2. Pengelolaan sumberdaya air yang terpadu untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan ketahanan energi, yang akan dihidupkan melalui sasaran strategis :
  - a. Meningkatnya dukungan ketahanan air
  - b. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi dengan sasaran program :
    - 1) Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku
    - 2) Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air
    - 3) Meningkatnya kinerja layanan irigasi
    - 4) Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air
    - 5) Meningkatnya upaya konservasi SDA
    - 6) Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
    - 7) Meningkatnya potensi energi dan sumber-sumber air
3. Pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Koridor 22 yang meliputi Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin
4. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Batulicin-Martapura-Banjarbaru
5. Pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Kotabaru
6. Pembangunan infrastruktur dalam mendukung penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan

maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

7. Universal akses untuk terpenuhinya kebutuhan air minum 100 %, penanganan kawasan kumuh hingga 0 % dan pemenuhan sanitasi yang layak sebesar 100 %.
8. Penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas air bersih/minum bagi masyarakat;
9. belum merata dan optimalnya pembangunan/pemeliharaan infrastruktur bidang pengairan di semua desa dan kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu;
10. tingginya daya rusak air seperti banjir dan gelombang laut;
11. belum memadainya kualitas SDM dan partisipasi petani dalam Pengelolaan Air irigasi.
12. Semakin meningkatnya konflik pemanfaatan ruang karena konflik kepentingan antar sektor seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan prasarana wilayah;
13. kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang kawasan.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut

Tabel 3.4.

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tata Ruang	10 %	SPM 100 %	Legalisasi rencana tata ruang & sosialisasi pemanfaatan ruang	Proses Ranperda di DPRD dan persetujuan substansi di BKPRD Prov, Kementerian ATR dan BIG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya status hukum yang jelas berupa Perda pada RDTR Kecamatan sebagai pedoman pemanfaatan ruang</li> <li>• Belum maksimalnya pengawasan dalam hal pemanfaatan ruang</li> </ul>
Jalan dan Jembatan	75,46 %	SPM 60 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan Kab. sepanjang 957,59 km</li> <li>• Pemeliharaan dan pelebaran Jalan Kab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan nasional sepanjang 228,10 km yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</li> <li>• Jalan swasta milik perusahaan perkebunan dan pertambangan</li> <li>• Pembebasan lahan dikoordinasikan dengan SKPD terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana</li> <li>• pembebanan berlebih (overloading ) oleh angkutan perkebunan &amp; tambang</li> <li>• kerusakan jalan pada jalan nasional dan jalan perusahaan yang dimanfaatkan sebagai akses bagi penduduk bukan kewenangan kabupaten</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Air Minum	48,76 %	SPM 81,77 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan air baku untuk IPAM yang telah dibangun</li> <li>• Pengembangan akses air minum bagi MBR dan non perpipaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan IPA baru dapat diusahakan melalui provinsi maupun pusat.</li> <li>• Pengembangan Pamsimas pada daerah rawan air</li> <li>• Peningkatan jumlah layanan melalui SR perpipaan oleh PDAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sense of belonging infrastruktur Air Bersih/minum yang dibangun pemerintah</li> <li>• Teknologi Pengelolaan dan distribusi air SPAM yang masih sangat terbatas</li> </ul>
Sanitasi	3,20 %	SPM 60 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jaringan SR, pengelolaan, operasi dan pemeliharaan menjadi kewenangan dinas PU</li> <li>• Penyiapan masyarakat dan sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan IPAL Terpusat dan Komunal dilakukan oleh pusat</li> <li>• Penyediaan jamban rumah tangga oleh dinas kesehatan</li> <li>• Pengelolaan IPAL oleh komunitas masyarakat atau lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya minat masyarakat untuk pembangunan sanitasi yang sehat</li> <li>• Masih tingginya ketergantungan terhadap BABS</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pengelola (UPTD)	
Perumahan Permukiman	40 %	SPM Menpera 100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan lokasi kawasan permukiman</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dasar permukiman berupa jalan, sanitasi dan saluran drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan ekonomi masyarakat</li> <li>• Keterlibatan pengembang perumahan dalam pembangunan rumah</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dasar lainnya oleh SKPD/BUMN terkait, seperti listrik, pengelolaan sampah, telekomunikasi dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penduduk yang menyebar</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang permukiman</li> </ul>
Ruang Terbuka Hijau	1,89 %	SPM 50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan penyiapan lokasi RTH</li> <li>• Pembangunan RTH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembebasan lahan oleh Tapem</li> <li>• Pengoperasian dan Pemeliharaan RTH oleh dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya lahan terbuka di permukiman dan ibukota kecamatan</li> <li>• Besarnya dana pembebasan lahan &amp; pembangunan RTH</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terkait	
Bangunan Gedung	76,09 %	100 % RPJP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan pembangunan bangunan kantor pemerintah dan fasilitas sosial/ umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembebasan lahan oleh Tapem</li> <li>Pengoperasian dan Pemeliharaan bangunan gedung oleh dinas terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya SKPD yang belum memiliki Bangunan gedung pemerintah</li> <li>Terbatasnya Fasos dan fasum yang disediakan oleh pemerintah</li> <li>Terbatasnya anggaran pemeliharaan</li> </ul>
Jaringan Irigasi	64 %	SPM 70 %	424.571 m jaringan irigasi kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten	Rencana pembangunan bendungan Kusan yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerusakan hutan lindung dan DAS</li> <li>Masih kurangnya partisipasi masyarakat/P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dalam pengelolaan Tata guna air irigasi dan sumber Daya Air</li> <li>Banyaknya luas lahan sawah yang tidak terairi air irigasi, yang diakibatkan baik saluran maupun bangunan irigasi rusak sehingga tidak berfungsi optimal.</li> </ul>



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi dan Misi**

Sebagai suatu instansi, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, untuk merespon tuntutan masyarakat. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting. Analisis tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah, dalam hal ini adalah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. Unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

#### **A. VISI**

Visi adalah merupakan tujuan atau gambaran dimasa akan datang yang diharapkan dapat direalisasikan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada secara proporsional dan professional. Visi juga dapat diartikan sebagai gambaran suatu keadaan ideal organisasi dimasa depan yang realistis, memiliki daya tarik untuk mencapainya serta merupakan suatu pandangan yang dikonsentrasikan kedepan dan merupakan tuntutan dan tantangan terhadap hal-hal yang ingin diwujudkan. Dengan demikian sebuah visi diperlukan untuk menjadi penentu dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan segala aktivitas dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi dan realitas lingkungan sekitar. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), bahwa visi dapat didefinisikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Lebih lanjut dinyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagai salah satu unsur perangkat daerah memiliki Visi seiring dengan Visi Kabupaten Tanah Bumbu yang berbunyi :

**"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi".**

Penjelasan Visi:

Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang membangun, meningkatkan dan memelihara infrastruktur secara terpadu dan berkesinambungan dengan didukung sumberdaya manusia pelaku jasa konstruksi yang berkualitas, pemanfaatan teknologi dan pendayagunaan sistem informasi.

**B. MISI**

Sesuai dengan era globalisasi sekarang ini dituntut untuk mengenali pergeseran dari organisasi yang berorientasi pada peraturan ke orientasi pada misi. Hal ini merupakan strategi yang bermuara pada kerja organisasi pemerintah yang selalu diarahkan pada misi yang hendak dicapai, dengan mengatasi berbagai keterbatasan dalam peraturan maupun dana yang tersedia. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan organisasi sesuai dengan visi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dapat menjelaskan tujuan keberadaan organisasi. Misi yang diemban oleh DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan prasarana aparatur dan publik
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah
3. Meningkatkan pengelolaan SDA
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan
5. Melaksanakan kinerja program penataan ruang
6. Melaksanakan kinerja jasa konstruksi

Sebagai suatu instansi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, untuk merespon tuntutan masyarakat. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan(*strengths*), kelemahan(*weaknesses*), peluang(*opportunities*), dan tantangan/kendala(*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah, dalam hal ini adalah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

### **A. Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik
2. Meningkatkan ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota
3. Meningkatkan ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan
4. Meningkatkan infrastruktur irigasi, sumberdaya air baku yang lebih optimal untuk pertanian dan penganggulan daya rusak air
5. meningkatnya pelayanan air bersih, air limbah
6. Meningkatkan Layanan jasa konstruksi

Adapun indikator kinerja tujuan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.1

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
		TUJUAN	2015	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik	Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	43.53%	100.00%
2	Meningkatkan ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	Persentase jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (belum dilalui roda 4)	8.05%	5.37%
3	Meningkatkan ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	57.71%	89.42%
4	Meningkatkan infrastruktur irigasi, sumberdaya air baku yang lebih optimal untuk pertanian dan penganggulan daya rusak air	Luas lahan pertanian yang beririgasi (ha)		
		Kapasitas air baku yang telah ditampung	876.013 m3	882.000 m3
		Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani	9.111 ha	13.959 Ha
		persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi	5.15%	49.15%
5	meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	53.32%	94.86%
		Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah	15.61%	100.00%
6	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)	285 Ha	310 Ha
		Persentase tercapainya kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	-	80.00%
7	Meningkatkan Layanan jasa konstruksi	IKM layanan jasa konstruksi	79.00%	85.00%

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang adalah sejalan dengan misi yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu :

Tabel 4.2.2.

## Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana aparatur dan publik	Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	52.94%	64.71%	76.47%	88.24%	100.00%	100.00%
2	Meningkatkan ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	Meningkatkan kualitas prasarana transportasi	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	51.85%	60.69%	69.53%	72.57%	79%	78.84%
3	Meningkatkan ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan		Persentase jembatan dalam kondisi baik	63.56%	66.67%	72.44%	81.78%	100.00%	100.00%
4	Meningkatkan infrastruktur irigasi, sumberdaya air baku yang lebih optimal untuk pertanian dan penganggulan daya rusak air	meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	48.00%	53.00%	55.00%	57.00%	60.00%	62.00%
		Meningkatnya kapasitas tampung sumber daya air yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara	Kapasitas air baku yang telah ditampung	878.000 m3	879.000 m3	880.000 m3	881.000 m3	882.000 m3	882.000 m3
		Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	59.93%	61.22%	62.51%	63.79%	65.08%	65.08%
			persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi	19.17%	26.66%	34.14%	45.66%	49.15%	49.15%
5	meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah	Meningkatnya kinerja pengelolaan air bersih	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	63.51%	70.46%	77.05%	83.30%	89.23%	94.80%
			Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM) Non Perpipaan	61.81%	67.36%	71.53%	75.69%	79.86%	79.86%
		Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah	Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah	20.23%	75.72%	88.44%	92.49%	100%	100%
6	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Terwujudnya Lahan RTH	RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)	290 ha	295	300	305	310	310
		Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0.00%	13.33%	26.67%	40.00%	53.33%	66.67%
			Persentase Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Persentase Terlaksanannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	Meningkatkan Layanan jasa konstruksi	Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 4.2.3.

## Indikator Kinerja Utama SKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas prasarana transportasi	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	" Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik " /"Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut " "x100"	Dinas Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan umum
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Jumlah jembatan yang baik /jumlah total target jembatan	Dinas Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan umum
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	"Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik " /("Luas irigasi kabupaten " ) "x100"	Dinas Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan umum
3	Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	(" Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km)" )/"Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)" "x100"	Dinas Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan umum
4	Meningkatnya kinerja pengelolaan air bersih	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	"Jumlah RT menggunakan air bersih " /"Jumlah RT" " x100"	Dinas Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan umum
5	Terwujudnya Lahan RTH	RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)	Total luas RTH yang Sudah terbangun tiap tahun	Dinas Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan umum
6	Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK	Σusaha jasa konstruksi yang memiliki SIUJK/ Σusaha jasa konstruksi seluruhnya	Dinas Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan umum

Tabel 4.2.4.  
Target Indikator Kinerja Utama SKPD

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	51.85%	60.69%	69.53%	72.57%	79%	78.84%
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	63.56%	66.67%	72.44%	81.78%	100.00%	100.00%
3	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	48.00%	53.00%	55.00%	57.00%	60.00%	62.00%
4	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	59.93%	61.22%	62.51%	63.79%	65.08%	65.08%
5	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	63.51%	70.46%	77.05%	83.30%	89.23%	94.80%
6	RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)	290 ha	295	300	305	310	310
7	Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu menerapkan beberapa strategi dalam bentuk program Dinas yakni:

Tabel 4.3.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
(Mendukung Misi I)

VISI :			
Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
MISI I : Mewujudkan prasarana aparatur dan publik. (Penanggungjawab: Bidang Cipta Karya)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana aparatur dan publik	Penyediaan prasarana kerja dan publik yang memadai	Melakukan evaluasi terhadap kuantitas dan kualitas prasana aparatur dan publik

Tabel 4.3.2.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
(Mendukung Misi II)

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI II :</b> Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah. (Penanggungjawab: Bidang Binamarga)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota 2. Meningkatkan ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	1. Persentase jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) 2. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari jalan arteri nasional dengan kawasan-kawasan perkotaan, kawasan strategis dan kawasan produktif 2. Peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas yang mendukung kelancaran arus distribusi dari	1. Membangun jalan poros dan penghubung primer sekunder antar kawasan dan pusat-pusat lingkungan 2. Memelihara dan membangun jalan untuk pengembangan komoditas 3. Membangun jalan poros dan penghubung primer sekunder antar kawasan dan pusat-pusat lingkungan 4. Memelihara jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, baik dan sedang

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI II : Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah.</b> (Penanggungjawab: Bidang Binamarga)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		sentra-sentra produksi sumberdaya mineral dan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus  3. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari jalan arteri nasional dengan kawasan-kawasan perkotaan, kawasan strategis dan kawasan produktif  4. Memperbaiki dan meningkatkan	

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI II :</b> Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah. (Penanggungjawab: Bidang Binamarga)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		kondisi Jalan Kab., jalan desa dan jalan lingkungan	

Tabel 4.3.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
*(Mendukung Misi III)*

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI III :</b> Meningkatkan pengelolaan SDA. (Penanggungjawab: Bidang Pengairan dan Bidang Cipta Karya)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
'Meningkatkan infrastruktur irigasi, sumberdaya air baku yang lebih optimal untuk	1. meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	1. Menciptakan sistem irigasi yang mampu menjamin produksi pertanian dan	1. Membangun, meningkatkan dan memelihara sistem irigasi  2. Membangun bendungan,

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI III : Meningkatkan pengelolaan SDA.</b> (Penanggungjawab: Bidang Pengairan dan Bidang Cipta Karya)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
pertanian dan penganggulangan daya rusak air	2. Meningkatkan kapasitas tampung sumber daya air yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara	1. menjaga ketahanan pangan 2. Meningkatkan ketersediaan air baku, melalui peningkatan kemampuan catchment di daerah hulu (konservasi sumberdaya air) dan membangun bangunan bendung dan penampung	1. waduk dan embung, 3. Menyiapkan dan melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan bending, waduk dan embung sesuai SOP. 4. pembangunan prasarana pengamanan abrasi pantai di sepanjang pantai 5. Membangun, meningkatkan dan memelihara sistem drainase
	3. Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan	3. Mengendalikan daya rusak air baik	

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI III : Meningkatkan pengelolaan SDA.</b> (Penanggungjawab: Bidang Pengairan dan Bidang Cipta Karya)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		dari hulu hingga hilir  4. Strategi pengembangan Sistem pengamanan pantai meliputi pembangunan prasarana pengamanan abrasi pantai di sepanjang pantai  5. Meningkatkan kapasitas Sistem Drainase Primer pada seluruh jaringan sungai  6. Meningkatkan kapasitas Sistem drainase sekunder di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer	

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI III :</b> Meningkatkan pengelolaan SDA. (Penanggungjawab: Bidang Pengairan dan Bidang Cipta Karya)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada kompleks perumahan dan kawasan perkantoran	

Tabel 4.3.4  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG  
*(Mendukung Misi IV)*

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI IV :</b> Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan (Penanggungjawab: Bidang tata ruang dan jasa konstruksi dan Bidang Cipta Karya)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pelayanan air bersih, air limbah dan perumahan	1. Meningkatkan kinerja pengelolaan air bersih	1. Memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum rumah tangga domestik dan non	1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas system air minum perpipaan dan non perpipaan 2. Mengembangkan

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI IV :</b> Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan (Penanggungjawab: Bidang tata ruang dan jasa konstruksi dan Bidang Cipta Karya)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2. Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah  3. Meningkatkan kualitas perumahan	domestik di perkotaan dan perdesaan  2. Mensuplai kebutuhan air bersih dan air minum untuk kawasan dan zona prioritas. Pengembangan SPAM Perpipaan dengan menggunakan PDAM di seluruh kecamatan.  3. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik/ rumah tangga  4. Mengurangi cemaran lingkungan	sistem air minum pada zona-zona prioritas  3. Membangun septik tank komunal dan toilet umum  4. Mengembangkan IPAL Skala Lingkungan dan Skala Kawasan pada Kawasan Pengembangan Baru  5. Penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar dan PSU  6. Mengembangkan kawasan perumahan skala besar  7. Penataan dan pembangunan kembali kawasan kumuh

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI IV :</b> Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan (Penanggungjawab: Bidang tata ruang dan jasa konstruksidan Bidang Cipta Karya)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		akibat air limbah domestik  5. Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan prasarana sarana umum  6. Menata kawasan permukiman kumuh dan lingkungan permukiman yang tidak layak huni	8. Membangun rumah sederhana dan perumahan PNS  9. Penyusunan data dan informasi bangunan gedung yang telah terbangun  10. Pengendalian dan pengawasan penerapan persyaratan bangunan gedung/laik fungsi

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI IV :</b> Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan (Penanggungjawab: Bidang tata ruang dan jasa konstruksidan Bidang Cipta Karya)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		7. Menyediakan rumah tinggal yang layak dan terjangkau dalam kawasan perumahan dan permukiman yang tertata  8. Pembinaan dan Pengaturan Bangunan Gedung  9. Pembinaan pelaksana bangunan gedung	

Tabel 4.3.5.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG

(Mendukung Misi V)

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi.			
<b>MISI V:</b> Melaksanakan kinerja program penataan ruang. (Penanggungjawab: Bidang Tata Ruang)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.	Terwujudnya Lahan RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan luasan dan proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan</li> </ul>	1. Mendorong dan menciptakan kondisi penyediaan ruang terbuka hijau privat melalui regulasi dan insentif.  2. Merencanakan dan membangun serta menata ruang terbuka hijau public di kawasan perkotaan.

Tabel 4.3.6.  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
 RUANG  
*(Mendukung Misi VI)*

<b>VISI :</b> Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi..			
<b>MISI VI:</b> Melaksanakan kinerja jasa konstruksi (Penanggungjawab: Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Layanan jasa konstruksi	Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi	1. Membuat SOP Pelayanan Rekomendasi IUJK	1. Menerbitkan rekomendasi paling lambat 10 hari apabila berkasnya lengkap

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini.

## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
Kabupaten Tanah Bumbu  
Tahun 2016 s.d 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE REKENING	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	
Meningkatkan kebutuhan untuk kinerja aparatur dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan publik	Tingkat kelengkapan sarana dan Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana publik (bangunan umum)	1 03 0 02 03	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100	100	7,120,400,000	100	8,544,480,000	100	8,668,500,000	100	8,792,640,000	100	8,816,720,000	100	41,942,740,000	Dinas Pekerjaan Umum	
					terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana publik				55	65		75		85			85	35,120,400,000		
		x xx xx 02 07	pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	32	2	7,120,400,000	4	7,000,000,000	6	7,000,000,000	8	7,000,000,000	10	7,000,000,000	10	7,000,000,000	10	35,120,400,000	
		x xx xx 02 12	Pembangunan Sarana Umum	Jumlah Sarana umum yang dibangun					1544480000		1668500000		1792640000		1816720000		6,822,340,000			
		Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	1 03 1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	2,726,760,700	2,999,436,770	100	3,272,112,840	100	3,544,788,910	100	3,817,464,980	100	16,360,564,200			Dinas Pekerjaan Umum
		1 03 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				86,100,000		94710000		103320000		111930000		120540000		516,600,000			
		1 03 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbinaan kendaraan dinas/operasional				239,650,000		263615000		287580000		311545000		335510000		1,437,900,000			
		1 03 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				345890000		380479000		415068000		449657000		484246000		2,075,340,000			
		1 03 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				9,580,000		10538000		11496000		12454000		13412000		57,480,000			
		1 03 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				44,100,000		48510000		52920000		57330000		61740000		264,600,000			
		1 03 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor				73,918,700		81310570		88702440		96094310		103486180		443,512,200			
		1 03 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan komunikasi				11,750,000		12925000		14100000		15275000		16450000		70,500,000			
		1 03 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				4,212,000		4633200		5054400		5475600		5896800		25,272,000			
		1 03 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				277,250,000		304975000		332700000		360425000		388150000		1,663,500,000			
		1 03 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman				20,160,000		22176000		24192000		26208000		28224000		120,960,000			
		1 03 01 01 18	Kapak rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				913,000,000		1004300000		1095600000		1186900000		1278200000		5,478,000,000			
		1 03 01 01 19	Penyediaan jasa tenaga non PNS				514250000		565675000		617100000		668525000		719950000		3,085,500,000			
	1 03 01 01 22	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)				186,900,000		205590000		224280000		242970000		261660000		1,121,400,000				
	Meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	1 03 1 03 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut	100	100	25,250,000	100.000	25250000	100	26000000	100	28000000	100	30000000	100	134,500,000	Dinas Pekerjaan Umum
			1 03 01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang		56 stel	25,250,000	100.000	25250000	100	26000000	100	28000000	100	30000000	100	134,500,000		
	Terlaksananya pelatihan jasa konstruksi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pelatihan jasa konstruksi	1 03 1 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pelatihan jasa konstruksi		100	561,340,000								561,340,000			
			1 03 01 05 02	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan			3	561,340,000									561,340,000			
Meningkatkan aksesibilitas kawasan strategis perkotaan dan pedesaan	Meningkatkan aksesibilitas kawasan strategis perkotaan dan pedesaan	Persentase Tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	1 03 x x 15 x	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	69%	71%	250,458,020,000	73%	*****	75%	121,000,000,000	77%	135,000,000,000	79%	143,000,000,000	79%	*****	Dinas Pekerjaan Umum	
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah					2.97%	10%		30%		50%		70%		90%		100%		
			1 03 xx 15 03	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun/dokumen	81.178	5.6	429,900,000	5.6		5.6		10.61	25,591,571,429	15.62	25,591,571,429	15.62	51,613,042,858	96.798	
			1 03 xx 15 05	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	140	3	4,297,700,000	3		23	2,132,000,000	44	2,228,000,000	85	4,228,000,000	85	12,885,700,000	225	
			1 03 xx 15 07	Peningkatan jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	562.119	60	245,730,420,000	95	107,879,750,000	171.84	118,868,000,000	232.02	107,180,428,571	307.31	113,180,428,571	307.31	692,839,027,142	869.429	
				Penerangan Jalan/PJU																
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	1 03 xx 31	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	18.76%	20.09%		22.05%	8,175,650,000.00	23.77%	7,000,000,000	25.48%	7,000,000,000	27.20%	7,000,000,000	27.20%	29,175,650,000		
			1 03 xx 31 01	Peningkatan jalan lingkungan	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	105323	7,500		18,500	8,175,650,000.00	28,125	7,000,000,000	37,750	7,000,000,000	47,375	7,000,000,000	47,375	29,175,650,000		
				pemeliharaan jalan lingkungan																
				Program Peningkatan Jalan dan Jembatan																
				Peningkatan jalan lingkungan	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	105323	7500 m	11,887,450,000												

Indikator Sasaran	KODE REKENING	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab					
					2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22		
Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur rencana Presentase Jembatan yang terpelihara	1	03	x x	18	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur rencana	100%	100%	10,105,400,000	100%	#####	100%	16,433,000,000	100%	16,433,000,000	100%	16,433,000,000	100%	#####	Dinas Pekerjaan Umum		
						Presentase Jembatan yang terpelihara	100%			100%		100%		100%								
		1	03	xx	18	03	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang di lakukan pemeliharaan	1.5	2,984,300,000	6.83	8,000,000,000	13.50	10,000,000,000	20.83	11,000,000,000	28.83	12,000,000,000	28.83	43,984,300,000		
		1	03	xx	18	04	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang direhab	4	7,121,100,000	27	8,433,000,000	50	6,433,000,000	73	5,433,000,000	95	4,433,000,000	95	31,853,100,000		
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan	1	03	x x	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	64%	68.44	30,948,180,000	74.46	14,000,000,000	78.11	30,948,180,000	81.65	30,948,180,000	83.12	30,948,180,000	86.56	#####	Dinas Pekerjaan Umum		
						Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	49			53		49,659,250,000										
		1	03	xx	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	jumlah dokumen yang dihasilkan	2	2,042,000,000	4	2,042,000,000	4		5	1,000,000,000	6	1,000,000,000	6	6,084,000,000		
		1	03	xx	24	04	Perencanaan pembangunan pintu air	dihasilkan	1	57,550,000	3	100,000,000	4	500,000,000	4	-	4	-	4	657,550,000		
	1	03	xx	24	05	Perencanaan normalisasi saluran sungai	jumlah dokumen yang dihasilkan	11	1,095,200,000	12	500,000,000	12		13	500,000,000	14	500,000,000	14	2,595,200,000			
	1	03	xx	24	06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	dihasilkan	4	49,659,250,000									4	49,659,250,000			
	1	03	xx	24	08	Pembangunan pintu air	dihasilkan	4	610,450,000	6	100,000,000	11	750,000,000	16	1,698,180,000	26	1,500,000,000	26	4,658,630,000			
	1	03	xx	24	10	Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	luas Daerah irigasi Yang dipelihara	811	25,444,180,000	1,131.94	9,628,300,000	1,975.84	25,698,180,000	1,810.51	23,750,000,000	2,494.75	23,948,180,000	2,494.75	108,468,840,000			
	1	03	xx	24	14	Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai	panjang saluran sungai yang dipelihara	8000	629,700,000	18,000	1,129,700,000	25,500	1,000,000,000	40,500	2,000,000,000	55,500	2,000,000,000	55,500	6,759,400,000			
	1	03	xx	24	15	Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	panjang saluran irigasi terbangun yang dipelihara	150	629,700,000	2,650	500,000,000	2,717	2,000,000,000	2,783	2,000,000,000	2,850	2,000,000,000	2,850	7,129,700,000			
	1	03	xx	24	18	Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	jumlah dokumen yang dihasilkan	8	439,400,000			9	1,000,000,000					9	1,439,400,000			
Persentase tersedianya air baku untuk pertanian	1	03	x x	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah Bangunan Penampung Air	35	37	5,483,050,000	41	5,800,000,000	45	5,800,000,000	47	400,000,000	49	400,000,000	49	#####	Dinas Pekerjaan Umum		
		1	03	xx		26	01			Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya		Jumlah Bangunan Penampung Air		2		411,650,000		8		3,073,400,000.00	9	2,800,000,000
		1	03	xx	26		Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air	jumlah dokumen yang dihasilkan	2	5,071,400,000	3	2,726,600,000.00	4	3,000,000,000	5	400,000,000	6	400,000,000	6	11,598,000,000		
		1	03	xx	26	08																
Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir	1	03	x x	28	Program pengendalian banjir	Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi		19.17%	6,680,840,000	26.66%	7,800,000,000	34.16%	7,900,000,000	41.66%	6,100,000,000	49.15%	6,500,000,000	49.15%	#####	Dinas Pekerjaan Umum		
	1	03	xx	28		03	Rehabilitasi/ pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	panjang bantaran dan tanggul sungai yang dipelihara					2500	500,000,000	7500	1,000,000,000			7500	1,500,000,000		
	1	03	xx	28	12	Perencanaan Pengendalian Banjir	jumlah dokumen yang dihasilkan							1	1,500,000,000			1	1,500,000,000			
	1	03	xx	28	14	Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	panjang bantaran dan tanggul sungai yang dibangun	3000	229,750,000	10000	2,100,000,000	16000	2,000,000,000	22000	2,000,000,000	1 bangunan	5,500,000,000	22000	11,829,750,000			
	1	03	xx	28	09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	panjang pengaman pantai yang dibangun	81.95	5,858,590,000	163.9	4,700,000,000	303.9	4,450,000,000	354	1,600,000,000			354	16,608,590,000			
	1	03	xx	28	13	Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai	panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara	400	592,500,000	1000	1,000,000,000	1600	950,000,000			2200	1,000,000,000	2200	3,542,500,000			
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir	1	03	x x	16	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan	8%	15.58	13,010,250,000	19.37	3,600,000,000	23.16	3,600,000,000	26.95	3,600,000,000	30.74	3,600,000,000	34.53	#####	Dinas Pekerjaan Umum		
						Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir				28,818.800												
		1	03	xx	16	03	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Panjang drainase dalam kondisi baik	65815	94,633.800	13,010,250,000	100,879.800	3,600,000,000	107,125.800	3,600,000,000	113,371.800	3,600,000,000	119,617.800	3,600,000,000	119,617.800	27,410,250,000	
						Pemeliharaan Drainase																
					Pembangunan kolam retensi																	

Indikator Sasaran	KODE REKENING					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab						
									2016		2017		2018		2019		2020			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22				
Terbangunnya SPAM Non Perpipaan	1	03	x	x	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Terbangunnya SPAM Non Perpipaan	59.72%	61.81%	4,350,467,000	67.36%	6,104,653,000	71.53%	6,976,747,000	75.69%	4,360,467,000	79.86%	6,104,653,000	79.86%	#####					
	1	03	xx		30		10	Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)	jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan air		86 Desa	3	4,350,467,000		11	6,104,653,000	15	6,976,747,000		21	4,360,467,000	29	6,104,653,000	27,896,987,000	
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	1	03	x	x	31	Program Pengembangan SPAM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	48.76	53.06%		62.740		73.850		85.270		95.260		66.38%		Dinas Pekerjaan Umum				
								Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari			49,659,250,000		79,478,756,000		#####		175,106,000,000		205,650,180,000	11.55%		#####			
									2.03	3.370		4.910		6.260		7.900		9.650							
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	1	03	x	x	31	01	Pengembangan SPAM	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun			49,659,250,000		79,478,756,000		128,350,851,000		175,106,000,000		205,650,180,000		638,245,037,000				
	1	03	xx		27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	3.20%	3.78%	2,195,000,000	4.18%	46,264,514,023	5.34%	7,921,032,000	11.89%	9,063,225,000	14.81%	9,629,149,000	14.81%	75,072,920,023					
	1	03	xx		02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Dokumen		1	650,000,000	4	1,500,000,000	9	250,000,000	11	100,000,000	16	250,000,000	16	2,750,000,000					
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang	1	03	xx	27	12	Pengadaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Lingkungan	Rumah Tangga Bersanitasi	64963	1674	1,545,000,000	12000	44,764,514,023	4000	7,671,032,000	6000	8,963,225,000	7000	9,379,149,000	95637	72,322,920,023					
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana, dan	1	04	x	x	15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	57.85%	57.85%	926,500,000	61.90%	1,000,500,000	66.23%	10,150,000,000	70.86%	90,500,000,000	75.82%	41,000,000,000	75.82%	#####	Dinas Pekerjaan Umum				
								Cakupan ketersediaan rumah layak huni	40.00%	41.67%		50.00%		66.67%		83.33%		91.67%		100.00%					
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1	04	xx	15	01	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan		57,85	57.85%	0	61.90%	500,000	66.23%	3,150,000,000	70.86%	1,000,000,000	75.82%	1,000,000,000	75.82%	5,150,500,000					
	1	04	xx	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat		0		0		1,000,000,000		5,500,000,000		14,000,000,000		17,000,000,000		37,500,000,000					
	1	04	xx	15	09	Pembangunan Rusunawa		0		0		0		500,000,000		20,500,000,000		20,000,000,000		41,000,000,000					
	1	04	xx	15	05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha		0		0		0		1,000,000,000		0		0		1,000,000,000					
	1	04	xx	15	09	Pembangunan Rumah Dinas		0		0		0		0		55,000,000,000		3,000,000,000		58,000,000,000					
Persentase berkurangnya luasan permukiman	1	04	x	x	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase berkurangnya luasan permukaan kumuh di permukiman	4.9	6	901,750,000	7	4,000,000,000	8	19,520,000,000	9	21,240,000,000	10	16,580,000,000	10	#####	Dinas Pekerjaan Umum				
	1	04	xx	16	07		Pembangunan sarana dan prasarana	luasan yang ditangani	96,54		901,750,000		4,000,000,000		19,520,000,000		21,240,000,000		16,580,000,000						
Tersedianya Informasi Rencana Tata Ruang beserta Peta Analog dan Peta Digital	1	05	xx	x	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota beserta rencana rinciannya melalui Peta	10%	12%	1,050,000,000	40%	2,900,000,000	65%	5,750,000,000	87%	5,225,000,000	100%	1,075,000,000	100%	#####	Dinas Pekerjaan Umum				
	1	05	xx	15	02		Penetapan Kebijakan tentang RDTR, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen	-	-	4	500,000,000	8	1,300,000,000	7	1,175,000,000	3	525,000,000	22	3,500,000,000					
	1	05	xx	15	03		Penyusunan Rencana Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah Kegiatan	0	0	4	200,000,000	8	400,000,000	7	350,000,000	3	150,000,000	22	1,100,000,000					
	1	05	xx	15	05		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen	15	1	800,000,000	0	0	1	1,200,000,000	3	1,200,000,000	1	400,000,000	6	3,400,000,000				
	1	05	xx	15	06		Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen	0	0	4	2,200,000,000	2	2,000,000,000	3	1,200,000,000	0	0	9	5,400,000,000					
	1	05	xx	15	07		Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen	0	1	250,000,000	0	0	1	250,000,000	2	500,000,000	0	0	4	1,000,000,000				
	1	05	xx	15	11		Revisi Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen	0	0	0	0	4	800,000,000	4	800,000,000	0	0	8	1,600,000,000					
	1	05	x	x	16		Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang Dalam Peta Digital melalui Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Ruang (e-Planning, e-Permit, e-Development)	0.0%	0.6%	0	7.0%	950,000,000	18.0%	1,400,000,000	43%	9,700,000,000	100%	300,000,000	100%	#####					
	1	05	xx	16	01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen	0	0	0	2	950,000,000	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum				
	1	05	xx	16	03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen	0	0	0	0	0	3	1,150,000,000	4	9,400,000,000	1	100,000,000							
	1	05	xx	16	06	Pelathan aparat dalam pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen	0	0	0	0	0	10	100,000,000	10	100,000,000	0	0							
	1	05	xx	16	07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah Kegiatan	0	0	0	0	0	2	150,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000							

Indikator Sasaran	KODE REKENING					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja / Penanggung Jawab			
									2016		2017		2018		2019		2020			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	
Presentase terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1	05	xx	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Presentase terkendalinya Pemanfaatan Ruang	3%	3%	0	22%	1,050,000,000	38%	1,800,000,000	71%	4,110,000,000	100%	9,110,000,000	100%	#####	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	05	xx	17	02		Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen		0	0	0	1	750,000,000	1	750,000,000	0	0				
	1	05	xx	17	04		Pelatihan aparat dalam pengendalian	Jumlah peserta	0	0	0	0	0	1	200,000,000	1	200,000,000					
	1	05	xx	17	05		Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Kegiatan			0	0	2	50,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000				
	1	05	xx	17	07		Sosialisasi kebijakan pengendalian	Jumlah kegiatan		0	0	0	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000				
RTH Publik yang tersedia/ terbangun (Ha)	1	03	xx	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	RTH Publik yang tersedia/ terbangun (Ha)	1.89%	1.99%	600,000,000	2.09%	2,000,000,000	2.19%	25,000,000,000	2.29%	47,000,000,000	2.38%	55,000,000,000	2.38%	#####	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	08	xx	24	04	Penyusunan program pengembangan RTH	RTH Publik yang tersedia/			600,000,000		2,000,000,000		25,000,000,000		47,000,000,000		55,000,000,000				
Persentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling	1	05	xx	18		Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling	30%	40%	0	50%	350,000,000	60%	950,000,000	70%	650,000,000	80%	650,000,000	80%	2,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	05	xx	18	01	Peningkatan Kualitas Perusahaan Jasa Konstruksi				0		150,000,000		750,000,000		650,000,000		250,000,000				
	1	05	xx	18	02	Sertifikasi Jasa Konstruksi				0		200,000,000		200,000,000		0		400,000,000				

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok ;

- a. **Masukan (*Inputs*)** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. **Keluaran (*Outputs*)** adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi.

Indikator kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran RPJMD Tahun 2011 s.d. 2015 sertadata pendukung yang terorganisir. Penetapan Indikator kinerja ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.1.

## Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	80.69%	51.85%	60.69%	69.53%	72.57%	79%	78.84%	78.84%
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	62.22%	63.56%	66.67%	72.44%	81.78%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	43.22%	48.00%	53.00%	55.00%	57.00%	60.00%	62.00%	62.00%
4	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	3.9 %	59.93%	61.22%	62.51%	63.79%	65.08%	65.08%	65.08%
5	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	53.31%	63.51%	70.46%	77.05%	83.30%	89.23%	94.80%	94.80%
6	RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)	285 Ha	290 ha	295	300	305	310	310	310
7	Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Pesyaratan Lengkap	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

## **BAB VII**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Perencanaan jangka Menengah 5 tahun kedepan sebagai acuan pembangunan daerah bidang infrastruktur ke pu an, dan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu memperhatikan RPJMN 2015-2019, Renstra Kementrian Pekerjaan Umum, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Sektoral Terkait Lainnya. Dengan didukung sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Hasil pelaksanaan Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disampaikan dalam bentuk laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tanah Bumbu setiap akhir tahun anggaran.

Batulicin,

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KAB. TANAH BUMBU**

**Roy Rizali Anwar, MT**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19810430 200312 1 006**

## **LAMPIRAN**

**Tabel L.1**  
**Kerangka Regulasi Pengelolaan Sumberdaya Air**

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGE T
<b>PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR</b>					
1	PERDA SUNGAI	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria DAS dan Sub DAS</li> <li>• Kriteria Sungai</li> <li>• Penetapan Sungai dan Daerah Sempadan Sungai</li> <li>• Pengawasan dan Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai</li> <li>• Penertiban Daerah Sempadan Sungai</li> <li>• Pembebasan Lahan</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BAPPEDA, Kecamatan, BLH, Badan Perizinan	2017
2	PERDA KAWASAN RAWAN BANJIR DAN GENANGAN	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Banjir, Genangan, Pasang Surut, Daerah Rawa dan Perlindungan Setempat</li> <li>• Penetapan Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai), Daerah Rawa, Rawan Banjir dan Genangan</li> <li>• Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Banjir dan Genangan</li> <li>• Pengendalian Banjir dan Penanganan Genangan</li> <li>• Pembebasan Lahan</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BAPPEDA, Kecamatan, BLH, Badan Perizinan	2018
3	PERDA AIR BAKU	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air Permukaan dan Air Tanah</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN	Dinas Pertanian,	2018

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan Konservasi Sumber Air Baku</li> <li>• Penetapan Potensi Sumber Air Baku</li> <li>• Pemanfaatan Air Baku</li> <li>• Pengambilan Air Permukaan</li> <li>• Pengambilan Air Tanah</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, PDAM, Dinas Perikanan	
4	PERDA IRIGASI KABUPATEN	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Daerah Irigasi</li> <li>• Pemanfaatan dan Pengendalian Daerah Irigasi</li> <li>• Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi</li> <li>• Pengelolaan Aset Irigasi</li> <li>• Komisi Irigasi</li> <li>• Pengamanan dan Pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, PDAM, Dinas Perikanan	2019
5	PERDA DANAU DAN EMBUNG	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Danau dan Embung</li> <li>• Penetapan Danau dan Embung</li> <li>• Pengawasan dan Pemanfaatan Daerah Sempadan Danau dan Embung</li> <li>• Penertiban Daerah Sempadan Danau dan Embung</li> <li>• Pembebasan Lahan</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BAPPEDA, Kecamatan, BLH, Badan Perizinan	2017

**Tabel L.2**  
**Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
<b>PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN</b>					
1	PERDA/ PERBUP JALAN KAB.	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Jalan Kab.</li> <li>• Penetapan Jalan Kab.</li> <li>• Penetapan Sempadan Jalan Kab.</li> <li>• Pengawasan, Pemanfaatan dan Pengendalian Sempadan Jalan Kab.</li> <li>• Penertiban Sempadan Jalan Kab.</li> <li>• Penyelenggaraan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kab.</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perhubungan, BLH, Dinas Tata Kota	2017
2	PERDA/ PERBUP JALAN DESA	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Jalan Desa</li> <li>• Penetapan Jalan Desa</li> <li>• Penetapan Sempadan Jalan Desa</li> <li>• Pengawasan, Pemanfaatan dan Pengendalian Sempadan Jalan Desa</li> <li>• Penertiban Sempadan Jalan Desa</li> <li>• Penyelenggaraan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perhubungan, BLH, Dinas Tata Kota	2018
3	PERDA/ PERBUP JALAN LINGKUNGAN	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Jalan Lingkungan</li> <li>• Penetapan Jalan Lingkungan</li> <li>• Penetapan Sempadan Jalan Lingkungan</li> <li>• Pengawasan, Pemanfaatan dan</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perhubungan, BLH, Dinas Tata Kota	2019

		Pengendalian Sempadan Jalan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penertiban Sempadan Jalan Lingkungan</li> <li>• Penyelenggaraan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

**Tabel L.3**  
**Kerangka Regulasi Pengembangan Air Minum dan Air Limbah**

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
<b>PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH</b>					
1	PERDA/ PERBUP PENYELENGGARAAN SPAM KABUPATEN	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber dan Potensi Air Baku</li> <li>• Perlindungan dan Konservasi Air Baku</li> <li>• Pengambilan dan Pemanfaatan Air Baku</li> <li>• Zonasi Kawasan Pelayanan</li> <li>• Pengelolaan Air Minum</li> <li>• Distribusi Air Minum</li> <li>• Kinerja PDAM</li> <li>• Tarif Air Bersih/ Air Minum PDAM</li> <li>• Penyelenggaraan Air Minum Perdesaan/ Non Perpipaan</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PDAM, Dinas Kesehatan	2017
2	PERDA/ PERBUP PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Pengelolaan Air Limbah</li> <li>• Kawasan Wajib Pengelolaan Air Limbah</li> <li>• Kelembagaan Pengelola Air Limbah Kabupaten</li> <li>• Retribusi IPLT</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PDAM, Dinas Kesehatan, BLH	2018

Tabel L.4

## Kerangka Regulasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1	PERDA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TERTATA	<p>Materi yang di atur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal advice planning pada rencana tapak untuk keluarnya Izin Peruntukan Pemanfaatan Tanah/ PPT Kawasan yang dikembangkan Pengembang (<i>developer</i>)</li> <li>• Perumahan Tertata :Rumah Sederhana, Rumah Susun, Perumahan Dinas, Rumah Mewah</li> <li>• Kavling/ Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/ Lisiba)</li> <li>• Prasarana Sarana Minimum (Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan Air Limbah Komunal, Lebar Jalan Minimum, Fasilitas Lainnya)</li> <li>• Luas Kawasan Pengembangan Minimum</li> <li>• Luas Persil/ Bidang/ Kavling Tanah Minimum</li> <li>• Luas Bangunan Minimum</li> <li>• Konsolidasi Tanah</li> <li>• Penyediaan dan Pembangunan Perumahan</li> <li>• Pembiayaan Pemilikan Perumahan Sederhana/</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Badan Perizinan	2018

		<p>Sejahtera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung Jawab Pengembang (<i>Developer</i>)</li> <li>• Dukungan PSU</li> </ul>			
2	PERDA PENATAAN LINGAN PERMUKIMAN TIDAK TERTATA	<p>Materi yang di atur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni</li> <li>• Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni</li> <li>• Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni</li> <li>• Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		2017

*(Bangunan Gedung masuk ke Perumahan dan Permukiman)*

Tabel L.5

## Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGE T
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI					
1	PERDA IZIN PEMANFAATAN RUANG (IPR)	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Prinsip</li> <li>• Izin Lokasi</li> <li>• Izin Peruntukan Pemanfaatan Tanah (IPPT)/ Rencana Tapak "Siteplan"</li> <li>• Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>• Izin Lingkungan</li> </ul>	Tata Ruang	Bappeda, BPN, BLH, Dinas Tata Kota, Badan Perizinan	2018
2	PERDA GALERI TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Informasi dan Database Ke PU an</li> <li>• Informasi Publik</li> <li>• Akses Informasi Publik</li> <li>• Konsultasi</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bappeda, , Badan Perizinan	2019
3	PERUBAHAN PERDA E- GOVERNMENT	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan Perihal Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang</li> <li>• e- Database</li> <li>• e- Planning</li> <li>• e- Permit</li> <li>• e-Development</li> </ul>	Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinas Perhubungan dan Informatika	2018
4	PERDA SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG & PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG (E-PERMIT)	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standarisasi Informasi Data Peta Tata Ruang</li> <li>• Mekanisme dan SOP Perizinan Offline dan Perizinan Online</li> </ul>	Tata Ruang	Bappeda, Kecamatan, BPN, BLH, Dinas Tata Kota, Badan	2019

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGE T
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Pelayanan IPR</li> <li>• User dan Operator pada Sistem Informasi Online dan Offline</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>		Perizinan	
5	PERDA AUDIT TATA RUANG	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Pemanfaatan Ruang Pola Ruang RDTR</li> <li>• Audit Kinerja Prasarana Terhadap RTR</li> <li>• Audit Kinerja RTH dan Kehutanan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS)</li> <li>• Audit Insidentil</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	Tata Ruang	Bappeda, BPN, BLH, Dinas Tata Kota, Badan Perizinan	2020
6	PERDA Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTH)	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan</li> <li>• Penetapan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan</li> <li>• Penyediaan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan</li> <li>• Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan</li> <li>• Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan</li> <li>• Pembiayaan dan Pendanaan</li> <li>• Peran serta masyarakat</li> </ul>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BLH, Dinas Tata Kota, Dinas Kehutanan, BPBD	2018
7	PERDA IMB	Materi yang di atur :	DINAS	Bappeda,	2017

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGE T
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI					
		•	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BPN, BLH, Dinas Tata Kota, Badan Perizinan	
8	PERDA PERATURAN ZONASI	Materi yang di atur : • Peraturan Zonasi Perkotaan • Peraturan Zonasi Perdesaan • Peraturan Zonasi Pesisir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bappeda, BLH, Dinas Tata Kota, Badan Perizinan	2018
9	PERDA RTRW	Materi yang di atur : • Rencana Struktur • Rencana Pola Ruang • Rencana Kawasan Strategis			2016
10	PERDA RDTR	Materi yang di atur : • Deliniasi Batas Perkotaan • Rencana Sub BWP • Rencana Pola Ruang • Rencana Jaringan Prasarana • Peraturan Zonasi			2019- 2020
11	PERDA/ PERBUP RTBL	Materi yang di atur : • Tata bangunan dan lingkungan (sempadan bangunan, sempadan jalan) • Rencana Investasi			2017- 2020
12	PERDA / PERBUP PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Materi yang di atur : • Pelaku Jasa Konstruksi • Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2018

*(Tata Ruang dan Ruang Terbuka Hijau masuk Penataan Ruang*